



Kelas 10

PANCASILA

Pancasila dan Jati Diri Bangsa Indonesia:

Buku Pegangan Pancasila untuk Siswa Kelas 10

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya e-book Pancasila ini yang merupakan bagian dari upaya menghadirkan pembelajaran yang lebih mudah diakses oleh seluruh pelajar Indonesia. Pendidikan Pancasila adalah mata pelajaran yang mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila, identitas nasional, serta prinsip bernegara, yang bertujuan membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, dan berperan aktif dalam menjaga persatuan.

E-book ini disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran Pancasila Fase E (sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka). Konten e-book ini dirancang agar peserta didik dapat memahami materi Pancasila secara komprehensif, mengasah keterampilan berpikir kritis, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain materi utama, e-book ini juga dilengkapi dengan latihan soal, pembahasan, serta tautan ke sumber belajar tambahan seperti video pembelajaran interaktif.

E-book ini merupakan bagian dari platform [Fitri](#), sebuah platform pembelajaran digital yang menyediakan akses gratis ke berbagai materi belajar, termasuk e-book, latihan soal, dan video pembelajaran interaktif untuk seluruh anak Indonesia. Fitri hadir sebagai wujud kontribusi nyata dalam mendukung pemerataan akses pendidikan berkualitas di Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan inklusi, Fitri berkomitmen untuk membantu seluruh siswa, di mana pun berada, agar dapat belajar secara mandiri, efektif, dan menyenangkan. Hal ini selaras dengan tujuan besar pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersedianya e-book ini. Semoga kehadiran e-book Pancasila ini dapat memberikan manfaat nyata dalam proses belajar peserta didik dan turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi bangsa.

Jakarta, Juni 2025

Tim Fitri

Daftar Isi

BAB 1: PANCASILA SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN BANGSA.....	4
1. Pemikiran Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI	6
2. Sejarah Lahirnya Pancasila	20
3. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	29
4. Gagasan Solutif dalam Mengatasi Permasalahan Bangsa Negara	34
Rangkuman.....	43
Latihan Soal	44
Referensi	46
BAB 2: MENUMBUHKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM	47
1. Membangun Kesadaran Hukum di Tengah Masyarakat	49
2. Patuh Terhadap Hukum	64
3. Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban.....	73
4. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	78
Rangkuman.....	88
Latihan Soal	89
Referensi	91
BAB 3: KEBERAGAMAN SEBAGAI KUNCI PEMBANGUNAN NASIONAL.....	92
1. Asal Usul dan Makna Bhinneka Tunggal Ika	94
2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial.....	103
3. Membangun Harmoni dalam Keberagaman	118
4. Gotong Royong sebagai Sistem Ekonomi Pancasila Inklusif dan Berkeadilan	134
Rangkuman.....	140
Latihan Soal	141
Referensi	143
BAB 4: WARGA NEGARA YANG BERPERAN AKTIF DAN POSITIF	144
1. Hak dan Kewajiban dalam Berbagai Lingkungan.....	146
2. Kewarganegaraan Indonesia	154
3. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara.....	170
4. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara	188
5. Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembangunan	196
Rangkuman.....	207
Latihan Soal	208
Referensi	210



BAB 1

PANCASILA SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN BANGSA

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Bernalar Kritis**
Menganalisis sejarah dan makna Pancasila secara mendalam.
- ▷ **Berkebinekaan Global**
Menghargai perbedaan pandangan pendiri bangsa.
- ▷ **Beriman kepada Tuhan YME**
Memahami nilai ketuhanan dalam sila pertama.
- ▷ **Mandiri**
Menerapkan nilai Pancasila dalam keputusan pribadi.

Kata Kunci: Perumusan Pancasila, Sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, Panitia Sembilan, Nilai Pancasila, Dasar Negara, Ideologi Bangsa, Sistem Hukum, Kehidupan Bernegara.

Tujuan Pembelajaran: Memahami, Mengkaji, Menjelaskan, Menerapkan Nilai Pancasila

- 1. Menganalisis Pandangan Pendiri Bangsa Mengenai Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Memahami Kontribusi Pemikiran Mereka**
 - ▷ Mengidentifikasi gagasan utama para pendiri bangsa dalam perumusan Pancasila.
 - ▷ Menjelaskan perbedaan dan persamaan konsep yang diajukan dalam sidang BPUPKI.
- 2. Memahami secara Mendalam Proses Historis Lahirnya Pancasila dan Faktor-Faktor yang Melatarbelakanginya**
 - ▷ Menguraikan tahapan sejarah pembentukan Pancasila.
 - ▷ Menjelaskan peran BPUPKI, Panitia Sembilan, dan Piagam Jakarta dalam penyusunan Pancasila.

3. Menjelaskan Peran dan Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Serta Pedoman dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

- ▷ Menguraikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa.
- ▷ Menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi pedoman dalam sistem hukum dan pemerintahan.

4. Menguraikan Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-Hari

- ▷ Mengidentifikasi nilai-nilai dari setiap sila dalam Pancasila.
- ▷ Memberikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial dan budaya.



F I T R I



1. Pemikiran Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara dalam Sidang BPUPKI



Burung Garuda – Shutterstock.com/2440562027

Indonesia lahir dari perjuangan rakyat melawan penjajahan dan ketidakadilan. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia membutuhkan fondasi kuat yang mampu mempersatukan dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjelang kemerdekaan tahun 1945, muncul pertanyaan penting tentang dasar yang akan digunakan untuk membangun Indonesia merdeka. Untuk menjawabnya, dibentuklah BPUPKI yang bertugas merumuskan dasar negara.

BPUPKI mengadakan sidang pertama pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang prinsip-prinsip dasar negara. Sidang ini menjadi awal dari proses panjang perumusan Pancasila, yang mencerminkan keberagaman pemikiran para pendiri bangsa termasuk nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan. Bab ini akan mengulas secara mendalam perkembangan pemikiran tersebut hingga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia..

Pandangan Para Tokoh Pada 29 Mei 1945

Pada tanggal 29 Mei 1945, Sidang Pertama Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) resmi dimulai. Sidang ini merupakan langkah awal dalam perumusan dasar negara yang akan digunakan oleh Indonesia setelah merdeka. Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian akibat penjajahan Jepang yang mulai melemah, para pemimpin bangsa menyadari bahwa diperlukan pondasi negara yang kuat dan mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya, agama, dan etnis yang beragam. Sidang ini dibuka secara resmi oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, yang saat itu menjabat sebagai Ketua BPUPKI. Dalam pidato pembukaannya, Radjiman mengajukan pertanyaan yang menjadi titik tolak diskusi dalam sidang tersebut:

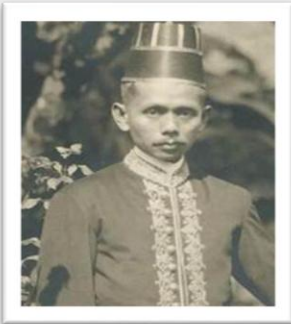
"Negara yang akan kita bentuk ini, apa dasarnya?"

Pertanyaan ini bukan sekadar pertanyaan retorik, melainkan sebuah pancingan untuk menggali berbagai pemikiran dari para tokoh bangsa mengenai konsep ideal bagi sebuah negara merdeka. Dengan diajukan pertanyaan tersebut, para peserta sidang mulai menyampaikan gagasan dan pandangan mereka tentang dasar negara Indonesia. Sebanyak 35 orang menyampaikan pendapatnya, namun 12 tokoh menyampaikan gagasan yang lebih terstruktur dan berpengaruh dalam perumusan dasar negara.

Beberapa tokoh yang berbicara pada hari pertama sidang memberikan perspektif yang berbeda mengenai dasar negara. Ada yang menitikberatkan pada nilai kebangsaan dan persatuan, ada yang mengutamakan nilai ketuhanan dan keagamaan, sementara yang lain lebih fokus pada sistem pemerintahan yang demokratis serta kesejahteraan sosial. Berikut adalah pemaparan pemikiran para tokoh tersebut:

Tabel Pandangan Para Tokoh pada Sidang BPUPK 29 Mei 1945

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
1.	 Muhammad Yamin Sumber : tempo.com	Dasar Negara Berbasis Kebangsaan dan Sosialisme	Ia menyampaikan lima asas utama yang menurutnya dapat menjadi dasar negara Indonesia: 1. Peri Kebangsaan – Indonesia harus menjadi negara yang bersatu, tanpa sekat-sekat perbedaan etnis dan suku. 2. Peri Kemanusiaan – Negara harus menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperlakukan semua warga negara secara adil dan beradab. 3. Peri Ketuhanan – Agama harus menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara, tetapi dengan tetap menghormati keberagaman kepercayaan di Indonesia. 4. Peri Kerakyatan – Sistem pemerintahan harus berbasis demokrasi, dengan keterlibatan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan. 5. Kesejahteraan Rakyat – Negara harus memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa adanya ketimpangan sosial yang besar. Namun, sejarawan A.B. Kusuma dalam penelitiannya menemukan bahwa lima asas tersebut tidak diucapkan langsung dalam pidato Yamin di sidang BPUPKI, melainkan baru dituliskan oleh Yamin dalam bukunya setelah sidang berlangsung. Ini menimbulkan perdebatan tentang apakah benar gagasan tersebut telah dikemukakan saat sidang atau baru dimunculkan belakangan.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
2.	K.R.M.A. Sosrodiningrat	Kemerdekaan Butuh Pengorbanan dan Persatuan	Tokoh lain yang menyampaikan pandangannya adalah K.R.M.A. Sosrodiningrat. Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa kemerdekaan bukan sekadar tujuan akhir, tetapi sebuah perjuangan yang membutuhkan keberanian dan pengorbanan. Menurutnya, bangsa yang ingin merdeka harus siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk peperangan. Oleh karena itu, persatuan menjadi faktor utama yang harus dijaga oleh rakyat Indonesia. Tanpa persatuan, perjuangan untuk mencapai kemerdekaan akan sulit terwujud.
3.	 R. A. A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro Sumber : Merdeka.com	Kepemimpinan yang Kuat untuk Negara Merdeka	Soemitro Kolopaking Poerbonegoro menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam membangun Indonesia merdeka. Menurutnya, calon pemimpin bangsa harus memiliki wawasan luas, pengalaman, dan kemampuan dalam mengelola negara. Ia juga menekankan bahwa kemerdekaan harus segera diwujudkan sebelum pihak asing kembali menguasai Indonesia.
4.	 R. A. A. Wiranatakoesoema Sumber : https://id.m.wikipedia.org/	Pentingnya Hak dan Kewajiban Rakyat dalam Negara Merdeka	Dalam pemaparannya, Wiranatakoesoema menyatakan bahwa negara yang merdeka harus memberikan penghargaan terhadap hak dan kewajiban rakyat secara seimbang. Artinya, setiap warga negara harus mendapatkan hak yang layak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga persatuan dan berkontribusi terhadap pembangunan negara.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
5.	K.R.M.T.H. Woerjaningrat	Makna Kemerdekaan dan Hubungan dengan Bangsa Asing	Woerjaningrat menyampaikan gagasan yang lebih konseptual dengan mengajukan beberapa pertanyaan mendasar kepada peserta sidang, seperti apa arti kemerdekaan, bagaimana batas wilayah Indonesia, serta bagaimana hubungan negara dengan bangsa asing. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi bahan refleksi bagi para peserta sidang untuk mempertimbangkan berbagai aspek sebelum merumuskan dasar negara.

6.



R. M. T. A. Soerjo

Sumber: cagarbudayajatim.com

Menurut Soerjo, ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi untuk mencapai kemerdekaan, yaitu:

1. Negara harus kuat dan sejahtera, baik dalam aspek ekonomi maupun militer.
2. Kemakmuran rakyat harus dijamin, sehingga kesejahteraan menjadi salah satu tujuan utama.
3. Keberlanjutan nilai-nilai nasional harus dijaga, agar negara tetap memiliki identitas yang kuat.

Baginya, kemerdekaan tidak sekadar membebaskan diri dari penjajahan, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk berkembang.

7.



Mr. Soesanto Tirtoprodjo

Sumber: jv.wikipedia.org

Soesanto Tirtoprodjo mengibaratkan negara Indonesia yang baru seperti sebuah rumah yang harus dibangun dengan fondasi yang kokoh. Ia menjelaskan bahwa negara harus memiliki tiga elemen utama:

1. **Dasar yang kuat (fundamental principles)** – Harus memiliki hukum dan norma yang jelas.
2. **Pilar-pilar utama** – Sistem pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan kehendak rakyat.
3. **Atap yang melindungi rakyat** – Nilai-nilai keagamaan yang memberikan arah dalam kehidupan berbangsa.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
			Menurutnya, negara harus mengedepankan prinsip demokrasi, kesejahteraan ekonomi, serta pendidikan yang berbasis moral dan intelektualisme.

8. **R. Soedirman**

Dalam sidang tersebut, Soedirman lebih memilih untuk tidak menyampaikan gagasan baru. Ia menyatakan bahwa pendapatnya sudah mencakup apa yang telah disampaikan oleh para tokoh sebelumnya.

9.	 Agoes Moesin Dasaad Sumber: cnbcindonesia.com	Dasar Negara Harus Berlandaskan Ketuhanan	
----	--	---	--

10.



**Prof. Ir. R. Roosseno
Soerjohadikoesoemo**

Sumber : id.wikipedia.org

Dalam pidatonya, Roosseno lebih berfokus pada kelemahan-kelemahan yang dimiliki bangsa Indonesia. Ia menyoroti bahwa sebelum merdeka, masyarakat harus mempersiapkan diri dengan baik dalam berbagai aspek, seperti:

1. Pendidikan nasional yang merata.
2. Pengembangan ekonomi yang kuat.
3. Kesiapan dalam hubungan politik internasional.

Baginya, tanpa perencanaan yang matang, kemerdekaan Indonesia bisa menghadapi berbagai tantangan besar.

11.	M. Aris		Menurut M. Aris, dasar Indonesia Merdeka adalah konsep Hakko Itiu Itiu dari Jepang, yang berarti "Delapan Penjuru Dunia dalam Satu Atap". Ia mengusulkan bahwa negara yang merdeka harus memiliki jiwa yang kuat
-----	----------------	--	--

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
			dan semangat kerja keras. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan tenaga kerja yang kompeten, agar Indonesia bisa bersaing di tingkat global.

Pendapat yang dikemukakan dalam sidang 30 Mei 1945

Setelah pembahasan awal mengenai dasar negara pada 29 Mei 1945, sidang BPUPKI berlanjut ke hari kedua, yakni 30 Mei 1945. Pada hari ini, 9 tokoh menyampaikan gagasannya mengenai konsep dasar negara yang ideal bagi Indonesia Merdeka. Beberapa tokoh yang menjadi pembicara dalam sidang hari kedua ini antara lain Mohammad Hatta, Agoes Salim, Samsuudin, Wongsonegoro, Soerachman Tjokroadisoerjo, Soewandi, Abdoelrahim Pratallykrama, Soekiman Wirjosandjojo, dan Soetardjo Kartohadikoesoemo. Namun, dalam penelitian A.B. Kusuma (2004), hanya 2 stenograf pidato yang berhasil ditemukan dari keseluruhan pembicara pada sidang 30 Mei 1945. Oleh karena itu, informasi yang tersedia mengenai isi pidato tokoh lainnya masih terbatas. Berikut gagasan pendapat yang berhasil terdokumentasi dari dua tokoh yang menyampaikan pandangannya dalam sidang BPUPKI pada 30 Mei 1945:

Tabel Pendapat Para Tokoh pada Sidang BPUPKI 30 Mei 1945

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
1.	 Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro Sumber: <i>historia.id</i>	Pemerintahan Sementara untuk Persiapan Negara yang Stabil	Menurut kajian A.B. Kusuma (2004), Wongsonegoro menekankan pentingnya pembentukan pemerintahan sementara sebagai langkah awal menuju pemerintahan yang stabil dan tetap. Ia berpandangan bahwa Indonesia memerlukan masa transisi yang matang sebelum membentuk pemerintahan definitif. Dalam masa transisi tersebut, perlu ada keseimbangan antara struktur pemerintahan, hukum, dan kebijakan nasional agar tidak terjadi kekacauan pasca-kemerdekaan.
2.	 R. Abdoelrahim Pratallykrama Sumber: <i>kediritungguh.co</i>	Persatuan Rakyat yang Kuat dan Peran Islam dalam Negara	Dalam pidatonya, Abdoelrahim Pratallykrama menekankan bahwa persatuan rakyat harus menjadi fondasi utama Indonesia Merdeka. Ia mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa agar tidak terjadi perpecahan. Pratallykrama juga mengusulkan Islam sebagai agama negara, namun tetap menjamin kebebasan beragama bagi pemeluk agama lain. Ia menilai agama memiliki peran penting dalam membentuk moral masyarakat dan menjadi pedoman pemerintahan. Selain itu, ia menegaskan bahwa persatuan bangsa harus kokoh dan dijaga oleh seluruh warga demi mewujudkan Indonesia yang kuat dan stabil.

Usulan dan Gagasan Pada 31 Mei 1945

Pada 31 Mei 1945, sidang BPUPKI memasuki hari ketiga dengan semakin banyaknya tokoh yang menyampaikan pandangannya terkait dasar negara. Pada hari ini, 14 orang tokoh turut serta menyampaikan gagasan mereka. Namun, berdasarkan kajian A.B. Kusuma (2004), stenograf pidato dari 6 orang tokoh tidak ditemukan, yaitu pidato dari K.H. Ahmad Sanoesi, Moenandar, Koesoema Atmadja, Oei Tjong Hauw, Parada Harahap, dan Boentaran Martoatmodjo. Sementara itu, Sukarno juga berbicara dalam sidang ini, tetapi dalam stenografinya ia lebih banyak memberikan tanggapan terhadap gagasan yang telah dikemukakan oleh para tokoh sebelumnya, bukan menyampaikan usulan baru secara langsung. Berikut ini adalah gagasan utama dari tokoh-tokoh yang stenograf pidatonya ditemukan dalam sidang 31 Mei 1945:

Tabel Gagasan Para Tokoh pada 31 Mei 1945

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
1.	 R. Abdoel Kadir Sumber: id.wikipedia.org	Pilar-Pilar Dasar Negara yang Berorientasi pada Rakyat	Dalam pidatonya, R. Abdoel Kadir menekankan bahwa negara yang akan dibentuk harus didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu: 1. Persatuan – Negara harus menjunjung tinggi kesatuan dan kebersamaan seluruh rakyat, tanpa adanya perpecahan yang didasarkan pada perbedaan suku, agama, atau golongan. 2. Pendidikan Rakyat – Pendidikan harus menjadi prioritas utama negara, karena hanya dengan pendidikan yang baik rakyat dapat berkembang dan membangun bangsa yang lebih maju. 3. Pembangunan Ekonomi – Pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkeadilan. Menurutnya, ketiga aspek tersebut sangat penting dalam memastikan bahwa Indonesia merdeka bisa berdiri kokoh dan berkembang sebagai negara yang mandiri.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
2.	 Prof. Mr. Dr. Soepomo Sumber: id.wikipedia.org	Negara Integralistik dan Persatuan Nasional	Prof. Mr. Dr. Soepomo mengajukan konsep bahwa negara Indonesia harus didirikan berdasarkan negara integralistik, yakni negara yang menyatukan seluruh elemen masyarakat di bawah satu kepemimpinan yang kuat. Menurutnya, negara harus memiliki tiga syarat utama, yaitu: 1. Territory (Wilayah Negara) – Negara harus memiliki batas wilayah yang jelas dan diakui secara hukum internasional. 2. Sovereignty (Kedaulatan Rakyat dan Pemerintahan yang Berdaulat) – Pemerintahan harus memiliki kekuatan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan tanpa intervensi pihak asing. 3. Kesatuan dalam Keanekaragaman – Meskipun masyarakat Indonesia memiliki berbagai latar belakang etnis dan budaya, negara harus tetap mempersatukan mereka dalam satu sistem pemerintahan yang terorganisir. Soepomo membandingkan karakteristik masyarakat Indonesia dengan negara-negara lain, seperti masyarakat Eropa Barat yang lebih individualis dan masyarakat Rusia yang cenderung memiliki sistem pemerintahan yang bersifat totaliter. Ia menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki corak persatuan yang khas dan harus didasarkan pada prinsip staatsidee (konsep negara) yang integratif.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
3.	 Mr. R. Hindromartono Sumber: id.wikipedia.org	Kesejahteraan Rakyat dan Kemandirian Nasional	Dalam pidatonya, Hindromartono menyoroti bahwa perekonomian dan keadilan sosial harus menjadi pilar utama dalam pembangunan masyarakat Indonesia. Ia menyampaikan dua poin penting: 1. Kemandirian Ekonomi Nasional – Sistem ekonomi harus dibuat agar tidak bergantung pada pihak asing, tetapi juga harus mampu menciptakan keadilan dalam distribusi kesejahteraan rakyat. 2. Tentara Rakyat sebagai Pilar Keamanan Negara – Hindromartono mengusulkan agar tentara rakyat menjadi kekuatan pertahanan utama Indonesia, bukan hanya pasukan militer profesional, tetapi melibatkan rakyat dalam membela negara. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang atau kepentingan asing.
4.	 P.F. Dahler Sumber : Kompas.com	Negara Berbasis Persatuan Nasional, Bukan Ras atau Agama	P.F. Dahler, seorang tokoh peranakan Belanda yang berpihak pada perjuangan kemerdekaan Indonesia, menyatakan bahwa negara yang akan dibentuk tidak boleh didasarkan pada perbedaan bahasa, ras, atau agama, tetapi harus dibangun atas dasar persatuan nasional yang inklusif. Ia mengutip istilah "J'aime avec le desire d'etre ensemble", yang berarti "Aku mencintai dengan keinginan untuk bersama", sebagai refleksi bahwa persatuan bangsa harus melampaui batas-batas identitas individu. Menurut Dahler, bangsa Indonesia harus menjaga persatuan dalam jangka panjang, agar stabilitas nasional tetap terpelihara dan tidak mudah terpecah oleh perbedaan etnis atau keyakinan.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
5.	 Liem Koen Hian Sumber : id.wikipedia.org	Peran Kaum Tionghoa Indonesia Merdeka dalam	Sebagai salah satu perwakilan keturunan Tionghoa di BPUPKI, Liem Koen Hian menekankan bahwa masyarakat Tionghoa di Indonesia juga memiliki semangat perjuangan untuk kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa: 1. Kaum Tionghoa harus diakui sebagai bagian dari bangsa Indonesia dan harus memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan penduduk pribumi. 2. Kapitalisme tidak boleh menjadi sistem ekonomi utama – Menurutnya, kapitalisme hanya akan memperbesar kesenjangan sosial di Indonesia. Dengan gagasan ini, ia berharap bahwa setelah merdeka, Indonesia dapat menjadi negara yang inklusif dan tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu berdasarkan latar belakang etnis.
6.	 Ki Bagoes Hadikoesoemo Sumber : id.wikipedia.org	Islam sebagai Fondasi Moral Bangsa	Ki Bagoes Hadikoesoemo, sebagai salah satu tokoh Islam di BPUPKI, menekankan bahwa ajaran Islam memiliki peran besar dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Ia mengajukan beberapa prinsip utama, di antaranya: 1. Islam mengajarkan pentingnya persatuan nasional dan membangun negara yang kokoh. 2. Agama sebagai sumber moralitas dan keadilan sosial, agar pemerintahan dijalankan dengan nilai-nilai kebenaran dan keseimbangan. 3. Perekonomian harus mengedepankan keadilan, bukan hanya berorientasi pada keuntungan semata. Ia juga menyoroti bahwa Islam tidak bertentangan dengan nasionalisme, tetapi justru menjadi faktor penguat dalam membangun negara yang adil dan bermartabat.

No	Nama Tokoh	Poin Pemikiran	Penjelasan
7.	 Muhammad Yamin Sumber : tempo.co	Wilayah dan Konsep Negara Kebangsaan	Muhammad Yamin menambahkan gagasannya tentang konsep negara kebangsaan Indonesia dengan menjelaskan batas wilayah Indonesia menurut sejarah Nusantara. Ia membagi wilayah negara ke dalam beberapa kategori: 1. Wilayah Hindia Belanda yang pernah menjadi medan perang 2. Wilayah seperti Tarakan, Morotai, Papua, dan Halmahera 3. Timor Portugis dan Borneo Utara 4. Wilayah Malaya, kecuali beberapa daerah seperti Kedah dan Perlis Ia menekankan bahwa pemahaman tentang batas wilayah sangat penting dalam membentuk identitas negara Indonesia yang merdeka.

Konsep Dasar Negara yang Disampaikan pada 1 Juni 1945

Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945 menjadi sesi penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pada hari ini, 6 tokoh utama menyampaikan pandangannya mengenai dasar negara, yaitu A.R. Baswedan, Abdoel Kahar Moezakir, Oto Iskandar Di Nata, Sukarno, Johannes Latuharhary, dan Soekardjo.

Namun, berdasarkan penelitian A.B. Kusuma (2004), stenograf pidato dari 4 tokoh (Baswedan, Moezakir, Latuharhary, dan Soekardjo) belum ditemukan. Sementara itu, naskah pidato Oto Iskandar Di Nata hanya berisi pernyataan yang akan dikirimkan ke Pemerintah Jepang, sehingga satu-satunya pidato yang dapat dikaji secara langsung adalah pidato Sukarno.



Sidang BPUPKI - commons.wikimedia.org

Dalam sidang ini, Sukarno menjadi tokoh kunci yang menyampaikan konsep dasar negara yang lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan gagasan-gagasan sebelumnya. Inilah momen di mana istilah "Pancasila" pertama kali diperkenalkan sebagai dasar negara Indonesia. Menurut A.B. Kusuma (2004),

Sukarno adalah satu-satunya tokoh dalam BPUPKI yang menyusun dasar negara dalam bentuk filsafat atau philosophical grondslag. Istilah ini merujuk pada konsep fundamen filosofis negara, yang belum disampaikan secara eksplisit oleh tokoh-tokoh sebelumnya, termasuk Muhammad Yamin dan Soepomo.

Sukarno menjelaskan bahwa istilah philosophische grondslag yang dia ajukan mengacu pada dasar yang kuat untuk membangun bangsa Indonesia, baik dari aspek fundamental, filsafat, maupun jiwa bangsa. Ia menekankan bahwa dasar negara ini harus mampu menyatukan rakyat Indonesia dalam satu visi yang kekal dan abadi.

Dalam pidatonya yang terdiri dari sekitar 20 halaman, Sukarno menguraikan lima prinsip utama yang menurutnya dapat menjadi dasar negara Indonesia. Kelima prinsip ini kemudian dikenal sebagai Pancasila, meskipun urutan dan susunannya mengalami perubahan dalam tahap perumusan selanjutnya.

Berikut adalah lima prinsip dasar negara yang disampaikan oleh Sukarno dalam pidatonya:

a. Konsep Kebangsaan Indonesia

Sukarno menegaskan bahwa Indonesia bukan hanya milik satu suku atau kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat yang tinggal di seluruh kepulauan Nusantara.

Ia mencontohkan bahwa Indonesia bukan hanya Minangkabau, Aceh, Sunda, atau Bugis, tetapi mencakup semua wilayah dari Sumatera hingga Papua. Konsep ini dikenal sebagai "le desir d'être ensemble", yaitu kehendak untuk hidup bersama dalam satu identitas nasional.

b. Prinsip Internasionalisme atau Kemanusiaan

Sukarno menekankan bahwa meskipun Indonesia harus kuat sebagai bangsa, negara ini juga harus menjunjung tinggi hubungan baik dengan negara lain.

Ia menolak konsep chauvinisme, yaitu pandangan yang menganggap bangsa sendiri lebih unggul dibanding bangsa lain. Sebaliknya, ia ingin Indonesia menjadi bagian dari keluarga bangsa-bangsa dunia, dengan prinsip kerja sama internasional yang adil dan setara.

c. Musyawarah atau Demokrasi

Prinsip ketiga yang diajukan Sukarno adalah demokrasi yang berbasis musyawarah dan mufakat. Menurutnya, sistem pemerintahan yang ideal bagi Indonesia adalah sistem yang tidak otoriter, tetapi juga tidak sekadar demokrasi liberal ala Barat. Demokrasi Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan kebersamaan, sebagaimana yang telah diterapkan dalam tradisi lokal, seperti rembug desa dan musyawarah adat.

d. Kesejahteraan Sosial

Sukarno menolak sistem kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang. Menurutnya, ekonomi Indonesia harus berorientasi pada kesejahteraan bersama, dengan prinsip bahwa negara harus berperan dalam menciptakan distribusi ekonomi yang adil.

Ia menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka harus menjadi negara yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, bukan negara yang hanya menguntungkan kalangan elite atau pemodal asing.

e. Nilai Ketuhanan yang Berkebudayaan

Prinsip terakhir yang diajukan oleh Sukarno adalah Ketuhanan yang berbasis pada keberagaman dan toleransi. Sukarno mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa yang ber-Tuhan, tetapi cara ber-Tuhan setiap orang harus mencerminkan sikap saling menghormati antarumat beragama. Ia menolak sikap egoisme agama, di mana satu kelompok merasa lebih unggul dibandingkan kelompok lain dalam hal keyakinan.

Pidato Sukarno pada 1 Juni 1945 menjadi tonggak penting dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Ia menekankan bahwa ajaran agama harus dijalankan dengan sikap saling menghormati, seperti yang

dicontohkan para nabi dan pemimpin agama besar. Dalam pidatonya, Sukarno pertama kali memperkenalkan istilah "Pancasila" sebagai dasar negara, yang memuat lima prinsip utama yaitu, demokrasi dan kesejahteraan sosial yang menolak kapitalisme Barat, persatuan nasional tanpa membedakan suku dan agama, internasionalisme dan perikemanusiaan yang menolak isolasi, serta agama sebagai sumber moral dengan semangat toleransi.

Pidato ini menjadi acuan Panitia Sembilan dalam menyusun Piagam Jakarta, yang kemudian melandasi Pembukaan UUD 1945. Pancasila kemudian dirumuskan lebih terstruktur dan diresmikan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI, meskipun mengalami perubahan dalam urutan dan redaksi sila pertama. Hingga kini, 1 Juni diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, mengenang momen penting ketika Sukarno berhasil merangkum seluruh gagasan yang berkembang dalam sidang BPUPKI dan menyusunnya menjadi konsep dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia..



Jejak Pancasila

Soekarno Menyampaikan Konsep Trisila dan Ekasila

Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, Soekarno awalnya mengusulkan Trisila (Sosionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan yang Berkebudayaan) dan Ekasila (Gotong Royong) sebelum akhirnya memilih Pancasila sebagai dasar negara.



Contoh Soal

Soal 1

Sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara Indonesia dilaksanakan pada tanggal...

- A. 1 Juni 1945
- B. 22 Juni 1945
- C. 29 Mei - 1 Juni 1945
- D. 17 Agustus 1945
- E. 18 Agustus 1945

Jawaban: C

Pembahasan: Sidang pertama BPUPKI berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, membahas konsep dasar negara yang diusulkan oleh berbagai tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Soal 2

Konsep negara integralistik yang menekankan pada kesatuan antara rakyat dan negara dikemukakan oleh...

- A. Soekarno
- B. Soepomo
- C. Moh. Hatta
- D. Tan Malaka

E. Sutan Sjahrir

Jawaban: B

Pembahasan: Soepomo mengusulkan konsep negara integralistik, di mana negara dipandang sebagai kesatuan yang menyeluruh dan bukan sekadar gabungan individu-individu.

Pembahasan: Piagam Jakarta dirumuskan oleh Panitia Sembilan, yang bertugas menyusun rancangan dasar negara berdasarkan hasil sidang BPUPKI.

Kegiatan Kelompok 1

Mengkaji Pemikiran Pendiri Bangsa dalam Sidang BPUPKI

Tujuan: Mengidentifikasi dan memahami pemikiran tokoh-tokoh bangsa mengenai dasar negara yang disampaikan dalam sidang BPUPKI.

Indonesia dibentuk dari keberagaman budaya, suku, agama, dan pandangan hidup. Dalam proses menuju kemerdekaan, para tokoh bangsa berkumpul dalam Sidang BPUPKI untuk merumuskan dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa. Mereka menyampaikan berbagai gagasan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, ketuhanan, dan kesejahteraan sosial. Untuk memahami lebih dalam pemikiran-pemikiran tersebut, lakukan kegiatan berikut ini:

- 1) Bentuk kelompok kerja yang terdiri atas 4–5 peserta didik.
- 2) Pilih salah satu tokoh dari sidang BPUPKI yang gagasannya tersedia lengkap dalam buku.
- 3) Pelajari pemikiran tokoh tersebut dan cari tahu latar belakang, konteks, serta tujuan dari gagasannya.
- 4) Diskusikan dalam kelompok:
 - a. Apa inti dari gagasan tokoh tersebut?
 - b. Nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalamnya?
 - c. Bagaimana gagasan itu mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila?
- 5) Bandingkan gagasan tokoh pilihan kalian dengan tokoh lain. Apa persamaan dan perbedaannya?
- 6) Susun hasil diskusi dalam bentuk presentasi kreatif, seperti:
 - ▷ Infografik,
 - ▷ Poster digital/manual,
 - ▷ Video singkat,
 - ▷ atau media lainnya sesuai kesepakatan kelompok.
- 7) Tampilkan dan jelaskan hasil karya kalian di depan kelas untuk mendapatkan masukan dari guru dan teman-teman.



2. Sejarah Lahirnya Pancasila



Tugu Proklamasi – Shutterstock.com/2346802123

Keberadaan bangsa Indonesia sebagai entitas yang kuat merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang sejak 60 ribu tahun lalu, menurut penelitian Dr. Herawati Sudoyo. Sejak masa praaksara, masyarakat telah menjunjung nilai-nilai religius, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang tercermin dalam budaya dan sistem sosial. Nilai-nilai ini berkembang dalam sistem pemerintahan kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, hingga Mataram Islam. Konsep Pancasila sudah dikenal sejak masa Majapahit, tercantum dalam Kitab Sutasoma dan Nagarakretagama, termasuk semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" sebagai lambang persatuan dalam keberagaman. Kekayaan Nusantara menarik bangsa asing dan menyebabkan penjajahan, memunculkan perlawanan rakyat yang awalnya bersifat lokal. Sejak Kebangkitan Nasional 1908, perjuangan bergeser ke jalur politik dengan tokoh seperti Soekarno dan Hatta. Pendudukan Jepang membawa eksploitasi yang justru memperkuat semangat kemerdekaan. Untuk meredam perlawanan, Jepang membentuk BPUPKI pada 1945, yang menjadi forum resmi perumusan dasar negara, yaitu Pancasila.

Pembentukan BPUPKI dan Pelaksanaan Sidang Pertama

Kehadiran Jepang di Indonesia dimulai setelah serangan ke Pearl Harbor pada 8 Desember 1941 dan jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang pada Maret 1942. Namun, ketika posisi Jepang melemah pada 1944 akibat serangan Sekutu, mereka mulai menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan rencana pemberian kemerdekaan. Sebagai langkah awal, pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) oleh Letjen Kumakici Harada. BPUPKI dilantik secara resmi pada 28 Mei 1945 di Jakarta.

a. Tujuan dan Komposisi BPUPKI

BPUPKI bertugas membahas aspek politik, ekonomi, dan pemerintahan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka. Meski dibentuk atas inisiatif Jepang sebagai strategi mempertahankan pengaruh, bagi bangsa Indonesia, ini menjadi momentum penting untuk merumuskan dasar negara.

▷ Struktur BPUPKI:

- 1) Ketua: Dr. Radjiman Wedyodiningrat
- 2) Wakil Ketua: R.P. Soeroso dan Ichibangase Yosio
- 3) 60 anggota tetap
- 4) 6 anggota tambahan (bergabung pada sidang kedua)
- 5) 7 anggota istimewa dari Jepang (tidak memiliki hak suara)

▷ Dua bagian utama dalam BPUPKI:

- 1) Badan Perundingan: terdiri dari anggota tetap, tambahan, dan istimewa.
- 2) Kantor Tata Usaha/Sekretariat: dipimpin R.P. Soeroso, dibantu Toyohito Masuda dan A.G. Pringgodigdo.

▷ Tokoh penting dalam BPUPKI:

- 1) Ir. Sukarno
- 2) Drs. Mohammad Hatta
- 3) Mr. Muhammad Yamin
- 4) Ki Hadjar Dewantara
- 5) Abdoel Kahar Moezakir
- 6) Abdoelrahim Pratolykrama
- 7) Liem Koen Hian
- 8) Johannes Latuharhary, dll.

b. Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)

Sidang pertama BPUPKI menjadi tonggak awal dalam merumuskan dasar negara Indonesia. Dari 60 anggota, sekitar 35 orang menyampaikan gagasan mengenai dasar negara dengan beragam pandangan tentang sistem pemerintahan, peran agama, dan prinsip kebangsaan. Perdebatan mencakup:

- 1) Apakah Islam dijadikan dasar negara?
- 2) Bagaimana menjaga persatuan dalam keberagaman?

Proses Perumusan Pancasila

Setelah sidang pertama BPUPKI (29 Mei - 1 Juni 1945) yang membahas berbagai gagasan tentang dasar negara, ditemukan bahwa masih terdapat perbedaan pandangan yang signifikan di antara para anggota. Oleh karena itu, dibentuk beberapa panitia kecil guna merumuskan lebih lanjut konsep dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak.

Dua panitia yang memiliki peran penting dalam perumusan dasar negara ini adalah Panitia Delapan dan Panitia Sembilan. Panitia Delapan bertugas mengklasifikasikan usulan-usulan mengenai dasar negara, sementara Panitia Sembilan bertugas menyusun rumusan awal yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.

a. Peran Panitia Delapan dalam perumusan dasar negara

- ▷ Pembentukan Panitia Delapan

Pada akhir sidang pertama BPUPKI, Ketua Dr. Radjiman Wedyodiningrat membentuk sebuah panitia kecil beranggotakan delapan orang, yang kemudian dikenal sebagai Panitia Delapan. Panitia ini terdiri dari perwakilan golongan kebangsaan dan golongan keagamaan, dengan tujuan utama menelaah dan mengklasifikasikan berbagai gagasan yang telah disampaikan dalam sidang pertama.

Susunan anggota Panitia Delapan adalah sebagai berikut:

- 1) Ir. Sukarno (Ketua)
- 2) Drs. Mohammad Hatta
- 3) Mr. Muhammad Yamin
- 4) Prof. Dr. Soepomo
- 5) Mr. Ahmad Soebardjo
- 6) Mr. A.A. Maramis
- 7) Ki Bagus Hadikusumo
- 8) K.H. Wachid Hasyim

▷ Tugas dan Peran Panitia Delapan

Panitia Delapan memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun laporan awal mengenai dasar negara yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam sidang BPUPKI kedua. Mereka mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan merangkum berbagai usulan mengenai dasar negara yang telah disampaikan oleh para tokoh dalam sidang pertama.

Pada 18-21 Juni 1945, ketika Dewan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In) sedang melaksanakan sidangnya, Sukarno memanfaatkan momen ini untuk mengadakan pertemuan informal dengan para anggota BPUPKI guna membahas lebih lanjut dasar negara Indonesia. Dari 47 anggota BPUPKI yang diundang, 38 orang hadir dalam pertemuan tersebut, yang kemudian menghasilkan sembilan kategori usulan utama, yaitu:

- 1) Indonesia merdeka secepatnya.
- 2) Dasar negara yang akan digunakan.
- 3) Model pemerintahan: unitarisme atau federalisme.
- 4) Bentuk negara dan kepala negara.
- 5) Peraturan tentang warga negara.
- 6) Pembagian wilayah administratif.
- 7) Hubungan agama dan negara.
- 8) Kebijakan pertahanan dan keamanan negara.
- 9) Sistem ekonomi dan keuangan negara.

Meskipun Panitia Delapan berhasil mengklasifikasikan berbagai gagasan, mereka belum mampu menghasilkan satu rumusan dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu, dibentuklah Panitia Sembilan untuk menyempurnakan hasil kerja Panitia Delapan.

b. Kontribusi Panitia Sembilan dalam penyusunan Piagam Jakarta

▷ Pembentukan Panitia Sembilan

Pada 22 Juni 1945, dalam pertemuan terakhir Panitia Delapan, Sukarno mengusulkan pembentukan Panitia Sembilan untuk lebih memfokuskan perumusan dasar negara. Inisiatif ini muncul karena Panitia Delapan dianggap kurang seimbang, terutama dalam representasi antara kelompok kebangsaan dan kelompok Islam.



Panitia Sembilan – Kompas.com

Panitia Sembilan dipilih dengan komposisi yang lebih adil, sehingga dapat menjembatani perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Berikut adalah susunan anggota Panitia Sembilan:

- 1) Ir. Sukarno (Ketua)
- 2) Drs. Mohammad Hatta
- 3) Mr. Muhammad Yamin
- 4) Mr. Ahmad Soebardjo
- 5) Mr. A.A. Maramis
- 6) K.H. Wachid Hasyim
- 7) Abdoel Kahar Moezakir
- 8) H. Agus Salim
- 9) R. Abikoesno Tjokrosoejoso

▷ Penyusunan Piagam Jakarta

Pada malam 22 Juni 1945, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah kediaman Sukarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Agenda utama pertemuan ini adalah merumuskan preambule atau pembukaan bagi hukum dasar Indonesia, yang kelak menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945. Setelah melewati berbagai diskusi dan kompromi, Panitia Sembilan berhasil menyusun sebuah dokumen penting yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini kemudian disepakati sebagai landasan awal dasar negara Indonesia. Piagam Jakarta mengandung prinsip utama yang menjadi dasar negara, yaitu:

- 1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.

- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

▷ Kontroversi dan Perubahan Rumusan Piagam Jakarta



Isi Piagam Jakarta – id.wikipedia.org

Meskipun Piagam Jakarta telah disepakati dalam pertemuan Panitia Sembilan, rumusan sila pertama menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan perwakilan dari Indonesia bagian timur yang mayoritas non-Muslim. Mereka merasa bahwa frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dapat menyebabkan perpecahan di masa depan.

Akhirnya, dalam sidang 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, dilakukan perubahan pada sila pertama agar lebih inklusif. Frasa tersebut kemudian disederhanakan menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga lebih mewakili seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang agama tertentu.

Proklamasi dan Pengesahan Pancasila

Sila Proses menuju kemerdekaan Indonesia dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara tidaklah terjadi dalam sekejap. Perjalanan ini melewati serangkaian peristiwa penting yang melibatkan diskusi, perumusan, serta kompromi antara berbagai pihak. Setelah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) selesai dengan tugasnya, Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) guna mempercepat pembentukan pemerintahan Indonesia yang merdeka.

PPKI memainkan peran kunci dalam tahap akhir perumusan dasar negara, termasuk dalam penyempurnaan rumusan Pancasila. Di sisi lain, peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 juga menjadi momentum penting dalam legalisasi dasar negara Indonesia.



Sidang PPKI – commons.wikimedia.org

a. Pembentukan PPKI dan Rapat dengan Marsekal Terauchi

Pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sebagai pengganti BPUPKI, seperti diumumkan oleh Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi Jepang di Asia Tenggara. Jepang juga mengundang para pemimpin Indonesia ke markasnya di Dalat, Vietnam, untuk membahas persiapan kemerdekaan. Pada 8 Agustus 1945, Sukarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat berangkat ke Vietnam dan tiba di Dalat pada 11 Agustus. Esok harinya, mereka bertemu Marsekal Terauchi, yang menyatakan bahwa Jepang telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ditetapkan bahwa Sukarno dan Hatta menjadi Ketua dan Wakil Ketua PPKI, dengan 21 anggota lainnya mewakili keberagaman wilayah Indonesia. Tanggal 12 Agustus 1945 pun dianggap sebagai tanggal resmi pembentukan PPKI. Namun, di saat yang sama, posisi Jepang sangat lemah akibat serangan bom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima (6 Agustus) dan Nagasaki (9 Agustus). Akibat tekanan tersebut, Jepang menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Momen ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya.

b. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia



Pembacaan Teks Proklamasi – Detik.com

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, muncul perbedaan pendapat di antara para pemimpin nasional mengenai waktu proklamasi kemerdekaan. Kelompok tua seperti Sukarno dan Hatta memilih menunggu kepastian dari Jepang sesuai janji Marsekal Terauchi, sementara kelompok muda seperti Chaerul Saleh, Wikana, dan Sukarni mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan tanpa

campur tangan Jepang. Perbedaan ini memicu Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945, di mana kelompok muda membawa Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Setelah perdebatan, disepakati bahwa proklamasi akan dilakukan keesokan harinya.

Pada 17 Agustus 1945, di rumah Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, Sukarno didampingi Hatta membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, menandai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pertama untuk mengesahkan sejumlah keputusan penting, termasuk pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.

c. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 memiliki agenda utama sebagai berikut:

- ▷ Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat dasar negara.
- ▷ Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pertama (Sukarno dan Mohammad Hatta).
- ▷ Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai badan legislatif sementara sebelum terbentuknya DPR dan MPR.

Dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat perdebatan terkait isi preambule atau pembukaannya, yang masih menggunakan rumusan Piagam Jakarta. Perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan terhadap kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", karena dianggap dapat menimbulkan perpecahan di masa depan.

Setelah melalui diskusi panjang, akhirnya disepakati bahwa frasa tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", agar lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman bangsa Indonesia. Perubahan ini merupakan salah satu keputusan paling penting dalam sejarah perumusan Pancasila, karena memastikan bahwa Pancasila dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama.

d. Keputusan Terakhir dan Implikasi Pancasila

Dengan pengesahan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan dasar negara Pancasila, Indonesia secara resmi memiliki landasan konstitusional yang kuat. Lima sila yang akhirnya menjadi dasar negara Indonesia adalah:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 3) Persatuan Indonesia
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Keputusan ini menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar hasil kompromi politik, tetapi juga perwujudan dari nilai-nilai yang telah lama berkembang dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi menyatukan seluruh elemen masyarakat dalam satu kesepahaman bersama mengenai prinsip-prinsip kehidupan bernegara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Jejak Pancasila

Istilah "Pancasila" Sudah Ada Sejak Zaman Majapahit

Istilah Pancasila ditemukan dalam Kitab. Negarakertagama dan Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular di era Majapahit, yang bermakna "lima prinsip moral utama".



Contoh Soal

Soal 1

Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada tanggal...

- A. 1 Juni 1945
- B. 22 Juni 1945
- C. 17 Agustus 1945
- D. 18 Agustus 1945

E. 27 Desember 1949

Jawaban: D

Pembahasan: Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI.

Soal 2

Panitia Sembilan merumuskan Piagam Jakarta yang merupakan cikal bakal...

- A. Proklamasi Kemerdekaan
- B. Pembukaan UUD 1945
- C. GBHN
- D. Ketetapan MPR
- E. Dekrit Presiden

Jawaban: B

Pembahasan: Piagam Jakarta menjadi cikal bakal Pembukaan UUD 1945, yang kemudian diubah dalam sila pertamanya.

Kegiatan Kelompok 2

Sejarah Lahirnya Pancasila

Tujuan : Menganalisis proses historis lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terjadi dalam waktu singkat. Proses ini melalui perjalanan sejarah yang panjang, dimulai dari nilai-nilai dasar masyarakat Nusantara hingga pembentukan lembaga seperti BPUPKI, Panitia Sembilan, dan PPKI. Untuk memahami dan menjelaskan bagaimana proses tersebut berlangsung, lakukan aktivitas berikut ini secara berkelompok.

- 1) Bentuklah kelompok yang terdiri dari 4–5 orang.
- 2) Susunlah kronologi sejarah lahirnya Pancasila dari masa praaksara hingga pengesahannya pada 18 Agustus 1945. Gunakan poin-poin penting dari periode berikut:
 - a. Masa praaksara hingga kerajaan
 - b. Masa penjajahan dan kebangkitan nasional
 - c. Pembentukan BPUPKI dan sidang pertama
 - d. Panitia Delapan dan Panitia Sembilan
 - e. Proklamasi dan sidang PPKI
- 3) Bacalah kembali penjelasan dalam buku dan cari informasi tambahan dari sumber lain seperti internet, jurnal sejarah, atau video edukasi. Gunakan minimal tiga sumber berbeda yang kredibel untuk memperkuat pemahaman kelompok.
- 4) Buatlah peta proses sejarah lahirnya Pancasila secara kreatif dalam bentuk infografik, peta konsep, atau alur cerita visual. Gunakan kertas karton atau kertas A3.
- 5) Identifikasi dan tuliskan nilai-nilai Pancasila yang sudah berkembang dalam masyarakat sejak zaman dahulu. Jelaskan bagaimana nilai-nilai itu akhirnya dirumuskan secara resmi sebagai dasar negara.
- 6) Kumpulkan hasil kerja kelompok kepada guru untuk dipajang di mading kelas atau ruang pembelajaran.



3. Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara



Kedudukan Pancasila -Shutterstock.com/2148340833

Pancasila memiliki peran sangat penting bagi Indonesia, baik sebagai dasar hukum maupun pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Kaelan (2020), Pancasila tidak hanya menjadi asas utama dalam sistem ketatanegaraan, tetapi juga mencerminkan jati diri dan nilai luhur bangsa yang tumbuh dari sejarah perjuangan kemerdekaan. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan, hukum, serta kehidupan sosial dan budaya, dengan nilai utama seperti keadilan, persatuan, dan kebersamaan.

Dalam konteks ideologi nasional, Pancasila menjadi panduan arah kebijakan dan pembangunan agar menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis. Pancasila pertama kali dikenalkan Sukarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, kemudian disempurnakan oleh Panitia Sembilan dan disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai identitas nasional yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Di tengah arus globalisasi, Pancasila menjadi filter terhadap pengaruh luar dan menjaga karakter nasional. Secara filosofis, Pancasila memiliki struktur hierarkis dan sistematis, di mana kelima sila saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, serta harus diterapkan secara seimbang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila Sebagai Landasan Utama Negara

Kata "dasar" menurut KBBI berarti fondasi utama dalam suatu sistem. Dalam konteks negara, dasar merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pancasila berperan sebagai dasar negara Indonesia, menjadi pedoman utama dalam sistem pemerintahan dan pembentukan hukum. Kesadaran akan pentingnya dasar negara ini dibahas dalam sidang BPUPKI (29 Mei–1 Juni 1945), di mana tokoh-tokoh seperti Yamin, Soepomo, dan Sukarno mengusulkan berbagai konsep. Istilah "Pancasila" pertama kali diperkenalkan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945. Setelah disempurnakan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta, Pancasila secara resmi disahkan pada 18 Agustus 1945 dan dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Sebagai dasar hukum tertinggi, Pancasila mengarahkan kebijakan negara di berbagai bidang dan menjadi acuan dalam sistem hukum yang adil dan demokratis. Pancasila juga mencerminkan cita-cita moral bangsa seperti keadilan sosial dan persatuan nasional. Kedudukannya diperkuat dalam Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 sebagai dasar negara yang tidak dapat diubah. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968

menegaskan bahwa sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan saling terkait. Sesuai Pasal 1 UUD 1945, Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik dan menganut demokrasi konstitusional, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan negara berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Secara umum, Pancasila memiliki beberapa fungsi utama sebagai dasar negara, yaitu:

- 1) Sebagai dasar berdirinya negara: menjadi landasan dalam membangun sistem pemerintahan dan ketatanegaraan.
- 2) Sebagai dasar penyelenggaraan negara: menjadi pedoman dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 3) Sebagai dasar partisipasi warga negara: memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh rakyat dalam mempertahankan dan membangun negara.
- 4) Sebagai dasar pergaulan antarwarga negara: menjadi prinsip dalam menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat.
- 5) Sebagai dasar dan sumber hukum nasional: menjadi rujukan utama dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Peran Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Kehidupan Berbangsa

Pancasila merupakan landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mencerminkan nilai-nilai luhur yang telah menjadi bagian dari budaya Indonesia secara turun-temurun. Sebagai pedoman hidup, Pancasila menjadi dasar dalam bersikap dan bertindak, baik dalam kehidupan sosial, bermasyarakat, maupun pemerintahan. Nilai-nilainya membentuk pandangan hidup bangsa dan menjadi fondasi dalam membangun karakter masyarakat Indonesia.



Implikasi Peran Pancasila – Shutterstock.com/1458565751

Sebagai kristalisasi dari budaya dan nilai religius bangsa, Pancasila memberikan arah dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pancasila menjadi pegangan dalam mengambil keputusan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh perubahan zaman maupun pengaruh luar. Dengan menjadikannya sebagai pedoman, bangsa Indonesia dapat menjaga harmoni, menghormati perbedaan, dan memperkuat persatuan.

Salah satu kekuatan utama Pancasila terletak pada kemampuannya menyatukan keberagaman. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" menjadi simbol bahwa perbedaan justru memperkuat persatuan. Oleh karena itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, tertib, dan sejahtera. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam semua aspek kehidupan..

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Secara etimologis, istilah "ideologi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu *idea* yang berarti gagasan, konsep, atau pemikiran, dan *logos* yang berarti ilmu atau teori. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang gagasan atau konsep dasar yang menjadi landasan dalam berpikir dan bertindak.

a. Definisi Ideologi Menurut Tokoh

- 1) Karl Marx berpendapat bahwa ideologi adalah kesadaran palsu yang diciptakan oleh kelas penguasa untuk mempertahankan dominasinya terhadap kelas pekerja. Bagi Marx, ideologi sering kali digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat.
- 2) Antoine Destutt de Tracy, seorang filsuf Prancis, mendefinisikan ideologi sebagai ilmu tentang gagasan dan pemikiran manusia yang berfungsi untuk memberikan arah dalam kehidupan sosial dan politik.
- 3) Francis Bacon menyatakan bahwa ideologi adalah suatu sistem pemikiran yang menjadi landasan bagi kehidupan politik dan sosial masyarakat.
- 4) Louis Althusser menyebut ideologi sebagai sistem gagasan yang membentuk cara pandang manusia terhadap realitas, yang tanpa disadari telah ditanamkan melalui berbagai institusi sosial seperti pendidikan, agama, dan media.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, dan keyakinan yang menjadi pedoman dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Ideologi membentuk cara berpikir dan bertindak manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

b. Fungsi Ideologi



Pancasila sebagai Ideologi – Dokumen Penerbit

Ideologi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, baik dalam skala individu maupun kolektif. Menurut Hidayat (2016), fungsi ideologi mencakup beberapa aspek utama:

- Sebagai pedoman hidup: Ideologi memberikan arah bagi individu, masyarakat, dan negara dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.

- ▷ Sebagai sumber motivasi: Ideologi memberikan dorongan dan semangat bagi individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- ▷ Sebagai alat untuk menghadapi tantangan: Ideologi membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, politik, dan ekonomi.
- ▷ Sebagai pemersatu bangsa: Ideologi berfungsi untuk menyatukan masyarakat dalam satu visi dan misi yang sama demi mencapai kesejahteraan bersama.

c. Tujuan Pancasila sebagai Ideologi

Sebagai ideologi nasional, Pancasila memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan dan kestabilan bangsa. Menurut Dardji Darmodihardjo, tujuan utama Pancasila sebagai ideologi nasional antara lain:

- ▷ Memperkuat jati diri bangsa: Pancasila bertujuan untuk menjaga karakter bangsa Indonesia agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa.
- ▷ Mengembangkan sistem demokrasi Pancasila: Demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang sesuai dengan Pancasila.
- ▷ Menanamkan nilai-nilai luhur bangsa kepada generasi muda: Pancasila menjadi pedoman dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada setiap warga negara.
- ▷ Memperkokoh ketahanan nasional: Pancasila menjadi dasar dalam menghadapi tantangan global dan menjaga stabilitas nasional.
- ▷ Meningkatkan kesejahteraan sosial: Pancasila mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan tujuan tersebut, Pancasila berperan sebagai ideologi yang membentuk karakter bangsa Indonesia dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara.

d. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki sifat yang mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga menjadi dasar dalam sistem pemerintahan. Berbeda dengan ideologi politik yang cenderung bersifat parsial, ideologi negara mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam konteks politik, kekuatan politik (seperti partai politik) merupakan bagian dari sistem nasional yang harus tunduk pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini bertujuan agar kepentingan individu atau kelompok tidak lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, Pancasila menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas utama dalam kehidupan bernegara.

Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki keunggulan dibandingkan dengan ideologi-ideologi lain yang berkembang di dunia. Beberapa keunggulan tersebut antara lain:

- ▷ Berakar pada budaya bangsa: Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur yang telah ada sejak zaman kerajaan di Nusantara dan berkembang seiring perjalanan sejarah bangsa.
- ▷ Bersifat fleksibel dan dinamis: Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensinya.
- ▷ Menjunjung nilai-nilai kemanusiaan: Pancasila menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, berbeda dengan ideologi yang bersifat individualistik atau otoriter.

- ▷ Mampu menyatukan keberagaman: Sebagai ideologi inklusif, Pancasila mampu menjadi perekat bagi masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman suku, agama, ras, dan budaya.



Jejak Pancasila

Pancasila Menginspirasi Negara Lain

Beberapa negara di dunia, seperti Malaysia dan Brunei, memiliki sistem nilai kebangsaan yang mirip dengan Pancasila, meskipun dengan karakteristik masing-masing.



Contoh Soal

Soal 1

Pancasila memiliki kedudukan sebagai pandangan hidup bangsa yang artinya...

- A. Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari
- B. Pancasila hanya digunakan dalam urusan kenegaraan
- C. Pancasila tidak memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat
- D. Pancasila hanya berlaku untuk masyarakat yang memiliki jabatan politik
- E. Pancasila hanya relevan dalam konteks sejarah

Jawaban: A

Pembahasan: Sebagai pandangan hidup, Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bersosialisasi, bekerja, maupun dalam pengambilan keputusan.

Soal 2

Pancasila sebagai ideologi terbuka berarti...

- A. Dapat berubah sesuai dengan ideologi negara lain
- B. Bisa dihapuskan jika tidak sesuai dengan perkembangan zaman
- C. Bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya
- D. Hanya berlaku dalam konteks tertentu
- E. Tidak dapat diterapkan dalam sistem hukum dan pemerintahan

Jawaban: C

Pembahasan: Sebagai ideologi terbuka, Pancasila bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.



4. Gagasan Solutif dalam Mengatasi Permasalahan Bangsa Negara



Gagasan solutif – Shutterstock.com/2475039237

Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Pancasila adalah dasar negara yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari warga negara. Sebagai ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai ini membentuk karakter bangsa yang beradab, toleran, dan menjunjung persatuan.

Sejak kemerdekaan, Pancasila telah menjadi pegangan dalam membangun tatanan sosial yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Sebagai perekat bangsa, Pancasila mencegah perpecahan dan menjadi kunci menjaga stabilitas dan kesejahteraan nasional. Setiap sila mengandung nilai fundamental yang harus diwujudkan dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan.

Penerapan nilai-nilai Pancasila bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Ini tercermin dalam sikap saling menghormati, gotong royong, menjunjung keadilan, serta menjaga persatuan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan Pancasila perlu ditanamkan sejak dini agar generasi penerus mampu menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa. Berikut adalah uraian tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari:

a. Nilai-Nilai dalam Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

- ▷ Meyakini dan menghormati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk pengakuan bahwa kehidupan manusia dipandu oleh nilai-nilai ketuhanan.
- ▷ Menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, tanpa merendahkan atau menyinggung keyakinan orang lain.
- ▷ Menghargai perbedaan keyakinan dan menciptakan kehidupan yang rukun di tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia.

- ▷ Menghindari segala bentuk diskriminasi dan pemaksaan keyakinan kepada individu atau kelompok lain.



Empati dan Kepedulian Sosial - Shutterstock.Com/1708482280

- ▷ Menjaga kebebasan beribadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan menjamin hak setiap individu untuk menjalankan ibadah dengan tenang dan aman.
- ▷ Menumbuhkan sikap toleransi antarumat beragama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam pergaulan yang lebih luas.
- ▷ Memahami bahwa hubungan manusia dengan Tuhan bersifat personal, sehingga tidak boleh dijadikan alat untuk kepentingan politik atau kepentingan pribadi.

b. Nilai-Nilai dalam Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- ▷ Mengakui dan memperlakukan setiap individu dengan adil tanpa membedakan latar belakang agama, suku, ras, atau status sosial.
- ▷ Menegakkan hak asasi manusia dengan menjamin kebebasan dan perlindungan bagi setiap warga negara.
- ▷ Mengembangkan sikap empati dan kepedulian sosial, seperti membantu korban bencana, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, serta menghargai sesama.
- ▷ Menolak segala bentuk penindasan, kekerasan, dan eksploitasi terhadap sesama manusia.
- ▷ Mengembangkan budaya gotong royong dan tolong-menolong sebagai wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitar.
- ▷ Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, baik dalam bidang hukum, ekonomi, maupun kehidupan sosial.

- ▷ Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti donor darah, bakti sosial, atau aksi solidaritas lainnya.
- ▷ Menghormati hak dan kewajiban setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Nilai-Nilai dalam Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

- ▷ Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- ▷ Menjunjung tinggi rasa cinta tanah air, termasuk dengan menjaga kedaulatan Indonesia dan menghormati simbol-simbol negara.
- ▷ Mengembangkan sikap toleransi dalam kehidupan sosial, baik antaragama, antarsuku, maupun antargolongan.
- ▷ Menyadari pentingnya persatuan dalam menghadapi tantangan nasional dan global.
- ▷ Menghormati perbedaan budaya dan menjadikannya sebagai kekayaan bangsa yang harus dilestarikan.
- ▷ Berperan aktif dalam menjaga stabilitas nasional melalui tindakan nyata seperti menghindari berita hoaks, mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik, dan menolak ajakan yang dapat memecah belah bangsa.
- ▷ Membangun hubungan baik dengan negara lain tanpa mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional.

d. Nilai-Nilai dalam Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- ▷ Menjunjung tinggi prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- ▷ Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, baik dalam lingkungan keluarga, organisasi, maupun pemerintahan.
- ▷ Menerima hasil keputusan musyawarah dengan sikap tanggung jawab dan kebijaksanaan.



Kebebasan berpendapat – Shutterstock.com/ 2461317867

- ▷ Menghargai kebebasan berpendapat, dengan tetap memperhatikan norma dan etika dalam menyampaikan pendapat.
- ▷ Menjaga keadilan dalam pengambilan keputusan, agar tidak menguntungkan satu pihak saja.
- ▷ Menyaring informasi dengan bijak sebelum menyebarkan berita, guna mencegah penyebaran hoaks yang dapat merusak persatuan bangsa.
- ▷ Menghormati pemimpin yang dipilih secara demokratis dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

e. Nilai-Nilai dalam Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- ▷ Mengembangkan semangat keadilan dalam kehidupan sosial, dengan memastikan setiap individu mendapatkan haknya tanpa diskriminasi.
- ▷ Menghindari gaya hidup konsumtif dan boros, serta lebih mengutamakan pola hidup sederhana.
- ▷ Mengembangkan etos kerja keras dan disiplin, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan bermasyarakat.
- ▷ Menghargai hasil karya dan kontribusi orang lain dengan tidak melakukan tindakan plagiarisme atau pelanggaran hak cipta.
- ▷ Berpartisipasi dalam menciptakan kesejahteraan sosial, misalnya dengan membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.
- ▷ Menjaga lingkungan dan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.
- ▷ Mengutamakan kepentingan masyarakat banyak dalam kebijakan pembangunan nasional.
- ▷ Menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merugikan negara dan masyarakat.

Merumuskan Solusi Menghadapi Perilaku yang Bertentangan dengan Nilai-Nilai Pancasila

Perkembangan teknologi dan globalisasi membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk di Indonesia, khususnya dalam komunikasi, informasi, dan digitalisasi. Meskipun memberikan banyak kemudahan, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, seperti konflik sosial dan menurunnya moralitas. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam menyikapi kemajuan teknologi, dengan memanfaatkan peluang secara bijak dan mengurangi dampak negatifnya.

a. Peluang dan Dampak Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi membuka berbagai kemungkinan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Digitalisasi telah mempercepat akses terhadap informasi, memperluas peluang ekonomi, serta mempermudah berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Namun, di sisi lain, dampak negatif juga mulai muncul, terutama ketika teknologi tidak dimanfaatkan secara bijak.

1) Peluang Perkembangan Teknologi

Berikut adalah beberapa peluang utama yang muncul akibat kemajuan teknologi dan digitalisasi:

- ▷ Peningkatan Akses terhadap Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Transformasi digital dalam dunia pendidikan memungkinkan masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan akses terhadap ilmu pengetahuan dengan lebih mudah.

Kehadiran platform pembelajaran daring (online learning), webinar, serta digital library telah memperluas kesempatan bagi siapa pun untuk terus belajar, bahkan dari tempat yang terpencil sekalipun.

▷ Perkembangan Ekonomi Digital dan Industri Kreatif

Dunia digital membuka berbagai peluang ekonomi, mulai dari e-commerce, digital marketing, hingga berbagai bentuk industri kreatif seperti content creation, game development, dan graphic design. Hal ini memungkinkan generasi muda untuk memiliki lebih banyak opsi dalam mengembangkan karier mereka.

▷ Efisiensi dalam Dunia Kerja dan Bisnis

Dengan hadirnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), otomatisasi proses kerja semakin berkembang. Otomatisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tetapi juga mengurangi kesalahan manusia dalam proses produksi, analisis data, serta pengambilan keputusan.

▷ Memperkuat Kolaborasi dan Integrasi Sosial

Teknologi digital memungkinkan individu dari berbagai belahan dunia untuk bekerja sama tanpa hambatan jarak dan waktu. Kolaborasi lintas negara semakin terbuka, khususnya dalam bidang sains, teknologi, dan inovasi yang dapat memberikan manfaat besar bagi kemajuan bangsa.

2) Dampak Perkembangan Teknologi

Meskipun kemajuan teknologi membawa banyak keuntungan, ada pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, dampak ini dapat menimbulkan masalah sosial yang mengancam nilai-nilai kebangsaan. Beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai adalah:

▷ Meningkatnya Polarisasi Sosial dan Konflik di Dunia Maya

Algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna, yang menyebabkan orang hanya terpapar informasi yang memperkuat pandangan mereka sendiri (echo chamber effect). Akibatnya, muncul kesenjangan dalam masyarakat yang dapat memicu perpecahan sosial.

▷ Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Maraknya berita bohong (hoaks) yang beredar di media sosial dapat mempengaruhi opini publik dan memperburuk polarisasi sosial. Berita palsu sering kali digunakan untuk kepentingan tertentu, baik politik, agama, maupun ekonomi, yang berpotensi mengancam persatuan bangsa.

▷ Melemahnya Nilai Gotong Royong dan Solidaritas Sosial

Kemudahan teknologi sering kali membuat individu lebih fokus pada kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan sosial. Masyarakat cenderung lebih individualistik dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar, sehingga nilai gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia semakin tergerus.

▷ Eksploitasi Data Pribadi dan Ancaman Keamanan Siber

Dengan semakin banyaknya transaksi digital, ancaman kejahatan siber semakin meningkat. Pencurian identitas, peretasan akun, dan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman yang nyata bagi masyarakat modern.

b. Tantangan dan Gagasan Solutif terhadap Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Modern

1) Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Namun, dalam praktiknya, nilai luhur ini sering menghadapi tantangan serius, seperti fanatisme agama yang berujung pada intoleransi dan kekerasan, ujaran kebencian terhadap agama lain, serta penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik yang memecah belah persatuan bangsa. Bentuk lain dari penyimpangan ini antara lain adalah radikalisme berbasis agama, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penyebaran hoaks bernuansa agama, pelecehan terhadap simbol keagamaan, serta kurangnya ruang dialog yang menyebabkan kesalahpahaman antarumat beragama. Bahkan, pemaksaan keyakinan dan maraknya kebencian terhadap kepercayaan tertentu turut mengaburkan esensi dari sila pertama.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan upaya komprehensif yang menekankan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan secara damai. Pendidikan agama yang moderat dan inklusif perlu ditanamkan sejak dini, didukung dengan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai keberagaman. Selain itu, dialog lintas agama harus dibangun secara berkala guna menciptakan pemahaman bersama. Penegakan hukum terhadap ujaran kebencian dan penyebaran radikalisme juga menjadi langkah penting untuk menjamin kebebasan beragama secara adil dan setara. Media sosial sebaiknya dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan damai, sementara tokoh agama perlu memainkan peran aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya moderasi beragama. Dengan demikian, cita-cita Pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud secara nyata.



Toleransi – Shutterstock.com/2450222435

2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut setiap warga negara untuk menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan menghargai martabat manusia tanpa memandang perbedaan. Namun dalam kenyataannya, pelanggaran terhadap nilai ini masih marak terjadi, seperti diskriminasi atas dasar ras, suku, agama, gender, dan status sosial, serta pelecehan terhadap perempuan dan anak. Bentuk pelanggaran lainnya meliputi cyberbullying, eksploitasi pekerja dan anak, perbudakan modern, ketidakadilan dalam pelayanan publik, hingga maraknya ujaran kebencian yang merendahkan harkat seseorang. Ketidakepekaan sosial dan

kurangnya perlindungan terhadap kelompok minoritas semakin menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan belum sepenuhnya dijadikan landasan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai solusi strategis perlu diterapkan secara konsisten. Pendidikan karakter yang menanamkan nilai empati, keadilan, dan kesetaraan harus diperkuat sejak dini, disertai penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran HAM, diskriminasi, dan kekerasan. Kampanye kesadaran tentang pentingnya hak asasi manusia juga perlu diperluas agar masyarakat lebih peka terhadap penderitaan sesama. Di sisi lain, media memiliki peran penting dalam menyebarkan pesan kemanusiaan dan mendorong budaya saling menghormati. Pemerintah dan masyarakat juga harus bekerja sama dalam meningkatkan akses terhadap layanan dasar, memperkuat perlindungan kelompok rentan, serta mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, sila kedua tidak hanya menjadi wacana, tetapi terwujud dalam tindakan nyata yang memperkuat keadaban bangsa.

3) Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dalam bingkai keberagaman suku, agama, budaya, dan daerah. Namun, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, banyak tantangan yang justru mengancam persatuan tersebut. Fenomena seperti penyebaran hoaks provokatif, meningkatnya sentimen kedaerahan, intoleransi antar kelompok, serta gerakan separatis menjadi bukti nyata lemahnya kesadaran akan semangat persatuan. Selain itu, minimnya apresiasi terhadap budaya lokal, rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan, serta penggunaan media sosial untuk menyebarkan ujaran kebencian turut memperparah potensi konflik horizontal di tengah masyarakat. Kondisi ini diperburuk oleh berkurangnya pemahaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun harmoni di tengah perbedaan.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah solutif yang konkret dan berkesinambungan. Pendidikan wawasan kebangsaan perlu diperkuat sejak dini guna menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Program pelestarian budaya lokal juga harus digalakkan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat luas, agar generasi muda lebih menghargai identitas bangsa. Selain itu, pemerintah perlu memperketat regulasi terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, serta mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan mempererat rasa kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai persatuan, Indonesia dapat tetap kokoh dan bersatu dalam keberagamannya.

4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat Pancasila menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan harus berlandaskan musyawarah, demokrasi, dan keterlibatan rakyat. Sayangnya, praktik di lapangan kerap menyimpang: nepotisme dan klientelisme masih subur, kebijakan lahir tanpa mengindahkan aspirasi publik, dan manipulasi informasi menggiring opini demi kepentingan sempit. Hak warga untuk bersuara kerap direpresi, transparansi rapuh, serta pendidikan politik yang minim membuat partisipasi rakyat rendah. Ketidakjujuran pemilu melalui politik uang, pengabaian musyawarah mufakat, dan lemahnya akuntabilitas pejabat memperlebar jurang antara ideal demokrasi dan realitas pemerintahan.

Mengatasi tantangan tersebut menuntut strategi menyeluruh. Pendidikan politik harus diperluas agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya, sementara kebebasan pers dijamin untuk mengawasi kekuasaan dan membendung hoaks. Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dipadukan dengan transparansi dalam setiap proses kebijakan. Pemilu wajib dijaga kejujurannya melalui pengawasan ketat dan pemberantasan politik uang, sedangkan peran masyarakat sipil diperkokoh sebagai penyeimbang kekuasaan. Budaya musyawarah hendaknya dihidupkan kembali dari keluarga hingga lembaga negara, diiringi sanksi tegas bagi penyalahguna wewenang. Forum dialog rutin antara pemerintah dan rakyat, serta inklusivitas perempuan dan kelompok minoritas dalam politik, akan memastikan keputusan publik benar-benar merefleksikan kehendak seluruh bangsa.



Upacara Kemerdekaan Indonesia - Shutterstock.com/2026437101

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut adanya pemerataan kesejahteraan, akses yang setara terhadap sumber daya, serta perlakuan adil dalam bidang hukum dan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, ketimpangan ekonomi semakin nyata, di mana segelintir orang menikmati kekayaan berlimpah sementara sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Hal ini diperparah oleh minimnya akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, praktik eksploitasi tenaga kerja, serta ketidakadilan dalam distribusi sumber daya alam. Penyalahgunaan kekuasaan melalui korupsi juga semakin memperburuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan. Selain itu, kurangnya dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi lokal, sementara diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat masih sering terjadi. Pengabaian terhadap lingkungan hidup pun menjadi ancaman tersendiri bagi keadilan antargenerasi.

Untuk menegakkan kembali nilai-nilai sila kelima, diperlukan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berpihak pada pemerataan, seperti sistem pajak progresif serta jaminan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Layanan pendidikan dan kesehatan harus diperkuat, terutama bagi masyarakat miskin dan daerah tertinggal, agar kesetaraan kesempatan dapat terwujud. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara tegas dan transparan,

khususnya dalam pengelolaan anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, dukungan terhadap UMKM dan industri kreatif perlu ditingkatkan guna memperluas lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat dari bawah. Pemerintah juga harus memperluas akses keuangan melalui program kredit terjangkau dan literasi keuangan. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja wajib ditingkatkan dengan menjamin upah minimum dan kondisi kerja yang manusiawi. Di sisi lain, pembangunan yang berkelanjutan harus menjadi prioritas agar sumber daya alam tetap lestari dan dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dengan upaya bersama yang konsisten dan menyeluruh, keadilan sosial dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Pusat Kesehatan – Shutterstock.com/1720832887

Contoh Soal

Soal 1

Pancasila dapat digunakan sebagai solusi dalam menghadapi permasalahan sosial karena...

- A. Mengajarkan sikap saling menghormati dan gotong royong
- B. Mengutamakan kepentingan satu kelompok saja
- C. Mengabaikan keberagaman budaya dan agama
- D. Menekankan persaingan bebas dalam segala aspek kehidupan
- E. Menjadikan hukum sebagai satu-satunya cara menyelesaikan konflik

Jawaban: A

Pembahasan: Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti gotong royong dan toleransi, dapat membantu menyelesaikan permasalahan sosial dengan cara yang lebih harmonis.



Jejak Pancasila

Indonesia adalah satu-satunya negara yang secara resmi menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang dirumuskan langsung oleh para pendiri bangsa, bukan mengadopsi ideologi luar. Banyak negara lain justru mengambil ideologi asing, seperti Amerika Serikat dengan pemikiran John Locke, Prancis dengan Rousseau, Uni Soviet dan Cina dengan Marxisme, serta India dari sistem hukum asing. Pancasila berbeda karena lahir dari nilai-nilai asli bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan ketuhanan.



Rangkuman

Pancasila memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam sistem pemerintahan, peraturan hukum, serta norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila membentuk karakter dan jati diri masyarakat Indonesia dengan menanamkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta keadilan sosial. Selain itu, sebagai ideologi nasional, Pancasila menjadi perekat keberagaman bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pancasila bersifat fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dan nilai-nilainya.

Namun, kemajuan teknologi dan globalisasi membawa berbagai tantangan yang dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, menurunnya rasa nasionalisme, serta kemerosotan moral. Ketimpangan sosial dan praktik korupsi juga menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila, seperti meningkatkan pendidikan karakter, mempromosikan toleransi dan persatuan, menegakkan supremasi hukum, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan edukasi positif tentang nilai-nilai kebangsaan.

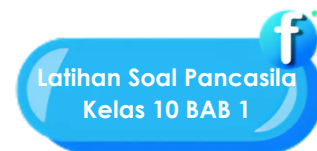
Kesimpulannya, Pancasila bukan hanya sekadar dokumen negara, tetapi harus menjadi pedoman hidup yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat tetap menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, dan harmonis di tengah berbagai tantangan zaman. Pancasila adalah identitas bangsa yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang agar tetap relevan dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?
 - A. Hanya menjadi pedoman dalam kehidupan sosial
 - B. Sebagai dasar negara yang tidak terpisahkan dari hukum
 - C. Sebagai kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan memberikan manfaat bagi seluruh rakyat
 - D. Hanya berlaku untuk kehidupan politik dan pemerintahan
 - E. Hanya mencerminkan nilai-nilai budaya dan adat masyarakat Indonesia
2. Apa tujuan utama Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia?
 - A. Menyediakan pedoman untuk memilih pemimpin negara
 - B. Menjadi alat untuk melawan penjajahan
 - C. Menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan keamanan
 - D. Meningkatkan persaingan antar kelompok
 - E. Menjadi dasar dalam pembuatan sistem peradilan internasional
3. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" yang terkandung dalam Pancasila menegaskan bahwa...
 - A. Perbedaan agama harus dihilangkan
 - B. Semua warga negara harus memiliki identitas yang sama
 - C. Keberagaman tidak menghalangi persatuan bangsa
 - D. Hanya satu agama yang dapat dianut oleh warga negara
 - E. Setiap suku bangsa harus berbahasa Indonesia
4. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
 - A. Pedoman utama dalam menyelesaikan masalah politik
 - B. Dasar yang digunakan untuk menentukan arah kebijakan negara
 - C. Hanya berlaku untuk masyarakat di Jakarta
 - D. Prinsip untuk mengatur hubungan internasional
 - E. Hanya digunakan dalam sistem peradilan negara
5. Apa tujuan dari Pancasila dalam menyatukan keberagaman bangsa Indonesia?
 - A. Menciptakan sistem pemerintahan yang lebih tegas
 - B. Menghapuskan perbedaan budaya dan agama di Indonesia
 - C. Menjadikan semua warga negara mematuhi aturan yang sama
 - D. Menyediakan nilai-nilai yang mengikat seluruh rakyat untuk hidup bersatu dalam keberagaman
 - E. Membatasi pengaruh budaya luar di Indonesia
6. Pancasila mengandung nilai-nilai yang telah dihayati oleh rakyat Indonesia melalui...
 - A. Pemikiran politik luar negeri
 - B. Pemikiran mendalam yang mencakup kehidupan sehari-hari

- C. Pembahasan dalam sidang internasional
 - D. Sistem pemerintahan yang ketat
 - E. Analisis teori-teori ekonomi
7. Bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat berdampak pada masyarakat Indonesia?
- A. Meningkatkan ketegangan antar kelompok
 - B. Membentuk masyarakat yang lebih tertib, adil, dan sejahtera
 - C. Mengurangi persaingan sosial
 - D. Membatasi perkembangan budaya lokal
 - E. Menurunkan tingkat kesadaran hukum di masyarakat

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Al Hakim, D. dkk. (2016). *Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Tantangan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Nasional.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2021). *Laporan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat*.
- Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2016). *Konsekuensi Pancasila sebagai Dasar Negara bagi NKRI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Herdiawanto, dkk. (2019). *Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmiah.
- Kaelan. (2020). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kemendikbud.
- Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang *Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Pancasila sebagai Dasar Negara*.
- Kusuma, A. B. (2004). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.
- Kusumohamidjojo, B. (2015). *Filsafat Ideologi dan Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara*. Bandung: Pustaka Cendekia.
- Notonegoro. (1971). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



BAB 2

MENUMBUHKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Bernalar Kritis**
Menganalisis pelanggaran hukum dalam kehidupan nyata.
- ▷ **Kreatif**
Mengembangkan solusi hukum berdasarkan nilai Pancasila.
- ▷ **Berkebinekaan Global**
Menjunjung hukum dalam masyarakat yang majemuk.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kepatuhan Hukum, Norma Sosial, Pelanggaran Hukum, Hak dan Kewajiban, Hierarki Peraturan, UUD NRI 1945, Produk Hukum, Nilai Pancasila, Peraturan Perundang-Undangan.

Tujuan Pembelajaran: Menumbuhkan Pemahaman Hukum yang Mendalam

1. Memahami Perilaku Patuh terhadap Hukum di Masyarakat:

- ▷ Memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.
- ▷ Mengidentifikasi manfaat kepatuhan terhadap hukum bagi ketertiban dan keamanan masyarakat.

2. Mengkaji Perilaku yang Menunjukkan Kepatuhan dan Pelanggaran Hukum

- ▷ Mengkaji contoh-contoh perilaku yang sesuai dan bertentangan dengan norma hukum dalam masyarakat.
- ▷ Menilai akibat sosial dari perilaku yang melanggar hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Menjelaskan Dampak Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban

- ▷ Menjelaskan pengaruh pelanggaran hak dan kewajiban terhadap individu dan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- ▷ Menganalisis hubungan timbal balik antara pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

4. Menerapkan Konsep Hierarki Peraturan Perundang-undangan

- ▷ Menerapkan pemahaman mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada di Indonesia.
- ▷ Mengklasifikasikan jenis-jenis peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatan dan kedudukannya.

5. Menerapkan Nilai Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan

- ▷ Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam analisis dan pengembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- ▷ Menilai kesesuaian suatu peraturan dengan sila-sila dalam Pancasila sebagai dasar negara.



F I T R I



1. Membangun Kesadaran Hukum di Tengah Masyarakat



Konsep Hukum – Shutterstock.com/1938015160

Hukum merupakan fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai alat pengatur kehidupan sosial, hukum tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi hak-hak individu serta menjamin keseimbangan antara kebebasan dan kewajiban setiap warga negara. Dalam suatu negara hukum, setiap individu diharapkan untuk memahami dan menaati peraturan yang berlaku. Sayangnya, dalam realitas kehidupan sehari-hari, masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, maupun kesengajaan.

Kurangnya kesadaran hukum di masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Banyak individu yang menganggap hukum sebagai sesuatu yang hanya berlaku bagi mereka yang melanggar, tanpa memahami bahwa hukum hadir untuk melindungi setiap warga negara dari berbagai ancaman sosial. Misalnya, dalam konteks lalu lintas, banyak pengendara yang melanggar rambu lalu lintas karena kurangnya pemahaman akan pentingnya aturan tersebut dalam menjaga keselamatan bersama.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi suatu keharusan. Kesadaran hukum bukan hanya berarti mengetahui adanya aturan, tetapi juga memahami esensi hukum, menghargainya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran hukum yang tinggi akan mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih tertib, adil, dan harmonis.

Tujuan Hukum

Hukum dapat didefinisikan sebagai serangkaian aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar berjalan sesuai dengan norma yang telah disepakati. Keberadaan hukum bertujuan untuk menciptakan kehidupan sosial yang lebih tertib, adil, dan sejahtera. Selain itu, hukum juga berfungsi untuk melindungi hak-hak individu serta menjamin keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab warga negara.

a. Tujuan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Secara umum, hukum memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya:

- 1) Menjaga ketertiban dan keamanan sosial

Hukum bertindak sebagai alat kontrol sosial yang memastikan bahwa individu bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga menciptakan kondisi yang aman dan stabil dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Mewujudkan keadilan bagi setiap individu

Hukum menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, maupun politik.

3) Melindungi hak dan kewajiban warga negara

Hukum memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar individu, seperti hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta hak atas kesejahteraan sosial.

4) Mencegah penyalahgunaan kekuasaan

Hukum membatasi wewenang penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, dengan menetapkan aturan yang mengikat dan mengawasi jalannya pemerintahan.

5) Menyediakan mekanisme penyelesaian konflik

Hukum memberikan prosedur yang jelas dalam menangani sengketa, baik dalam ranah perdata maupun pidana, sehingga konflik dapat diselesaikan secara adil tanpa menggunakan kekerasan.

6) Mendorong pembangunan dan kesejahteraan sosial

Hukum mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan menciptakan regulasi yang adil di sektor perdagangan, ketenagakerjaan, serta perlindungan sosial.

b. Konsep Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan pemahaman, sikap, dan perilaku seseorang dalam menaati aturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi, aturan-aturan yang telah ditetapkan akan dijalankan tanpa adanya paksaan dari pihak berwenang. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat tingkatan dalam kesadaran hukum, yaitu:

1) Pengetahuan tentang aturan hukum

Masyarakat mengetahui bahwa ada hukum yang mengatur kehidupan mereka, meskipun mungkin belum memahami secara mendalam isi dari aturan tersebut.

2) Pemahaman terhadap hukum

Setelah mengetahui keberadaan hukum, individu perlu memahami maksud dan tujuan dari aturan yang telah ditetapkan, termasuk konsekuensi hukum bagi pelanggarnya.

3) Sikap menghargai hukum

Individu yang memiliki kesadaran hukum tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menghormati dan menganggapnya sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Perilaku taat hukum

Tingkat kesadaran hukum yang tertinggi adalah ketika seseorang menerapkan aturan hukum dalam kehidupannya, dengan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat akan berdampak pada stabilitas sosial, keadilan, serta kesejahteraan umum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum, baik melalui pendidikan formal, sosialisasi, maupun penegakan hukum yang konsisten.

Fungsi Hukum dalam Masyarakat

Hukum tidak hanya berperan sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga memiliki berbagai fungsi yang membantu menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Fungsi hukum ini sangat penting dalam mengatur hubungan antarindividu, individu dengan negara, serta antarnegara. Dengan memahami fungsi hukum secara lebih mendalam, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya keberadaan hukum dalam kehidupan mereka. Berikut adalah beberapa fungsi utama hukum dalam masyarakat:

a. Sebagai Alat Pengendali Sosial (*Social Control*)

Salah satu fungsi utama hukum adalah sebagai alat pengendali sosial yang bertujuan untuk menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Hukum memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang dapat diterima dan perilaku yang dilarang dalam kehidupan sosial. Hukum bekerja sebagai pengendali sosial melalui berbagai mekanisme, di antaranya:

1) Norma dan sanksi hukum

Peraturan perundang-undangan menetapkan larangan serta hukuman bagi individu yang melakukan pelanggaran. Misalnya, hukum pidana mengatur bahwa pencurian merupakan tindakan yang dilarang, dan bagi pelanggarnya akan dikenakan sanksi pidana seperti denda atau penjara.

2) Sosialisasi hukum melalui pendidikan dan penyuluhan

Pemerintah dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam memperkenalkan hukum kepada masyarakat melalui kurikulum sekolah, seminar, atau kampanye publik.

3) Penegakan hukum yang tegas dan konsisten

Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim bertugas untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi.

b. Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa (*Dispute Resolution*)

Dalam kehidupan sosial, konflik dan perselisihan adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, hukum hadir untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa secara adil dan damai. Berbagai bentuk penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum antara lain:

1) Penyelesaian melalui jalur litigasi (pengadilan)

Sengketa yang terjadi dalam masyarakat dapat dibawa ke lembaga peradilan seperti pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tata usaha negara. Hakim akan memberikan putusan yang mengikat bagi para pihak yang bersengketa.

2) Penyelesaian melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan)

Penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui pengadilan. Alternatif lain seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan rumit.

3) Penyelesaian sengketa secara adat atau musyawarah

Dalam beberapa komunitas, penyelesaian sengketa masih dilakukan berdasarkan hukum adat atau musyawarah mufakat yang dijalankan oleh tokoh masyarakat.



Gedung Pengadilan Negeri – Shutterstock/2386566967

c. Sebagai Sarana Perlindungan Hak dan Kewajiban

Hukum tidak hanya bertugas untuk mengatur perilaku individu, tetapi juga berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara. Hak dan kewajiban ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak asasi manusia, hak ekonomi, serta hak politik. Contoh perlindungan hak oleh hukum:

1) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

Setiap individu memiliki hak untuk membela diri di hadapan hukum dan mendapatkan keadilan jika haknya dilanggar.

2) Hak untuk mendapatkan pendidikan

Negara melalui undang-undang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

3) Hak atas kebebasan berpendapat

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap individu untuk mengemukakan pendapat selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

d. Sebagai Alat Rekayasa Sosial (Social Engineering)

Hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik dalam masyarakat. Pemerintah sering kali membuat kebijakan hukum yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat dan menciptakan tatanan sosial yang lebih modern dan maju. Contoh hukum sebagai alat rekayasa sosial:

1) Regulasi tentang kesetaraan gender

Undang-undang yang mengatur kesetaraan gender bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan pekerjaan.

2) Peraturan tentang lingkungan hidup

Pemerintah membuat regulasi mengenai pelestarian lingkungan, seperti larangan penggunaan plastik sekali pakai, sanksi bagi perusahaan yang mencemari lingkungan, dan kebijakan penghijauan kota.

3) Perubahan hukum dalam dunia digital

Dengan berkembangnya teknologi, hukum juga mengalami perubahan untuk mengakomodasi perkembangan dunia digital, seperti regulasi mengenai transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi.

e. Sebagai Penjamin Keadilan dan Kesejahteraan Sosial



Proses Perlindungan – Shutterstock.com/2468316601

Hukum memiliki peran utama dalam menjamin keadilan bagi seluruh elemen masyarakat. Tanpa adanya sistem hukum yang adil, akan terjadi ketimpangan sosial yang dapat memicu ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan. Prinsip keadilan dalam hukum mencakup:

1) Keadilan distributive

Keadilan yang menjamin distribusi hak dan kewajiban secara seimbang di antara anggota masyarakat.

2) Keadilan retributive

Keadilan yang berkaitan dengan pemberian sanksi atau hukuman yang setimpal bagi pelanggar hukum.

3) Keadilan procedural

Keadilan yang memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap hukum dan proses peradilan yang adil.

f. Sebagai Pedoman dalam Pembangunan Negara

Negara yang memiliki sistem hukum yang baik dan kuat akan lebih mudah dalam menjalankan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Hukum memberikan kepastian dan stabilitas bagi berbagai sektor pembangunan, termasuk ekonomi, infrastruktur, serta politik.

Dalam bidang ekonomi, hukum berfungsi untuk:

- 1) Melindungi hak investor dan pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan bisnis secara adil dan kompetitif.
- 2) Mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan melalui undang-undang ketenagakerjaan.
- 3) Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dalam bidang politik, hukum berperan dalam:

- 1) Mengatur sistem pemilu yang adil dan demokratis.
- 2) Menjamin kebebasan pers dan hak asasi manusia.
- 3) Membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Menelusuri Sumber Hukum

Sumber hukum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang menghasilkan aturan hukum dengan sifat memaksa, yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sumber hukum berfungsi sebagai landasan atau dasar bagi sistem hukum suatu negara untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan menegakkan peraturan hukum. Dalam konteks Indonesia, sumber hukum juga merujuk pada segala hal yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pengesahan peraturan perundang-undangan.

Sumber hukum umumnya dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk tatanan hukum yang berlaku di negara.

a. Sumber Materi Hukum



Gedung Mahkamah Konstitusi – Shutterstock.com/2357719119

Sumber hukum materiil merujuk pada hal-hal yang menjadi dasar dari substansi hukum itu sendiri, yaitu norma-norma, nilai-nilai sosial, dan aspek moral yang berkembang dalam masyarakat. Substansi ini mencakup berbagai peraturan yang mengatur hak dan kewajiban individu serta hubungan antarindividu atau antara individu dengan negara. Sumber hukum materiil ini meliputi:

1) Konstitusi Negara

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai konstitusi yang mengatur segala hal terkait struktur negara, hubungan antar lembaga negara, dan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi berfungsi memberikan batasan-batasan bagi pemerintah agar tidak melampaui kewenangannya, serta mengatur hak-hak yang dimiliki setiap warga negara.

2) Undang-Undang

Undang-undang adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat di seluruh wilayah negara. Undang-undang dibuat oleh badan legislatif atau parlemen dan biasanya merinci aturan lebih lanjut mengenai hal-hal yang diatur dalam konstitusi. Contohnya, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur prosedur pembuatan undang-undang yang berlaku. Undang-undang berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip dasar yang ada dalam konstitusi dan memperkuat sistem hukum nasional.

3) Peraturan Pemerintah

Peraturan pemerintah adalah instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang dan berfungsi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang belum dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Misalnya, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar untuk melaksanakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

4) Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang mengatur masalah-masalah lokal sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Peraturan daerah digunakan untuk mengatur hal-hal yang lebih spesifik dan tidak tercakup dalam peraturan yang berlaku secara nasional. Sebagai contoh, Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam penanganan COVID-19, yang mengatur langkah-langkah spesifik untuk mencegah penyebaran virus di Jakarta.

5) Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan atau yurisprudensi adalah hasil dari proses peradilan yang menciptakan preseden atau pedoman dalam menyelesaikan kasus serupa di masa depan. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan pasal-pasal dalam konstitusi untuk memberikan keputusan dalam sengketa hukum atau kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara. Keputusan pengadilan ini bisa menjadi acuan dalam penerapan hukum dalam kasus lain yang memiliki persoalan serupa.

b. Sumber Formal Hukum

Sumber hukum formal adalah bentuk-bentuk atau wadah yang digunakan untuk menyusun, mengesahkan, dan menegakkan hukum. Sumber hukum formal berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum yang jelas dan tegas terhadap aturan yang ada. Adapun sumber hukum formal yang dimaksud meliputi:

1) Undang-Undang (*Statute*)

Undang-undang adalah sumber hukum formal yang dihasilkan oleh lembaga legislatif yang berfungsi mengatur berbagai aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sumber hukum formal yang paling fundamental adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya yang disusun sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

2) Yurisprudensi (Case Law)

Yurisprudensi merujuk pada keputusan-keputusan pengadilan yang sebelumnya yang memiliki pengaruh pada penyelesaian perkara-perkara hukum di masa depan. Keputusan pengadilan ini memberi interpretasi terhadap peraturan yang ada dan digunakan sebagai pedoman dalam kasus serupa. Sebagai contoh, putusan Mahkamah Agung yang mengatur penafsiran terhadap ketentuan hukum yang belum jelas diatur oleh undang-undang.

3) Kebiasaan dan Adat (Customary Law)

Kebiasaan atau adat istiadat yang telah diterima dan diterapkan secara luas oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari juga dapat menjadi sumber hukum. Kebiasaan ini berfungsi untuk mengatur perilaku dan interaksi sosial antarindividu yang tidak tertulis tetapi memiliki kekuatan hukum di mata masyarakat. Misalnya, dalam beberapa kasus, hukum adat di Indonesia masih berlaku di daerah-daerah tertentu untuk mengatur aspek-aspek kehidupan sosial, seperti warisan dan pernikahan.

4) Traktat atau Perjanjian Internasional (Treaty)



Perjanjian – Shutterstock.com/ 2160317029

Traktat atau perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian internasional ini memiliki kekuatan hukum yang berlaku bagi negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Contoh perjanjian internasional adalah Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Indonesia dan menjadi bagian dari hukum nasional.

5) Pendapat Ahli Hukum (Doctrine)

Pendapat atau doktrin dari para ahli hukum juga menjadi sumber hukum formal yang memberikan panduan atau penjelasan lebih dalam mengenai peraturan atau sistem hukum yang ada. Pandangan para ahli ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan hukum, terutama pada kasus-kasus yang memiliki karakteristik khusus atau baru.

Klasifikasi Hukum

Klasifikasi hukum penting untuk menciptakan sistem hukum yang terstruktur dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat. Pembagian ini mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan sektor tertentu agar hukum dapat diterapkan secara efektif. Pembuatan hukum harus memperhatikan kondisi lokal dan aspirasi masyarakat di tiap daerah.

Hukum harus mampu merespons masalah-masalah aktual seperti hak asasi manusia, ketenagakerjaan, dan perlindungan lingkungan. Fleksibilitas hukum sangat dibutuhkan agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi, ekonomi, dan sosial. Contohnya adalah lahirnya aturan baru mengenai transaksi digital dan perlindungan data pribadi. Pembagian hukum ini dapat dilihat dari berbagai perspektif dan ditinjau berdasarkan beberapa hal berikut:

a. Berdasarkan Sumbernya

Hukum dapat dibagi berdasarkan sumbernya menjadi dua kategori utama, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

1) Hukum Tertulis

Hukum tertulis merujuk pada peraturan yang tertuang dalam dokumen hukum resmi dan memiliki kekuatan mengikat. Hukum tertulis memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi setiap individu, sehingga hukum tersebut mudah diakses dan diterapkan. Contoh hukum tertulis yang ada di Indonesia adalah:

- ▷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- ▷ Keputusan Presiden
- ▷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- ▷ Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah

Hukum tertulis ini memberikan dasar yang jelas mengenai hak dan kewajiban individu serta lembaga negara. Keuntungan dari hukum tertulis adalah adanya kepastian hukum yang mengikat bagi setiap pihak.

2) Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, atau norma sosial yang berlaku. Meskipun tidak tertulis, hukum ini tetap memiliki kekuatan mengikat karena diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai aturan yang sah. Contoh dari hukum tidak tertulis antara lain:

- ▷ Hukum adat
- ▷ Norma moral yang diterima secara luas di masyarakat
- ▷ Kesepakatan sosial yang muncul berdasarkan konsensus bersama
- ▷ Hukum ini berperan dalam menjaga kestabilan sosial dalam masyarakat tertentu, dan sering kali digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang tidak tercakup dalam hukum tertulis.

b. Berdasarkan Sifatnya

Hukum juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya. Secara umum, hukum dapat bersifat memaksa atau mengatur, bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi.

1) Hukum yang Memaksa

Hukum yang memaksa adalah hukum yang harus diikuti oleh setiap individu tanpa pengecualian. Dalam hal ini, hukum ini bertujuan untuk menghindari kerugian bagi masyarakat dan negara. Jika hukum ini dilanggar, sanksi yang jelas akan dikenakan. Contoh:

- ▷ Hukum pidana yang memaksa individu untuk tidak melakukan kejahatan apapun.
- ▷ Peraturan lalu lintas yang mengharuskan pengemudi untuk mematuhi rambu dan tanda lalu lintas demi keselamatan bersama.

2) Hukum yang Mengatur

Hukum yang mengatur memungkinkan individu untuk memilih apakah akan mengikuti peraturan tersebut atau tidak, selama tindakan yang dilakukan tidak merugikan pihak lain. Biasanya, hukum ini terkait dengan hubungan privat atau kesepakatan yang dibuat antara dua pihak. Contoh:

- ▷ Hukum perdata yang mengatur perjanjian antara individu, seperti kontrak jual beli.
- ▷ Hukum warisan yang mengatur pembagian harta kekayaan menurut ketentuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat.

c. Berdasarkan Masalah yang Diatur atau Isinya

Hukum juga dapat dibedakan berdasarkan apa yang diatur atau apa yang menjadi isi dari hukum tersebut. Secara garis besar, hukum dibedakan menjadi dua kategori:

1) Hukum Privat

Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum ini lebih menekankan pada hak dan kewajiban pribadi, seperti hak milik, perjanjian, atau kontrak antara individu. Beberapa contoh hukum privat adalah:

- ▷ Hukum perdata
- ▷ Hukum bisnis atau komersial

2) Hukum Publik

Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara, atau antara negara dan negara. Hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum atau negara, seperti hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administrasi negara. Contohnya adalah:

- ▷ Hukum pidana yang mengatur pelanggaran terhadap norma hukum dan menjatuhkan sanksi.
- ▷ Hukum tata negara yang mengatur struktur pemerintahan dan hak-hak warga negara.



Pelanggaran Hukum – Shutterstock.com/2480600151

e. Berdasarkan Waktu Berlaku

Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis:

1) Hukum Positif (*Ius Constitutum*)

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada saat ini dan diatur oleh negara. Hukum ini mencakup seluruh peraturan yang ada dan berlaku di wilayah negara tersebut pada waktu tertentu.

2) Hukum yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)

Hukum yang akan datang adalah hukum yang sedang dalam proses penyusunan dan diharapkan berlaku di masa depan. Hukum ini merujuk pada peraturan yang belum diterapkan, namun sudah dirancang untuk mengatur masa depan.

f. Berdasarkan Tempat Berlaku

Hukum dapat dibedakan juga berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum yang berlaku di wilayah negara tertentu, hukum yang berlaku di negara lain, dan hukum yang berlaku di tingkat internasional.

1) Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang berlaku di negara tertentu, mengatur segala hal yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut.

2) Hukum Negara Lain

Hukum negara lain adalah hukum yang berlaku di negara lain yang dapat mempengaruhi hubungan antara negara tersebut dengan negara lainnya.

3) Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antarnegara atau hubungan internasional, seperti perjanjian internasional dan hak asasi manusia global.

Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Kesadaran hukum penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan adil. Bukan hanya soal tahu hukum, tapi juga soal sikap untuk menaati dan menjadikannya bagian dari kehidupan. Kesadaran ini harus dibangun bersama, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mencerminkan pemahaman seseorang terhadap hukum yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam kehidupan sosial. Masyarakat dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi akan cenderung lebih tertib, menghargai hak orang lain, dan turut serta dalam penegakan hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum dapat menyebabkan berbagai permasalahan sosial, seperti meningkatnya pelanggaran, lemahnya perlindungan terhadap hak individu, serta ketidakadilan dalam penerapan hukum.

a. Manfaat Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat memberikan berbagai manfaat yang tidak hanya berdampak bagi individu, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Beberapa manfaat utama dari tingginya kesadaran hukum dalam masyarakat antara lain:

1) Kepatuhan terhadap hukum secara sukarela

Individu yang memiliki kesadaran hukum tinggi tidak hanya menaati hukum karena takut sanksi, tetapi juga karena memahami bahwa aturan dibuat untuk menciptakan ketertiban dan

kesejahteraan bersama. Dengan adanya pemahaman ini, kepatuhan terhadap hukum akan tumbuh secara sukarela tanpa perlu adanya pemaksaan.

2) Mencegah terjadinya pelanggaran hukum

Kesadaran hukum yang baik berperan sebagai sistem kontrol sosial yang efektif. Masyarakat yang memahami konsekuensi hukum dari sebuah pelanggaran akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan demikian, angka pelanggaran hukum seperti pencurian, korupsi, atau pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.

3) Melindungi hak dan kewajiban warga negara

Kesadaran hukum memungkinkan individu untuk memahami hak-hak mereka dan cara mempertahankannya dalam sistem hukum yang berlaku. Selain itu, kesadaran ini juga mendorong individu untuk menjalankan kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh tanggung jawab, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat.

4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang baik akan lebih mudah dalam mengambil keputusan yang benar dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Misalnya, mereka memahami aturan dalam berbisnis, kewajiban membayar pajak, hingga hak-hak dalam dunia ketenagakerjaan. Pemahaman ini pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

5) Mendorong partisipasi aktif dalam sistem hukum

Kesadaran hukum yang tinggi mendorong masyarakat untuk aktif dalam menjaga dan menegakkan hukum, baik melalui keterlibatan dalam pembuatan kebijakan hukum, kepatuhan dalam sistem peradilan, maupun dengan melaporkan tindak kejahatan yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi subjek hukum, tetapi juga berperan sebagai pengawas dalam sistem hukum yang berlaku.

6) Memperkuat sistem hukum secara keseluruhan



Ketika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, sistem hukum akan lebih efektif diterapkan. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum juga meningkat, sehingga menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan adil.

Aparat Penegak Hukum – Shutterstock.com/2428685341

b. Indikator Kesadaran Hukum dalam Masyarakat

Untuk mengetahui sejauh mana kesadaran hukum telah diterapkan dalam masyarakat, beberapa indikator dapat digunakan sebagai ukuran, di antaranya:

1) Kepatuhan hukum di seluruh lapisan masyarakat

Kesadaran hukum yang tinggi akan membuat semua individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, menaati hukum dengan penuh kesadaran.

2) Pemahaman terhadap hak dan kewajiban

Masyarakat yang sadar hukum akan memahami hak-hak yang harus mereka terima serta kewajiban yang harus mereka penuhi sebagai warga negara.

3) Tingkat pelanggaran hukum yang rendah

Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi, angka kriminalitas dan pelanggaran aturan cenderung lebih rendah.

4) Tingginya kepercayaan terhadap aparat hukum

Masyarakat yang sadar hukum akan lebih percaya bahwa aparat penegak hukum bekerja secara adil dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

5) Penegakan hukum yang adil dan merata

Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Setiap orang mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa adanya perlakuan istimewa bagi kelompok tertentu.

c. Strategi Menumbuhkan Kesadaran Hukum di Masyarakat

Menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat itu sendiri. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum antara lain:

1) Pendidikan Hukum Sejak Dini

Memasukkan materi pendidikan hukum dalam kurikulum sekolah dapat membantu membangun pemahaman hukum sejak dini. Siswa dapat diajarkan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pentingnya kepatuhan terhadap hukum, serta dampak dari pelanggaran hukum.

2) Sosialisasi dan Kampanye Kesadaran Hukum

Pemerintah dan lembaga hukum dapat mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye publik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku serta konsekuensinya.

3) Peran Media dalam Edukasi Hukum

Media massa dan media sosial memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Penyebaran informasi mengenai pentingnya kepatuhan hukum, dampak dari pelanggaran hukum, serta kisah-kisah inspiratif tentang supremasi hukum dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

4) Keterlibatan Masyarakat dalam Pembuatan Kebijakan

Masyarakat harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan hukum. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses legislasi, kebijakan hukum yang dihasilkan akan lebih relevan dengan kebutuhan mereka.

5) Keteladanan dari Aparat dan Pemimpin Masyarakat

Kesadaran hukum tidak akan tumbuh jika para pemimpin dan aparat hukum tidak memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu, pejabat negara, tokoh masyarakat, dan aparat hukum harus menunjukkan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

6) Penegakan Hukum yang Konsisten dan Transparan

Tidak ada yang lebih merusak kesadaran hukum daripada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan secara konsisten, tanpa pandang bulu, serta dilakukan secara transparan agar masyarakat percaya bahwa hukum memang adil.



Jejak Pancasila

Indonesia menganut teori hierarki hukum dari Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, yang menyatakan bahwa sistem hukum harus tersusun secara bertingkat dari yang paling fundamental hingga yang paling teknis. Ketetapan MPR (TAP MPR) pernah memiliki kedudukan tinggi dalam hierarki hukum Indonesia, tetapi setelah reformasi hukum tahun 2000, fungsinya mengalami perubahan dan tidak lagi selalu bersifat mengikat secara luas.



Contoh Soal

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan? Jelaskan dengan contoh!

Jawaban & Pembahasan:

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah sistem yang mengatur tingkatan norma hukum dalam suatu negara sehingga setiap peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Contoh: Undang-Undang (UU) tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) harus sesuai dengan ketentuan dalam UU.

Soal 2

Jelaskan perbedaan antara asas Lex Superior dan Lex Specialis dalam hierarki peraturan perundang-undangan!

Jawaban & Pembahasan:

Lex Superior derogat legi inferiori berarti peraturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan hukum yang lebih rendah.

Contoh: Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Lex Specialis derogat legi generali berarti peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Contoh: Undang-Undang tentang Pajak Daerah lebih diutamakan daripada Undang-Undang yang mengatur keuangan negara secara umum.

Kegiatan Kelompok 1

Menumbuhkan Kesadaran Hukum Demi Kehidupan Sosial yang Tertib dan Adil

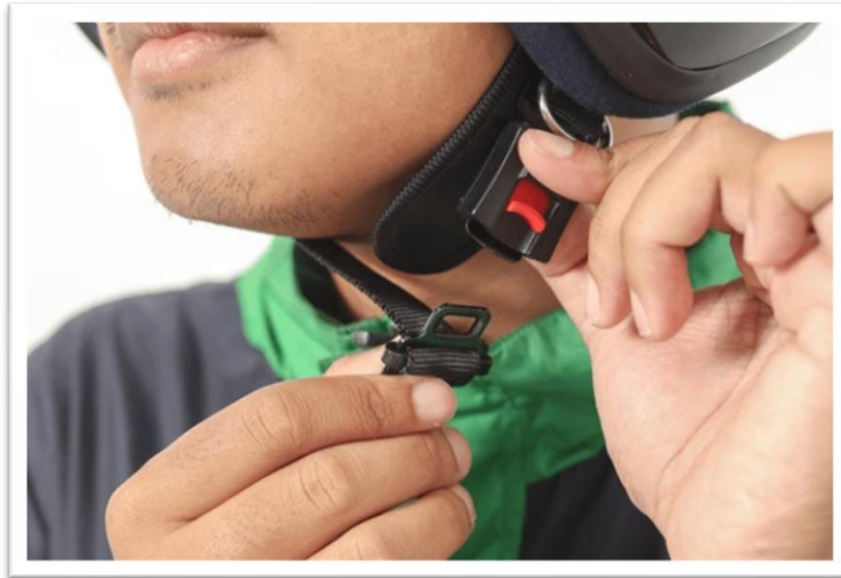
Tujuan: Menganalisis konsep kesadaran hukum serta mengevaluasi peran individu dan lembaga dalam membangun masyarakat yang patuh hukum.

Setelah mempelajari materi mengenai hukum dan kesadaran hukum, kalian akan bekerja dalam kelompok untuk menggali lebih dalam peran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, serta merancang solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum di lingkungan sekitar. Ikuti petunjuk berikut:

- 1) Bentuklah 5 kelompok yang terdiri atas 4–5 peserta didik.
- 2) Setiap kelompok memilih satu topik dari daftar berikut untuk dianalisis dan dikembangkan:
 - ▷ Kelompok 1: Peran Pendidikan Hukum Sejak Dini dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum
 - ▷ Kelompok 2: Dampak Rendahnya Kesadaran Hukum terhadap Kesejahteraan Sosial
 - ▷ Kelompok 3: Strategi Sosialisasi Hukum yang Efektif untuk Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan
 - ▷ Kelompok 4: Keteladanan Pemimpin sebagai Kunci Tumbuhnya Budaya Taat Hukum
 - ▷ Kelompok 5: Peran Media Sosial dalam Mendorong Kesadaran dan Partisipasi Hukum
- 3) Lakukan pengumpulan data dan informasi terkait topik kalian. Gunakan buku pelajaran, artikel dari jurnal ilmiah, berita terpercaya, maupun wawancara dengan tokoh masyarakat atau aparat hukum setempat.
- 4) Rancanglah produk karya kelompok yang menjelaskan hasil analisis kalian. Produk dapat berupa:
 - ▷ PowerPoint presentasi
 - ▷ Poster atau infografis
 - ▷ Video pendek atau simulasi drama hukum
 - ▷ Artikel atau majalah mini edukatif
- 5) Tunjukkan kolaborasi dalam tim dengan berbagi tugas, mendiskusikan temuan bersama, dan menyusun solusi konkrit yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.
- 6) Presentasikan hasil karya kalian di depan kelas. Gunakan waktu maksimal 10 menit dan pastikan semua anggota kelompok berkontribusi dalam presentasi.
- 7) Akhiri kegiatan dengan sesi refleksi bersama guru, berupa diskusi terbuka tentang pentingnya membangun budaya taat hukum sejak dini dan bagaimana kita dapat berperan aktif di lingkungan masing-masing.



2. Patuh Terhadap Hukum



Patuh Hukum – Shutterstock.com/2463873765

Patuh terhadap hukum adalah salah satu indikator utama dari kesadaran hukum dalam masyarakat. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana individu atau kelompok masyarakat memahami, menerima, dan menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya sebatas menghindari sanksi, tetapi juga merupakan bentuk kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, keteraturan, serta keamanan. Dengan demikian, patuh terhadap hukum bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan untuk menciptakan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Dalam hal ini, norma memiliki peran penting sebagai dasar bagi pembentukan hukum, serta sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial.

Hubungan Antara Hukum dan Norma

Hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum memerlukan dukungan dari norma-norma sosial yang telah berkembang dan diterima dalam masyarakat. Norma merupakan aturan yang mengatur perilaku individu dalam kehidupan sosial, baik dalam bentuk adat istiadat, kebiasaan, maupun peraturan tertulis.

a. Pengertian Norma dalam Konteks Hukum

Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan sosial dengan memberikan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks hukum, norma menjadi dasar dalam pembentukan aturan-aturan hukum yang lebih spesifik dan memiliki sanksi yang mengikat.

b. Jenis-Jenis Norma dalam Hukum

Norma dalam hukum dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Norma Kesusilaan, yang berasal dari hati nurani manusia dan menentukan perilaku baik atau buruk.
- 2) Norma Kesopanan, yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan dalam pergaulan sosial.

- 3) Norma Agama, yang bersumber dari ajaran agama dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama manusia.
- 4) Norma Hukum, yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi yang tegas bagi pelanggarnya.

Keempat norma ini saling berhubungan dan membentuk sistem nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Hubungan Antara Norma dan Hukum

Hukum merupakan bentuk norma yang memiliki kekuatan mengikat dan sanksi yang tegas. Dalam penerapannya, hukum tidak hanya didasarkan pada aturan yang bersifat formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma sosial. Oleh karena itu, hukum yang efektif adalah hukum yang sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat yang diaturnya. Selain itu, hukum memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari norma lainnya. Berdasarkan pandangan Soerjono yaitu:

- 1) Mengikat, yang berarti bahwa hukum bersifat wajib dan harus ditaati oleh semua orang.
- 2) Memaksa, yang berarti bahwa hukum memiliki sanksi yang dapat dikenakan kepada pelanggarnya.
- 3) Otonom, yang berarti bahwa hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tertentu selain kepentingan keadilan.
- 4) Responsif, yang berarti bahwa hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial.
- 5) Berorientasi ke masa depan, yang berarti bahwa hukum harus dapat memberikan solusi bagi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Dengan karakteristik tersebut, hukum berfungsi sebagai alat utama dalam menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel Perbandingan Jenis dan Sumber Norma

Norma	Sumber
Kesusilaan	Hati nurani manusia
Kesopanan	Adat, tata pergaulan, kebiasaan antarwarga di masyarakat
Agama	Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (kitab suci)
Hukum	Hukum yang berlaku

Penegakan Norma Hukum

Penegakan norma hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang telah ditetapkan benar-benar diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses ini tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga masyarakat sebagai subjek hukum yang harus patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum, aturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan ketertiban sosial dan keadilan.

Dalam pelaksanaannya, penegakan norma hukum mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum hingga penyuluhan hukum kepada masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Aparatur penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran utama dalam memastikan hukum diterapkan dengan adil dan konsisten. Namun, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum.

a. Prinsip-Prinsip dalam Penegakan Hukum

Agar hukum dapat ditegakkan dengan baik dan mencapai tujuan keadilan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dalam penegakan norma hukum. Prinsip-prinsip ini membantu memastikan bahwa hukum dijalankan secara adil, konsisten, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan menekankan bahwa hukum harus berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan hukum, sehingga siapa pun yang melanggar aturan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, keadilan berarti bahwa hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun latar belakang seseorang.

Sebagai contoh, dalam sistem peradilan pidana, seorang pejabat yang melakukan tindak korupsi harus mendapatkan sanksi yang setimpal, sebagaimana yang diberikan kepada rakyat biasa yang melanggar hukum. Dengan adanya prinsip keadilan, diharapkan hukum dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.



Penangkapan Tindak Kriminal - kastanews.com

2) Prinsip Kemanfaatan

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Prinsip kemanfaatan menghendaki agar hukum mampu membawa dampak positif, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik. Hukum yang baik adalah hukum yang dapat menjadi instrumen dalam menciptakan kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara.

Sebagai contoh, hukum yang mengatur perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk memastikan kesejahteraan pekerja, mencegah eksploitasi, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dengan demikian, prinsip kemanfaatan dalam penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

3) Prinsip Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum berhubungan dengan kejelasan aturan yang diterapkan. Hukum harus mampu memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam atau multitafsir. Aturan hukum harus disusun dengan bahasa yang jelas, tegas, tidak ambigu, serta tidak bertentangan satu sama lain.

Kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan hukum. Artinya, suatu aturan yang telah ditetapkan harus diberlakukan secara tetap dan tidak berubah-ubah tanpa alasan yang jelas. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa aman karena mereka mengetahui dengan pasti konsekuensi dari setiap tindakan yang mereka lakukan.

b. Tujuan dan Manfaat Penegakan Hukum

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan sosial serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak individu. Adapun manfaat dari penegakan hukum yang baik, di antaranya:

1) Menjamin Stabilitas Sosial

Dengan adanya hukum yang ditegakkan secara konsisten, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan tertib. Hal ini mengurangi potensi terjadinya konflik atau tindakan kriminal.

2) Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan

Penegakan hukum juga berfungsi untuk mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu, baik dalam lingkup pemerintahan maupun swasta. Hukum yang ditegakkan dengan baik dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3) Melindungi Hak Asasi Manusia

Salah satu peran utama hukum adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM). Melalui penegakan hukum, hak-hak individu, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat, dapat dijaga dan dijamin pelaksanaannya.



Kantor KOMNAS HAM – Shutterstock.com/2494728113

4) Membantu Penyelesaian Sengketa

Konflik atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi dan arbitrase). Penegakan hukum yang baik memastikan bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan transparan.

5) Mewujudkan Masyarakat yang Taat Hukum

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, masyarakat akan semakin menyadari pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hal ini akan menciptakan budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat.

Membentuk Pola Perilaku Taat Hukum

Sebagai warga negara yang baik, menaati hukum adalah kewajiban yang harus dijalankan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga negara bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketidakpatuhan terhadap hukum dapat menyebabkan aturan yang berlaku menjadi tidak efektif. Jika

hukum tidak ditaati oleh masyarakatnya, maka tujuan hukum dalam menciptakan keteraturan dan keadilan akan sulit terwujud.

Setiap individu memiliki peran dalam menegakkan hukum dengan menjalankan peraturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak individu yang mematuhi hukum, maka semakin tertib suatu masyarakat. Sebaliknya, jika ketidakpatuhan hukum menjadi kebiasaan, maka akan muncul berbagai permasalahan sosial yang dapat menghambat pembangunan negara. Oleh sebab itu, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum dan menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

a. Contoh Perilaku Taat Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari

Pola perilaku taat hukum dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala kecil seperti keluarga hingga dalam lingkungan negara. Beberapa contoh konkret dari perilaku taat hukum antara lain:

▷ Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku

Setiap individu harus menjalankan peraturan yang sudah ditetapkan, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Misalnya, membayar pajak tepat waktu atau mengikuti prosedur administrasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

▷ Mendukung upaya perbaikan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketika ada aturan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, cara yang benar adalah menyampaikannya melalui jalur yang telah disediakan, seperti melalui forum diskusi atau aspirasi kepada perwakilan rakyat.

▷ Menjalankan tugas dan kewajiban sesuai hukum

Dalam pekerjaan atau profesi masing-masing, setiap orang harus bertindak berdasarkan aturan hukum yang mengatur bidang tersebut. Contohnya, seorang dokter harus mengikuti prosedur medis yang telah ditetapkan, dan pengusaha harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan.

▷ Melaporkan pelanggaran hukum kepada pihak berwenang

Masyarakat yang sadar hukum tidak hanya menaati aturan, tetapi juga berperan aktif dalam membantu penegakan hukum. Jika melihat pelanggaran hukum, misalnya tindak kriminal atau penyalahgunaan wewenang, masyarakat harus melaporkannya kepada pihak berwenang.

▷ Mematuhi peraturan lalu lintas dan norma sosial lainnya

Kepatuhan dalam berlalu lintas merupakan contoh konkret dari perilaku taat hukum, seperti tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm saat berkendara, dan menghormati hak pejalan kaki. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga keselamatan orang lain.

b. Lingkup Penerapan Perilaku Taat Hukum

Perilaku taat hukum tidak hanya terbatas pada kepatuhan individu di ruang publik, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Berikut adalah beberapa lingkungan yang menjadi ruang lingkup penerapan perilaku taat hukum:

1) Lingkungan Keluarga

- ▷ Menjauhi perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan anggota keluarga lainnya.
- ▷ Bersikap sopan serta patuh terhadap peraturan yang telah disepakati dalam keluarga.

- ▷ Menjaga nama baik keluarga dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar norma sosial.
- ▷ Menggunakan fasilitas rumah tangga dengan bertanggung jawab.
- ▷ Mematuhi nasihat orang tua demi kebaikan bersama.

2) Lingkungan Sekolah

- ▷ Disiplin dalam mengikuti jadwal sekolah, termasuk datang tepat waktu dan mengikuti aturan sekolah.
- ▷ Menggunakan pakaian seragam yang sesuai dengan ketentuan sekolah.
- ▷ Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
- ▷ Menyelesaikan tugas dan pekerjaan rumah dengan penuh tanggung jawab.
- ▷ Menjaga ketertiban dalam proses belajar mengajar serta menghormati guru dan sesama siswa.



Sosialisasi Antiperundungan – malang-post.com

3) Lingkungan Masyarakat

- ▷ Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan atau mengganggu ketertiban umum.
- ▷ Menghormati norma adat dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
- ▷ Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong dan musyawarah.
- ▷ Mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, seperti peraturan zonasi, kebersihan, dan keamanan lingkungan.

4) Lingkungan Negara

- ▷ Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis.
- ▷ Mengurus administrasi kependudukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- ▷ Mematuhi aturan perpajakan dan kewajiban lainnya sebagai warga negara.

- ▷ Menjaga rahasia negara dan tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan nasional.
- ▷ Menghormati simbol negara dan menjalankan hak serta kewajiban sebagai warga negara secara bertanggung jawab.

c. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Taat Hukum

Menurut Herbert C. Kelman, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pola kepatuhan seseorang terhadap hukum, yaitu:

1) Pemenuhan Aturan (*Compliance*)

Kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan imbalan atau menghindari hukuman. Seseorang menaati hukum karena adanya sanksi yang akan diberikan jika melanggar, seperti denda atau hukuman pidana.

2) Internalisasi (*Internalization*)

Kepatuhan terhadap hukum yang muncul karena kesadaran akan pentingnya aturan tersebut. Individu tidak hanya menaati hukum karena takut pada sanksi, tetapi juga karena menyadari manfaat dan tujuan dari hukum itu sendiri.

3) Identifikasi (*Identification*)

Kepatuhan yang terjadi karena individu ingin menjaga hubungan sosial yang harmonis dan menghindari konflik dengan kelompok atau masyarakatnya. Contohnya, seseorang yang mengikuti norma hukum karena ingin diterima dalam kelompok sosialnya.

d. Ciri-ciri Individu yang Berperilaku Taat Hukum

Individu yang telah memiliki kesadaran hukum dan menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dapat dikenali melalui beberapa karakteristik berikut:

- ▷ Tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain.
- ▷ Memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum.
- ▷ Secara aktif menjalankan perintah hukum serta menghindari larangan yang telah ditetapkan.
- ▷ Memiliki empati dengan mempertimbangkan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap orang lain.

Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Keadilan merupakan salah satu nilai utama dalam Pancasila yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui penerapan norma, hukum, dan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mewujudkan keadilan tidak berarti memberikan hak yang sama kepada semua individu secara merata, melainkan lebih kepada prinsip proporsionalitas, di mana hak dan kewajiban disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setiap orang. Dalam Pancasila, konsep keadilan erat kaitannya dengan sila kedua dan sila kelima.

a. Keadilan dalam Sila Kedua Pancasila

Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dalam keadilan. Menurut Oeripan Notohamidjojo, keadilan yang bersumber dari kemanusiaan meliputi aspek kepatutan, kejujuran, dan moralitas (Arliman S, 2017). Dengan demikian, penerapan keadilan dalam sila ini harus menghargai setiap individu sebagai manusia yang memiliki hak

dan martabat yang sama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau latar belakang sosial lainnya.

Keadilan dalam sila kedua ini juga menuntut adanya perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, ekonomi, politik, dan sosial. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum, misalnya, tidak boleh ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Setiap warga negara harus mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan hak dan kewajibannya.

b. Keadilan dalam Sila Kelima Pancasila

Sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan politik. Keadilan sosial berorientasi pada pemerataan kesejahteraan serta pengurangan kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dalam praktiknya, keadilan sosial dapat diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan bersama, seperti distribusi pendapatan yang lebih merata, akses pendidikan yang setara, dan layanan kesehatan yang inklusif.

Menurut John Rawls, keadilan sosial menekankan pada prinsip pemerataan dan kesempatan yang setara bagi semua individu dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti bahwa setiap warga negara harus memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam kehidupan sosial dan politik tanpa adanya hambatan struktural atau diskriminasi.

Sebagai contoh penerapan keadilan sosial dalam kehidupan nyata, pemerintah sering kali mengadakan program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu, memberikan subsidi pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan pekerjaan, serta membangun infrastruktur di daerah terpencil. Tujuannya adalah agar seluruh warga negara dapat menikmati kesejahteraan secara merata dan tidak ada ketimpangan yang terlalu besar antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

c. Cara Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila

Agar prinsip keadilan dalam Pancasila dapat terwujud dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain:

▷ Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Setiap warga negara perlu memiliki sikap toleransi dan menghargai perbedaan agar tidak terjadi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.

▷ Menempatkan Keadilan sebagai Tujuan Pembangunan

Segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta memastikan tidak ada kelompok yang tertinggal dalam pembangunan.

▷ Menyeimbangkan Hak dan Kewajiban

Keadilan tidak hanya berarti mendapatkan hak, tetapi juga menjalankan kewajiban dengan baik. Oleh karena itu, setiap individu harus berkontribusi sesuai dengan perannya dalam masyarakat.

▷ Mengutamakan Musyawarah Mufakat dalam Pengambilan Keputusan

Segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat luas sebaiknya diputuskan melalui musyawarah sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

▷ Mengedepankan Prinsip Kesetaraan dalam Akses dan Peluang

Setiap individu berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

Keadilan dalam Pancasila bukan hanya sekadar konsep, tetapi harus diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan praktik nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, masyarakat yang adil dan sejahtera dapat tercapai sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia.

Selain pendapat Oeripan Notohamidjojo dan John Rawls, konsep keadilan dalam Pancasila juga dapat dikaitkan dengan pemikiran Aristoteles, yang membedakan keadilan menjadi dua jenis, yaitu keadilan distributif (keadilan berdasarkan proporsi dan kebutuhan) serta keadilan korektif (keadilan dalam konteks hukum dan penghukuman). Pemikiran ini relevan dengan penerapan keadilan dalam Pancasila, di mana keadilan distributif tercermin dalam kebijakan sosial dan ekonomi, sementara keadilan korektif diwujudkan dalam sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif.



Jejak Pancasila

Harmonisasi dan sinkronisasi hukum penting dilakukan agar peraturan nasional dan internasional, termasuk perjanjian bilateral dan multilateral, selaras dengan hukum Indonesia. Sinkronisasi dilakukan secara vertikal (antara peraturan berbeda tingkat) dan horizontal (antarperaturan setingkat). Tanpa proses ini, bisa terjadi konflik antaraturan, menimbulkan kebingungan hukum, ketidakpastian bagi masyarakat, serta membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang.



Contoh Soal

Soal 1

Apa yang dimaksud dengan harmonisasi peraturan perundang-undangan? Berikan contohnya!

Jawaban & Pembahasan:

Harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyelarasan norma hukum agar tidak terjadi pertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Contoh: Harmonisasi dilakukan ketika pemerintah ingin menyusun Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja agar selaras dengan peraturan di bidang ketenagakerjaan dan investasi.

Soal 2

Sebutkan dan jelaskan dua teknik yang digunakan dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan!

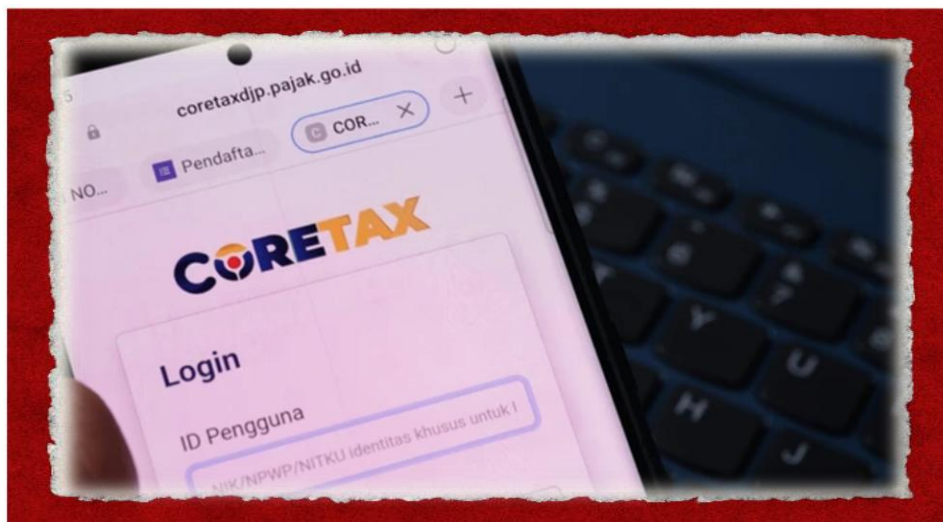
Jawaban & Pembahasan:

Teknik Substansial: Menyesuaikan materi peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Teknik Formal: Melakukan penyusunan peraturan berdasarkan format, struktur bahasa, dan sistematika yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



3. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban



Kewajiban Pembayaran Pajak -Shutterstock.com/2573167375

Memahami Hak dan Kewajiban

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan dipenuhi demi terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kasus pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban yang berdampak negatif terhadap ketertiban sosial. Pelanggaran hak dapat berupa tindakan yang menghalangi seseorang untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana yang dijamin oleh undang-undang, sedangkan peningkaran kewajiban terjadi ketika seseorang atau kelompok enggan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Pelanggaran HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 adalah tindakan yang mengurangi atau mencabut hak yang dijamin hukum, baik oleh individu, kelompok, maupun aparat negara. UUD NRI 1945 menjamin hak warga negara untuk hidup aman dan sejahtera, namun kenyataannya masih banyak warga yang kesulitan memenuhi hak tersebut akibat kemiskinan. Di sisi lain, sebagian masyarakat lebih menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, yang dapat memicu ketimpangan dan konflik sosial. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat dibutuhkan. Pelanggaran HAM mencerminkan pengabaian kewajiban, sedangkan pelaksanaan kewajiban turut mendukung terpenuhinya hak-hak warga negara lainnya.

Faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Kewajiban

Meskipun hak dan kewajiban merupakan dua aspek yang saling berkaitan, dalam kenyataannya sering terjadi ketidakseimbangan antara keduanya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan pelanggaran hak serta mengabaikan kewajiban mereka sebagai warga negara. Faktor-faktor tersebut meliputi:

a. Sikap Egois dan Mementingkan Diri Sendiri

Salah satu penyebab utama pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban adalah sikap egois, di mana seseorang hanya berfokus pada haknya sendiri tanpa memikirkan hak orang lain. Misalnya, seseorang menuntut kebebasan berpendapat tetapi tidak menghormati pendapat orang lain. Contoh lain adalah seseorang yang membuang sampah sembarangan dengan alasan kenyamanan pribadi, tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sikap ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak keseimbangan sosial.

b. Rendahnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah juga menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan menyebabkan seseorang tidak menghormati aturan yang berlaku dan bahkan melakukan tindakan yang merugikan negara serta masyarakat. Misalnya, tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara menunjukkan bahwa mereka mengabaikan kewajiban mereka untuk melayani rakyat dan justru lebih mengutamakan kepentingan pribadi.

Selain itu, rendahnya kesadaran akan pentingnya persatuan sering kali menyebabkan konflik antar kelompok. Hal ini diperburuk dengan masuknya ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang dapat mengancam stabilitas nasional. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya nasionalisme harus terus ditingkatkan agar setiap warga negara memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya.

c. Kurangnya Toleransi

Sikap tidak toleran merupakan penyebab lain dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketidaktoleranan bisa terjadi dalam berbagai aspek, seperti perbedaan suku, ras, agama, dan latar belakang sosial. Contohnya, diskriminasi terhadap kelompok tertentu yang berbeda keyakinan atau pandangan politik dapat berujung pada ketidakadilan dan penindasan terhadap hak-hak mereka.

Kurangnya toleransi juga sering kali menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan, terutama jika tidak ada upaya penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini agar mereka dapat menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan.

d. Penyalahgunaan Kekuasaan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kekuasaan dapat dimiliki oleh individu, kelompok, maupun pemerintah. Namun, jika kekuasaan disalahgunakan, hal ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Contohnya, seorang pejabat yang menggunakan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat, atau seorang pemimpin perusahaan yang mengabaikan hak-hak pekerja demi keuntungan pribadi.

Penyalahgunaan kekuasaan juga sering kali terjadi dalam bentuk represif, di mana pihak yang berkuasa menekan atau membungkam suara masyarakat demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, sistem hukum yang kuat serta pengawasan masyarakat yang ketat diperlukan agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tetap terlindungi.

Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia

Sebagai bagian dari suatu negara, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak memberikan wewenang kepada seseorang untuk menikmati atau memperoleh sesuatu, sedangkan kewajiban mengharuskan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu demi kebaikan bersama. Hak dan kewajiban ini bersifat timbal balik, artinya dalam setiap hak yang diperoleh, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

a. Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hak didefinisikan sebagai kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu yang menjadi miliknya. Hak adalah sesuatu yang melekat pada setiap individu sebagai bentuk pengakuan dari negara atas keberadaannya. Sebaliknya, kewajiban merujuk pada sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh seseorang, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat secara keseluruhan.

Sejalan dengan itu, pengertian warga negara dalam KBBI adalah individu yang menjadi bagian dari suatu negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau faktor lainnya, yang membuatnya memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara. Dengan demikian, hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat diartikan sebagai serangkaian keistimewaan dan tanggung jawab yang diberikan dan dibebankan kepada individu dalam suatu negara.

b. Hak Warga Negara

Hak warga negara merupakan sesuatu yang harus diterima dan dinikmati oleh individu sebagai anggota masyarakat yang diakui oleh negara. Hak-hak ini dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

▷ Kategori Hak Warga Negara Menurut Jimly Asshiddiqie

Dalam pandangan Jimly Asshiddiqie, hak warga negara dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis:

- 1) Hak Konstitusional, yaitu hak-hak yang secara resmi dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan pendidikan, dan hak atas pekerjaan.
- 2) Hak Legal, yaitu hak yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan di bawahnya (subordinate legislations).



Demonstrasi Penuntutan Hak - shutterstock.com/2506444823

▷ Klasifikasi Hak Warga Negara

Berdasarkan pandangan tersebut, hak warga negara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Hak asasi manusia yang berlaku khusus bagi warga negara Indonesia, seperti hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak atas perlindungan hukum yang sama di depan undang-undang.
- 2) Hak-hak yang bersifat universal tetapi dengan pembatasan bagi warga negara asing, misalnya hak untuk mendirikan partai politik atau terlibat dalam proses politik Indonesia.
- 3) Hak untuk menduduki jabatan politik tertentu (elected officials), seperti menjadi presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hakim konstitusi, dan pejabat pemerintahan lainnya.
- 4) Hak untuk diangkat dalam jabatan struktural dan fungsional (appointed officials), seperti menjadi anggota TNI, Polri, hakim, dan pejabat negara lainnya yang hanya dapat diisi oleh warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi.
- 5) Hak untuk melakukan upaya hukum, misalnya hak untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara.

c. Kewajiban Warga Negara

Selain memiliki hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh individu demi kepentingan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Notonagoro, kewajiban adalah suatu beban yang harus diberikan secara terus-menerus oleh individu kepada negara, baik dalam bentuk partisipasi sosial, ekonomi, maupun politik. Beberapa contoh kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara adalah:

- ▷ Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- ▷ Menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintahan, serta melaksanakan peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab.
- ▷ Turut serta dalam pembangunan bangsa, dengan tujuan menjadikan Indonesia lebih maju, sejahtera, dan demokratis.
- ▷ Mematuhi peraturan yang berlaku, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara.
- ▷ Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik, seperti mengikuti pemilu, mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan berkontribusi dalam menjaga ketertiban umum.

Contoh Soal

Soal 1

Apa perbedaan antara sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal dalam peraturan perundang-undangan?

Jawaban & Pembahasan:

Sinkronisasi vertikal adalah penyelarasan peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki hukum. Contoh: Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di tingkat nasional.

Sinkronisasi horizontal adalah penyelarasan antara peraturan-peraturan yang setara dalam hierarki hukum. Contoh: Peraturan Menteri Keuangan harus selaras dengan Peraturan Menteri Perindustrian jika membahas kebijakan ekonomi.

Soal 2

Mengapa sinkronisasi vertikal sangat penting dalam sistem hukum nasional?

Jawaban & Pembahasan:

Sinkronisasi vertikal sangat penting karena memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah selalu mengikuti ketentuan yang ada dalam peraturan yang lebih tinggi. Hal ini menjaga konsistensi hukum dan menghindari ketidaksesuaian atau konflik antar peraturan dalam sistem hukum nasional.

Kegiatan Kelompok 2

Menyikapi Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban di Sekitar Kita

Tujuan: Menganalisis faktor penyebab serta dampak pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban, serta merumuskan upaya pencegahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban merupakan masalah serius yang dapat mengganggu kehidupan sosial dan melemahkan semangat kebangsaan. Untuk memahami persoalan ini lebih dalam, lakukanlah kegiatan berikut:

- 1) Bentuklah kelompok yang terdiri atas 3–5 orang.
- 2) Carilah satu contoh kasus nyata yang menunjukkan pelanggaran hak atau peningkaran kewajiban. Kalian dapat menggunakan artikel berita, laporan LSM, jurnal ilmiah, atau sumber terpercaya lainnya.
- 3) Diskusikan dan analisis kasus tersebut, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini:
 - a. Kasus apa yang kelompok kalian angkat?
 - b. Siapa pihak yang dirugikan dan hak apa yang dilanggar?
 - c. Kewajiban apa yang diabaikan dalam kasus tersebut?
 - d. Faktor penyebab utama dari pelanggaran atau peningkaran itu apa?
 - e. Apa dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dari kasus tersebut?
 - f. Bagaimana seharusnya warga negara bersikap agar hal serupa tidak terulang?
 - g. Menurut kalian, bagaimana peran pendidikan dalam membentuk kesadaran hak dan kewajiban?
- 4) Susun hasil analisis dalam bentuk karya kreatif, seperti:
 - a. Infografis edukatif
 - b. Poster kampanye kesadaran warga negara
 - c. Video pendek tentang “Hak & Kewajiban”
 - d. Cerita bergambar (komik singkat) yang menggambarkan kasus dan solusinya
- 5) Presentasikan karya kelompok kalian di depan kelas. Pastikan semua anggota terlibat aktif. Selama presentasi, kelompok lain diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan.



4. Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia



Undang-undang Dasar 1945 – Shutterstock.com/2343475103

Pengertian Produk Hukum dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip utama dalam negara hukum adalah menjamin adanya supremasi hukum (rule of law), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), serta perlindungan terhadap hak asasi manusia (constitution based on human rights) sebagaimana dijelaskan oleh Albert Venn Dicey.

Sebagai upaya untuk menerapkan prinsip negara hukum, Indonesia mengatur berbagai produk hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan. Produk hukum ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan memiliki hierarki yang disusun secara sistematis untuk memastikan keselarasan dalam penerapannya. Prinsip asas legalitas menjadi pedoman utama dalam sistem ini, di mana setiap tindakan hukum harus memiliki dasar aturan yang sah.

a. Arti Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum tertulis yang mengikat seluruh masyarakat dan dibuat oleh lembaga yang berwenang.

▷ Prinsip Pembentukan Peraturan

Dalam pembentukan peraturan ini, terdapat beberapa prinsip utama:

- 1) Prinsip Supremasi Hukum: Hukum berada di atas segala kepentingan individu dan kelompok.
- 2) Prinsip Keterbukaan: Setiap peraturan harus diumumkan secara luas agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya.
- 3) Prinsip Kepastian Hukum: Hukum harus jelas, tidak multitafsir, dan dapat diterapkan dengan adil.

▷ Definisi Peraturan Perundang-undangan

Beberapa definisi peraturan perundang-undangan menurut para ahli:

- 1) Bagir Manan (1987): Peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang.
- 2) Soehino (1981): Peraturan perundang-undangan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara.
- 3) Hamid S. Attamimi (1990): Peraturan perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga negara yang sah.

b. Pentingnya Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Dalam suatu negara hukum, idealnya setiap peraturan yang berlaku harus tersusun dalam sistem yang berjenjang dan terstruktur. Susunan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi hukum, menghindari kontradiksi antar aturan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat. Konsep mengenai hierarki peraturan perundang-undangan ini banyak dikaji dalam teori Hans Kelsen dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hans Nawiasky.

Menurut Kelsen, sistem hukum suatu negara harus memiliki struktur bertingkat di mana norma hukum yang lebih rendah harus bersumber dari norma hukum yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan hukum memiliki kesinambungan serta dapat diuji keabsahannya melalui peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki tersebut. Dengan konsep ini, setiap aturan yang ada dapat diuji validitasnya dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih superior.

Berdasarkan pemikiran Kelsen, Hans Nawiasky kemudian menyempurnakan konsep ini dengan menyatakan bahwa susunan norma hukum dalam sistem hukum harus berbentuk hirarkis, menyerupai struktur stupa (Sati, 2019). Artinya, hukum disusun dari tingkatan tertinggi hingga terendah, dan setiap tingkatan memiliki fungsi serta kedudukan yang berbeda dalam sistem hukum nasional.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum tersebut memiliki empat asas utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan hierarki peraturan perundang-undangan. Keempat asas ini, sebagaimana dijelaskan oleh Anwar, dkk. (2022), adalah sebagai berikut:

1) Lex Superior Derogat Legi Inferiori

Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki hukum harus diutamakan dibandingkan dengan peraturan yang lebih rendah. Dengan kata lain, aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan atau melanggar aturan yang lebih tinggi.

Sebagai contoh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia harus menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk undang-undang (UU), peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (Perda), dan lainnya. Jika ada peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan atau dicabut karena kedudukannya lebih rendah dalam hierarki hukum.

2) Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas ini mengandung makna bahwa peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan yang bersifat umum (*lex generalis*). Artinya, ketika terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka peraturan yang lebih spesifik akan lebih diutamakan.

Sebagai contoh, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur secara umum hak dan kewajiban pekerja, sementara Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran mengatur secara lebih spesifik mengenai perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Dalam hal ini, jika ada ketentuan yang bertentangan antara keduanya, maka aturan yang lebih khusus, yaitu Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran, akan diutamakan dalam kasus yang berkaitan dengan pekerja migran.

3) Lex Posterior Derogat Legi Priori

Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan hukum yang lebih baru akan mengesampingkan atau menggantikan peraturan hukum yang lebih lama apabila kedua aturan tersebut memiliki hierarki yang sama dan mengatur hal yang sama.

Sebagai contoh, jika ada undang-undang baru yang menggantikan undang-undang lama dalam bidang pendidikan, maka aturan dalam undang-undang baru akan menjadi pedoman utama, sementara undang-undang lama tidak lagi berlaku. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan aturan hukum dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Asas ini juga bertujuan untuk menghindari ketidakpastian hukum, di mana masyarakat dapat lebih mudah memahami dan mengikuti aturan yang terbaru tanpa adanya kebingungan akibat aturan yang sudah usang atau tidak lagi relevan.

4) Perubahan, Pencabutan, dan Penghapusan Peraturan

Asas terakhir dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan adalah dalam hal mencabut, menghapus, atau mengubah suatu peraturan, hanya peraturan yang memiliki hierarki yang sama atau lebih tinggi yang dapat melakukannya.

Artinya, sebuah peraturan hanya dapat diubah atau dihapus oleh peraturan lain yang memiliki kedudukan yang sama atau lebih tinggi dalam sistem hukum. Misalnya:

- ▷ Undang-Undang hanya dapat dicabut atau diubah oleh undang-undang baru.
- ▷ Peraturan Pemerintah dapat dihapus atau diperbarui melalui Peraturan Pemerintah yang baru.
- ▷ Peraturan Presiden tidak dapat mengubah Undang-Undang, karena hierarki Peraturan Presiden berada di bawah Undang-Undang.

Contoh konkret dari asas ini adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya dapat dilakukan melalui proses amendemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena UUD 1945 merupakan hukum tertinggi di Indonesia.

c. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan sistem peraturan perundang-undangan yang tertata secara hierarkis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan hukum memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tidak bertentangan satu sama lain. Dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa “Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali.” Dari ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa setiap peraturan yang berlaku harus memiliki dasar hukum yang sah serta hierarki yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Agar kondisi tersebut dapat terwujud, sistem hukum nasional harus disusun dalam bentuk hierarki yang jelas. Hierarki ini berfungsi untuk menunjukkan tingkatan kekuatan hukum suatu peraturan perundang-undangan. Konsep hierarki ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur jenis dan urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang ini, telah ada beberapa peraturan yang pernah mengatur mengenai hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang tertuang dalam berbagai ketetapan dan undang-undang sebelumnya.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perkembangan hierarki peraturan perundang-undangan berdasarkan regulasi yang pernah berlaku:

Tabel Perkembangan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966	Ketetapan MPR No. III/MPR/2000	UU RI No. 10 Tahun 2004	UU RI No. 12 Tahun 2011
▷ UUD 1945	▷ UUD 1945	▷ UUD NRI Tahun 1945	▷ UUD NRI Tahun 1945
▷ Ketetapan MPR	▷ Ketetapan MPR	▷ UU/Perpu	▷ Ketetapan MPR
▷ UU/Perpu	▷ Undang-Undang	▷ Peraturan Pemerintah	▷ UU/Perpu
▷ Peraturan Pemerintah	▷ Perpu	▷ Peraturan Presiden	▷ Peraturan Pemerintah
▷ Keputusan Presiden	▷ Peraturan Pemerintah	▷ Peraturan Daerah:	▷ Peraturan Presiden
▷ Peraturan pelaksana lainnya	▷ Keputusan Presiden	a. Peraturan Daerah Provinsi	▷ Peraturan Daerah Provinsi
	▷ Peraturan Daerah	b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota	▷ Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas:

- ▷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
Sebagai hukum dasar tertinggi, UUD 1945 menjadi landasan bagi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Konstitusi ini telah mengalami empat kali amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002 untuk menyesuaikan dengan perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.
- ▷ Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
TAP MPR merupakan produk hukum yang mengandung ketetapan atau kebijakan MPR yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, baik ke dalam maupun ke luar MPR.
- ▷ Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
Undang-Undang (UU) dibuat oleh DPR dengan persetujuan Presiden dan berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) adalah produk hukum yang dikeluarkan Presiden dalam kondisi mendesak dan harus mendapat persetujuan DPR dalam waktu tertentu.
- ▷ Peraturan Pemerintah (PP)
PP merupakan aturan yang dibuat oleh Presiden untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang.
- ▷ Peraturan Presiden (Perpres)
Perpres dikeluarkan oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan yang lebih tinggi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

▷ Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

Perda tingkat provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan gubernur. Contohnya adalah Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

▷ Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota

Produk hukum ini dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama kepala daerah setempat. Misalnya, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum suatu negara, keselarasan antar peraturan merupakan elemen penting agar tidak terjadi konflik hukum yang dapat menghambat penerapan kebijakan secara efektif. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan menjadi proses yang krusial untuk memastikan bahwa setiap regulasi memiliki keterpaduan baik dari segi substansi, hierarki, maupun implementasi. Oleh karena itu, lembaga negara dan pejabat yang berwenang memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ada serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

a. Proses Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai regulasi agar tidak saling bertentangan, sesuai dengan hierarki hukum, serta dapat diterapkan secara efektif. Tujuannya adalah menciptakan sistem hukum yang konsisten, seragam, dan tidak membingungkan dalam pelaksanaannya. Agar proses harmonisasi berjalan baik, perlu memperhatikan tiga aspek utama berikut:

1) Aspek substansi hukum

- ▷ Menghindari kontradiksi antar peraturan dengan memastikan tidak ada pertentangan, terutama dengan regulasi yang lebih tinggi.
- ▷ Menyesuaikan rancangan peraturan dengan jenjang atau tingkat hierarki hukum yang berlaku.
- ▷ Memastikan isi peraturan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- ▷ Menyusun pasal-pasal yang lengkap, sesuai prinsip tata kelola negara berdasarkan Undang-Undang Dasar.
- ▷ Menggunakan istilah hukum secara konsisten agar tidak menimbulkan kerancuan.

2) Aspek teknis penyusunan peraturan

- ▷ Menyusun sistematika peraturan secara jelas dan terstruktur, mulai dari konsideran, batang tubuh, hingga penutup.
- ▷ Memperhatikan karakteristik khusus dari suatu materi agar tidak tumpang tindih dengan peraturan lain.
- ▷ Menggunakan bahasa hukum yang baku, jelas, dan tidak menimbulkan multiinterpretasi.
- ▷ Menentukan bentuk rancangan yang sesuai dengan jenis regulasi yang sedang dibuat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah.

3) Aspek prosedural

- ▷ Melakukan pemeriksaan terhadap rancangan peraturan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi lain.
- ▷ Menerapkan asas-asas hukum yang relevan, baik asas pembentukan peraturan, asas materi muatan, maupun asas khusus sesuai bidang hukum.

Melalui proses harmonisasi ini, setiap peraturan dapat diintegrasikan secara lebih baik ke dalam sistem hukum nasional, sehingga mencegah terjadinya tumpang tindih dan ketidaksesuaian antar peraturan.

b. Proses Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan

Sinkronisasi hukum penting untuk menjamin keadilan hukum, menghindari kekacauan dalam penerapan aturan, serta memastikan kesesuaian hukum dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi di suatu negara. Tanpa adanya sinkronisasi, peraturan yang tumpang tindih dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada ketidakstabilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

Dalam prosesnya, sinkronisasi hukum dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal.

1) Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi hukum secara vertikal adalah upaya untuk menyelaraskan peraturan yang memiliki perbedaan tingkat atau hierarki dalam sistem perundang-undangan. Proses ini dilakukan dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi agar terdapat kesinambungan dalam penerapan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, setiap peraturan yang dibuat harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI 1945. Adapun tujuan utama dari sinkronisasi vertikal adalah:

- ▷ Menjamin kesesuaian aturan dalam satu sistem hukum sehingga aturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
- ▷ Mencegah penyimpangan dalam implementasi hukum dengan memastikan bahwa setiap peraturan memiliki dasar hukum yang kuat.
- ▷ Memastikan bahwa peraturan yang lebih rendah tetap sejalan dengan kebijakan hukum nasional.
- ▷ Sebagai contoh, jika terdapat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) yang bertentangan dengan Undang-Undang (UU), maka peraturan tersebut perlu direvisi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.

2) Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi horizontal adalah penyesuaian dan penyelarasan antara peraturan-peraturan yang berada dalam tingkat hierarki yang sama untuk memastikan bahwa tidak terjadi pertentangan di antara aturan-aturan tersebut. Proses ini dilakukan ketika dua atau lebih peraturan dengan kedudukan yang sejajar dalam sistem hukum ternyata memiliki ketidaksesuaian dalam implementasinya. Beberapa langkah yang dilakukan dalam sinkronisasi horizontal adalah:

- ▷ Menganalisis kesesuaian antara berbagai peraturan yang memiliki kedudukan sejajar agar tidak ada aturan yang bertentangan.

- ▷ Memastikan setiap aturan memiliki keselarasan dalam tujuan, ruang lingkup, serta implementasinya.
- ▷ Menghindari duplikasi atau tumpang tindih aturan yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapannya.

Misalnya, jika terdapat dua peraturan daerah (Perda) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mengatur hal yang sama tetapi memiliki ketentuan yang bertolak belakang, maka perlu dilakukan sinkronisasi agar peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan dengan konsisten.

Sinkronisasi horizontal juga menjadi bagian dari proses harmonisasi hukum secara luas, yang mencakup penyesuaian dan perbaikan berbagai peraturan yang ada agar lebih sesuai dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat.

c. Pentingnya Harmonisasi dan Sinkronisasi dalam Sistem Hukum

Baik harmonisasi maupun sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan elemen esensial dalam pembentukan sistem hukum yang tertib, teratur, dan dapat diterapkan secara efektif. Jika kedua proses ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat muncul berbagai masalah, seperti:

- ▷ Ketidakseimbangan dalam sistem hukum, yang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan.
- ▷ Potensi konflik antarperaturan, yang menghambat proses hukum dan administrasi pemerintahan.
- ▷ Ketidakpastian hukum, yang berdampak negatif terhadap keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian, harmonisasi dan sinkronisasi hukum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, kejelasan aturan, dan efektivitas penerapan hukum dalam kehidupan bernegara. Kedua proses ini tidak hanya penting bagi pemerintah dan lembaga pembuat kebijakan, tetapi juga bagi masyarakat sebagai subjek hukum yang harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Harmonisasi dan sinkronisasi harus selalu menjadi bagian dalam proses legislasi di Indonesia agar sistem hukum dapat berjalan dengan tertib, stabil, dan responsif terhadap dinamika perkembangan masyarakat serta kebutuhan zaman.

Hubungan Pancasila Dengan Peraturan Perundang-undangan



Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memiliki posisi tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa UUD NRI 1945 menjadi dasar dalam pembentukan berbagai aturan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang disusun dan diterapkan di Indonesia harus berlandaskan pada UUD NRI 1945 serta tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Namun, dalam konteks yang lebih mendalam, UUD NRI 1945 sendiri tidak berdiri sendiri sebagai hukum tertinggi. Sumber utama dari segala peraturan hukum di Indonesia adalah Pancasila. Pancasila berfungsi

sebagai norma dasar (grundnorm) atau norma fundamental negara (staatsfundamentalnorm), yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber hukum tertinggi yang menjadi landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia.

a. Pancasila sebagai Dasar Peraturan Perundang-undangan

Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 merupakan titik acuan dalam perancangan seluruh norma hukum di Indonesia. Hubungan antara Pancasila dengan UUD NRI 1945 dapat dilihat dalam beberapa aspek berikut:

1) Suasana Kebatinan

Pembukaan UUD NRI 1945 mengandung pokok-pokok pemikiran yang mencerminkan suasana kebatinan bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan hukum yang diterapkan di Indonesia.

2) Cita-cita Hukum

Setiap pasal dalam UUD NRI 1945 mencerminkan tujuan hukum nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, hukum yang diberlakukan di Indonesia harus mengandung prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan, sebagaimana terkandung dalam Pancasila.

3) Penjabaran Pembukaan UUD NRI 1945

Pasal-pasal dalam UUD NRI 1945 merupakan bentuk penjabaran dari pemikiran yang ada dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Setiap ketentuan yang ada dalam pasal-pasal UUD NRI 1945 merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional.

Sebagai ilustrasi, hubungan antara Pancasila dan UUD NRI 1945 dapat digambarkan seperti hubungan antara roh dan tubuh. Pancasila berperan sebagai roh yang menghidupkan seluruh aspek hukum di Indonesia, sedangkan UUD NRI 1945 berfungsi sebagai raga yang menjalankan aturan hukum berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

b. Kedudukan Pancasila dalam Hierarki Hukum Indonesia

Karena Pancasila adalah norma dasar hukum yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan aturan hukum di Indonesia, maka setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Secara lebih spesifik, kedudukan Pancasila dalam sistem hukum nasional dapat dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

▷ Sebagai Norma Hukum yang Mengikat

UUD NRI 1945 bersifat mengikat terhadap seluruh aspek pemerintahan, lembaga negara, serta seluruh warga negara Indonesia. Artinya, setiap kebijakan dan peraturan hukum harus berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI 1945, yang pada dasarnya bersumber dari Pancasila.

▷ Sebagai Sumber Hukum Dasar

Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 merupakan sumber utama bagi semua peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, kebijakan dan aturan hukum yang dibuat harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

▷ Sebagai Alat Kontrol Terhadap Peraturan yang Lebih Rendah

Seluruh peraturan yang ada di bawah UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tetap selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

c. Penerapan Pancasila dalam Peraturan Perundang-undangan

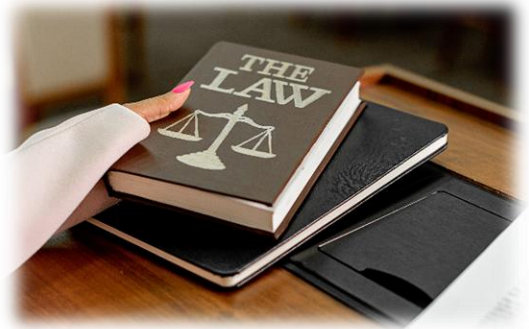
Dalam praktiknya, hubungan antara Pancasila dan peraturan perundang-undangan terlihat dalam berbagai aspek, seperti:

- ▷ Seluruh peraturan hukum yang dibuat harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, baik dalam aspek keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, maupun kesejahteraan sosial.
- ▷ Setiap kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus selaras dengan prinsip Pancasila agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan memiliki legitimasi yang kuat.
- ▷ Jika ditemukan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka peraturan tersebut dapat dibatalkan atau direvisi untuk memastikan kesesuaian dengan norma dasar negara.



Jejak Pancasila

Pancasila berperan sebagai dasar negara sekaligus pedoman utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Seluruh peraturan perundang-undangan harus berakar pada nilai-nilai Pancasila, sebagaimana konsep Grundnorm dari Hans Kelsen yang diterapkan di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perubahan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila agar fondasi hukum dan ketatanegaraan tetap kokoh.



Contoh Soal

Soal 1

Mengapa Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia?

Jawaban & Pembahasan:

Pancasila dianggap sebagai sumber dari segala sumber hukum karena nilai-nilainya menjadi dasar dalam pembentukan hukum di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial dan persatuan bangsa.

Soal 2

Bagaimana hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia?

Jawaban & Pembahasan:

Pancasila merupakan norma dasar (grundnorm) yang menjadi landasan dalam penyusunan UUD NRI Tahun 1945. UUD NRI Tahun 1945 kemudian menjadi hukum tertinggi yang mengatur sistem hukum nasional, sehingga semua peraturan hukum di bawahnya harus sesuai dengan Pancasila.

Kegiatan Kelompok 3

Mengenal, Membandingkan, dan Menganalisis Produk Hukum di Indonesia

Tujuan: Mengidentifikasi jenis produk hukum, memahami hierarki peraturan perundang-undangan, dan menganalisis kesesuaian suatu peraturan dengan prinsip hukum dan nilai-nilai Pancasila.

- 1) Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4–5 peserta didik.
- 2) Lakukan pencarian informasi melalui internet, buku teks, jurnal, atau sumber hukum resmi untuk mengisi tabel berikut secara lengkap dan berdiskusi bersama kelompok.

Jenis Produk Hukum	Lembaga Pembuat	Isi atau Fungsi Utama	Dasar Hukum Lebih Tinggi	Contoh Nyata	Nilai Pancasila yang Terkandung
Undang-Undang Dasar 1945					
Undang-Undang / Perpu					
Peraturan Pemerintah (PP)					
Peraturan Presiden (Perpres)					
Peraturan Daerah (Prov/Kab/Kota)					

- 3) Jawablah pertanyaan diskusi berikut secara tertulis berdasarkan hasil pengisian tabel:
 - a. Mengapa produk hukum harus disusun secara berjenjang
 - b. Apa dampak jika suatu peraturan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
 - c. Bagaimana asas *lex superior* dan *lex specialis* berlaku dalam praktik hukum di Indonesia
 - d. Menurut kelompokmu, apakah seluruh produk hukum di Indonesia telah mencerminkan nilai Pancasila? Jelaskan
 - e. Jika suatu produk hukum dinilai tidak sesuai dengan nilai keadilan, tindakan apa yang bisa diambil oleh warga negara
- 4) Gambarkan bagan struktur hierarki hukum Indonesia secara visual berdasarkan pemikiran Hans Nawiasky.
 - a. Gunakan bentuk bertingkat (seperti piramida atau stupa) dari peraturan tertinggi hingga terendah.
 - b. Cantumkan contoh nyata dari masing-masing produk hukum dan hubungkan dengan sila Pancasila yang relevan.
- 5) Sajikan hasil kerja kelompok secara lisan di depan kelas. Kelompok lain memberikan tanggapan berupa pertanyaan atau masukan terhadap isi dan tampilan presentasi.

Rangkuman

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan berjenjang. Untuk memastikan keteraturan dalam sistem hukum nasional, hierarki peraturan perundang-undangan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, seperti *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*. Hal ini bertujuan agar peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan yang lebih tinggi, serta memberikan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. UU RI No. 12 Tahun 2011 menjadi dasar dalam menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perpu, PP, Perpres, serta Peraturan Daerah. Dengan adanya hierarki ini, hukum di Indonesia dapat berjalan secara sistematis dan tidak menimbulkan kontradiksi antarperaturan.

Selain itu, dalam rangka menjaga keselarasan aturan hukum, diperlukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan lain. Sedangkan sinkronisasi dilakukan agar setiap peraturan dapat saling melengkapi dan tidak tumpang tindih, baik secara vertikal (antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah) maupun horizontal (antara peraturan yang setara dalam hierarki). Dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi, sistem hukum Indonesia dapat berjalan secara efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat.

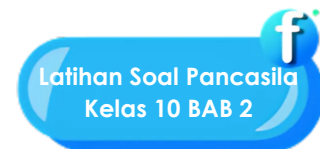
Pancasila memiliki peran fundamental dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai norma dasar (*grundnorm*), Pancasila menjadi sumber utama dalam pembentukan setiap produk hukum di Indonesia. UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, begitu pula dengan peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Dengan demikian, setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tetap mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Keselarasan antara Pancasila dan sistem hukum nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Tanpa adanya kesesuaian dengan Pancasila, peraturan perundang-undangan di Indonesia akan kehilangan dasar filosofisnya, sehingga dapat mengancam stabilitas hukum dan pemerintahan.

Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2011?
 - A. Susunan peraturan yang mengatur kewenangan antara lembaga negara
 - B. Urutan produk hukum yang mengatur pengaturan atas hak dan kewajiban
 - C. Urutan peraturan yang bersumber dari Pancasila
 - D. Sistem pengaturan berdasarkan tingkat keabsahan peraturan
 - E. Tatahan peraturan yang menentukan pengambilan keputusan oleh pemerintah
2. Dalam konteks Pancasila, apa yang dimaksud dengan keadilan sosial seperti yang dijelaskan pada sila kelima?
 - A. Pembagian kekayaan yang adil kepada semua warga negara
 - B. Kesempatan yang setara dalam berpartisipasi di kehidupan politik
 - C. Mewujudkan kesejahteraan bagi setiap warga negara
 - D. Pemberian hak yang sama dalam hukum peradilan
 - E. Penyebaran pembangunan yang merata antar daerah
3. Berdasarkan teori Hans Kelsen, apa yang dimaksud dengan sistem hukum yang tersusun secara hierarkis?
 - A. Hukum yang diciptakan oleh lembaga legislative
 - B. Hukum yang berjenjang dan memiliki norma yang lebih rendah dan lebih tinggi
 - C. Hukum yang memisahkan antara cabang hukum dalam Masyarakat
 - D. Hukum yang hanya berlaku pada satu wilayah atau daerah tertentu
 - E. Hukum yang bersifat absolut dan tidak boleh diubah
4. Menurut Albert Venn Dicey, apa yang menjadi prinsip dasar dalam negara hukum yang mendukung keadilan?
 - A. Supremasi hukum yang mengesampingkan hak asasi manusia
 - B. Hukum yang diatur oleh keputusan politik pemerintah
 - C. Supremasi hukum dan kesetaraan di depan hukum
 - D. Pemberian kebebasan penuh pada individu untuk melanggar hukum
 - E. Pengawasan ketat terhadap lembaga legislatif dan yudikatif
5. Apa tujuan utama dari sinkronisasi peraturan perundang-undangan menurut Syuna (2012)?
 - A. Memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan tidak saling bertentangan
 - B. Menghapuskan peraturan yang sudah tidak berlaku lagi
 - C. Meningkatkan kapasitas lembaga legislatif dalam membuat peraturan
 - D. Menyusun undang-undang yang mendukung pengembangan ekonomi
 - E. Memperkuat kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi

6. Apa perbedaan mendasar antara sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam sistem hukum Indonesia?
- A. Vertikal berfokus pada hubungan antara peraturan di tingkat legislatif dan eksekutif, horizontal pada tingkat pemerintah dan masyarakat
 - B. Vertikal menyelaraskan peraturan di tingkat yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, horizontal antara peraturan pada tingkat yang setara
 - C. Vertikal hanya berlaku pada peraturan yang bersifat federal, horizontal pada tingkat lokal
 - D. Vertikal mengatur perbedaan antar daerah, horizontal berfokus pada hak asasi manusia
 - E. Tidak ada perbedaan antara vertikal dan horizontal dalam sistem hukum Indonesia
7. Mengapa penting untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia?
- A. Untuk mengurangi jumlah peraturan yang dibuat oleh pemerintah
 - B. Agar seluruh produk hukum di Indonesia memiliki isi yang seragam dan sama
 - C. Untuk memastikan bahwa setiap peraturan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya
 - D. Agar setiap negara bagian dapat menentukan peraturan masing-masing
 - E. Untuk memastikan kebebasan penuh bagi setiap individu

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Anwar, dkk. (2022). Prinsip-Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Nasional.
- Bagir Manan (1987). Teori dan Praktik Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Hamid S. Attamimi (1990). Peraturan Perundang-Undangan sebagai Aturan Hukum yang Mengikat. Jakarta: UI Press.
- Hans Kelsen (1961). Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
- Hans Nawiasky (2019). The Stufenbau Theory of Law and Its Application in Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum.
- Herdiawanto, dkk. (2019). Kedudukan Pancasila dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mahendra, dkk. (n.d.). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum Nasional. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Parpworth, Neil (2016). Constitutional & Administrative Law. Oxford: Oxford University Press.
- Sati, dkk. (2019). Sistem Perundang-Undangan dan Hierarki Norma Hukum di Indonesia. Bandung: CV Mandiri Jaya.
- Soehino (1981). Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Syuna, R. (2012). Sinkronisasi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



BAB 3

KEBERAGAMAN SEBAGAI KUNCI PEMBANGUNAN NASIONAL

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Bergotong Royong**
Aktif bekerja sama dalam keberagaman sosial.
- ▷ **Bernalar Kritis**
Menganalisis makna gotong royong secara mendalam.
- ▷ **Kreatif**
Menciptakan solusi adil berbasis gotong royong.

Kata Kunci: Bhinneka Tunggal Ika, Keberagaman, Gotong Royong, Kerja Sama, Toleransi, Ekonomi Pancasila, Pembangunan Nasional, Keadilan Sosial.

Tujuan Pembelajaran: Membangun Sikap Gotong Royong Pancasila

- 1. Menjelaskan Asal-usul dan Makna Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial**
 - ▷ Menyusun pengertian Bhinneka Tunggal Ika.
 - ▷ Memahami peran semboyan tersebut dalam menciptakan kerukunan sosial.
- 2. Menunjukkan Sikap yang Sesuai dengan Prinsip Gotong Royong untuk Membangun Keharmonisan dalam Keberagaman dalam Kehidupan Sehari-hari**
 - ▷ Mengidentifikasi sikap yang mendukung prinsip gotong royong.
 - ▷ Menerapkan sikap gotong royong dalam interaksi sosial yang beragam.

3. Menganalisis Konsep Gotong Royong sebagai Perwujudan Ekonomi Pancasila

- ▷ Memahami hubungan antara gotong royong dan ekonomi yang adil.
- ▷ Menganalisis implementasi ekonomi gotong royong dalam konteks Pancasila.



F I T R I



1. Asal Usul dan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Sejarah dan asal-usul semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Sebagai semboyan nasional Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas. Frasa ini tidak hanya menjadi bagian dari lambang negara Garuda Pancasila, tetapi juga merepresentasikan filosofi persatuan dalam keberagaman yang telah lama menjadi karakter bangsa Indonesia. Namun, tidak banyak yang mengetahui secara mendalam mengenai asal-usul semboyan ini serta bagaimana konsepnya berkembang dalam sejarah.

Dalam perjalanan sejarah bangsa, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki keterkaitan erat dengan peradaban besar Nusantara di masa lampau. Konsep ini pertama kali muncul dalam Kitab Sutasoma, sebuah karya sastra dari abad ke-14 yang ditulis oleh Mpu Tantular, seorang pujangga terkenal di masa pemerintahan Kerajaan Majapahit.

a. Akar Historis dalam Kerajaan Majapahit

Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar di Nusantara yang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk (1350–1389 M), dengan dukungan kuat dari Patih Gajah Mada. Pada masa ini, Majapahit berhasil menyatukan berbagai wilayah Nusantara, menciptakan jaringan kekuasaan yang luas dan beragam dari segi budaya, bahasa, agama, serta tradisi.

Sebagai kerajaan dengan wilayah yang luas, Majapahit menghadapi tantangan besar dalam menjaga persatuan dan stabilitas sosial di tengah masyarakatnya yang heterogen. Keragaman etnis dan agama yang ada di dalam kekuasaan Majapahit memunculkan kebutuhan akan suatu konsep yang mampu menjaga harmoni dan mengikat berbagai elemen masyarakat dalam satu kesatuan.

Di sinilah Mpu Tantular, seorang cendekiawan yang hidup di lingkungan Majapahit, menuangkan gagasan tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Sutasoma. Semboyan ini muncul dalam konteks perbedaan keyakinan antara penganut Hindu-Siwa dan Buddha yang saat itu hidup berdampingan di Majapahit.

Frasa yang tertulis dalam Kitab Sutasoma berbunyi

"Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa."

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah:

"Berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua."

Melalui kutipan ini, Mpu Tantular ingin menegaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan keyakinan, pada dasarnya semua memiliki tujuan yang sama dalam mencapai kebaikan dan kebenaran. Konsep ini kemudian menjadi pegangan dalam kehidupan sosial masyarakat Majapahit, yang kala itu terdiri dari berbagai suku dan pemeluk agama yang berbeda.

Keberagaman yang ada di Majapahit tidak menjadi penghalang bagi persatuan, melainkan dijadikan sebagai sumber kekuatan dalam menjaga stabilitas kerajaan. Dengan adanya filosofi Bhinneka Tunggal

Ika, terciptalah tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati satu sama lain.

b. Transformasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Kenegaraan

Meskipun awalnya merupakan ajaran moral dalam kehidupan sosial masyarakat Majapahit, konsep Bhinneka Tunggal Ika terus berkembang dan akhirnya diadopsi sebagai semboyan resmi negara Indonesia.

Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman luar biasa. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah, Indonesia membutuhkan sebuah filosofi yang dapat menjadi dasar dalam membangun persatuan nasional.

Dalam perjalanannya, istilah Bhinneka Tunggal Ika akhirnya diabadikan dalam lambang negara Garuda Pancasila. Frasa ini terukir pada pita putih yang dicengkeram oleh kaki Garuda, melambangkan bahwa keberagaman merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia.

Menurut buku Bhinneka Tunggal Ika dan Integrasi Nasional yang diterbitkan oleh Pusat Pengkajian MPR RI, istilah Bhinneka Tunggal Ika secara resmi digunakan sebagai semboyan negara dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Sejak saat itu, semboyan ini menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pemahaman Makna Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang telah melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ungkapan ini bukan sekadar kalimat simbolis, melainkan sebuah prinsip yang mencerminkan karakter dasar bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman tetapi tetap dalam satu kesatuan.

a. Makna Filosofis Bhinneka Tunggal Ika

Secara esensial, semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung nilai-nilai toleransi, persatuan, dan kesadaran bahwa perbedaan adalah hal yang alami dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks sejarah, frasa ini pertama kali diperkenalkan oleh Mpu Tantular dalam Kitab Sutasoma, yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit.

Dalam kitab tersebut, Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan upaya menciptakan harmoni di tengah perbedaan keyakinan antara penganut Hindu Siwa dan Buddha. Konsep ini mengajarkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan atau kepercayaan, semua tetap memiliki esensi yang sama.

Secara etimologis, frasa ini terdiri dari tiga kata dalam bahasa Jawa Kuno:

Bhinneka berarti beragam atau berbeda

Tunggal berarti satu atau kesatuan

Ika berarti itu

Dengan demikian, secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika dapat dimaknai sebagai "Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua."

Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip ini mengajarkan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia—baik dari segi suku, budaya, bahasa, agama, maupun adat istiadat—bukanlah hambatan, melainkan sumber kekuatan dalam membangun persatuan nasional.

b. Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Keberagaman di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Keanekaragaman ini tidak hanya mencakup perbedaan suku dan budaya, tetapi juga agama, bahasa, serta nilai sosial yang dianut oleh setiap kelompok masyarakat.

Meskipun perbedaan ini bersifat alami, dalam praktiknya, keberagaman dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika hadir sebagai perekat yang memastikan bahwa perbedaan yang ada tidak menyebabkan perpecahan, tetapi justru memperkuat persatuan.

Dalam masyarakat, penerapan semboyan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

- ▷ Interaksi Sosial: Masyarakat Indonesia tetap saling menghormati meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda.
- ▷ Keagamaan: Toleransi antar umat beragama tetap dijunjung tinggi agar tercipta kehidupan yang harmonis.
- ▷ Budaya dan Adat Istiadat: Setiap daerah memiliki budaya unik yang tetap dihormati sebagai bagian dari identitas nasional.
- ▷ Bahasa: Meskipun terdapat lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi pemersatu yang memperkuat komunikasi antarsuku.



Beragam baju adat – Shutterstock.com/1774579682

c. Pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika di Masa Kini

Seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika mengalami transformasi yang lebih luas. Jika pada masa Majapahit frasa ini lebih banyak dikaitkan dengan harmoni antaragama, maka di era modern, semboyan ini menjadi prinsip dasar dalam membangun kesatuan dalam berbagai aspek kehidupan nasional.

Dalam konteks politik dan pemerintahan, prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan dalam merancang kebijakan yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman. Pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa setiap kelompok masyarakat mendapatkan hak dan kewajiban yang setara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, atau golongan.

Sementara itu, dalam bidang pendidikan, nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika terus ditanamkan melalui sistem pendidikan nasional. Generasi muda diajarkan untuk menghargai keberagaman sejak dini agar tumbuh dengan sikap toleransi dan jiwa kebangsaan yang kuat.

Selain itu, dalam aspek ekonomi dan sosial, keberagaman dijadikan sebagai modal sosial yang dapat mendukung pembangunan nasional. Contohnya, sektor pariwisata dan industri kreatif memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia untuk menarik wisatawan dan menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.

Namun, di tengah era digital dan globalisasi, tantangan dalam menjaga keberagaman tetap ada. Munculnya fenomena polarisasi sosial, berita hoaks, serta perpecahan akibat perbedaan pandangan politik atau agama menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif untuk kembali mengamalkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Perekat Bangsa

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai perekat dalam membangun harmoni sosial. Dalam berbagai situasi, semboyan ini membantu menjaga stabilitas nasional dan mencegah konflik sosial yang dapat timbul akibat perbedaan.

Sebagai contoh, keberagaman budaya yang ada di Indonesia menciptakan keindahan tersendiri, sebagaimana bunga-bunga yang berwarna-warni tetapi tetap membentuk taman yang harmonis. Keberagaman inilah yang justru membuat Indonesia kaya akan nilai, tradisi, dan kearifan lokal yang bisa dijadikan modal dalam membangun negara yang lebih maju.

Selain itu, Bhinneka Tunggal Ika juga mempertegas bahwa tidak ada konsep homogenitas absolut dalam ruang publik. Baik dalam konteks komunitas masyarakat maupun dalam skala nasional, setiap individu memiliki perbedaan yang harus dihormati dan diterima sebagai bagian dari keberagaman yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Untuk memastikan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika tetap hidup dalam masyarakat, perlu diterapkan beberapa langkah konkret, seperti:

- ▷ Menjaga sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan.
- ▷ Memperkuat kesadaran nasionalisme agar setiap warga negara merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa.
- ▷ Meningkatkan dialog antarbudaya dan antaragama guna membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap keberagaman.
- ▷ Mencegah segala bentuk diskriminasi, intoleransi, dan sikap eksklusivisme yang dapat merusak harmoni sosial.
- ▷ Menanamkan nilai-nilai persatuan dan toleransi dalam pendidikan untuk membangun generasi yang lebih inklusif dan berpikiran terbuka.

Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Bagian Penting Dari Lambang Negara

Sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia membutuhkan simbol yang mencerminkan persatuan di tengah perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan yang menegaskan bahwa meskipun berbeda-beda, rakyat Indonesia tetap bersatu dalam satu kesatuan bangsa.

Keberadaan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi filosofi dalam kehidupan sosial, tetapi juga diabadikan dalam lambang negara Garuda Pancasila. Penyertaan semboyan ini dalam lambang negara menegaskan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang harus dirawat dan dijaga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

a. Sejarah Penyertaan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Lambang Negara

Sebagai negara dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa, Indonesia membutuhkan simbol yang mencerminkan persatuan dalam perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", menjadi semboyan yang menegaskan bahwa keberagaman adalah kekuatan, bukan penghalang. Semboyan ini kemudian dijadikan bagian penting dari lambang negara Garuda Pancasila, yang mencerminkan identitas dan karakter bangsa Indonesia yang tetap bersatu dalam kebhinekaan.

1) Awal Konsep Lambang Negara Indonesia

Pasca kemerdekaan, Indonesia memerlukan lambang negara yang mampu mencerminkan identitas, karakter, serta nilai-nilai yang mendasari persatuan bangsa. Salah satu tokoh yang

berperan penting dalam perancangan lambang negara adalah Sultan Hamid II, seorang tokoh dari Kalimantan Barat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai simbolisme dan heraldik (ilmu lambang).

Pada saat itu, Presiden Soekarno menyampaikan gagasan bahwa lambang negara harus memiliki elemen yang kuat, menggambarkan kepribadian bangsa, serta memuat Pancasila sebagai ideologi utama negara. Selain itu, Muhammad Yamin, salah satu tokoh nasional dan anggota BPUPK, mengusulkan agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika turut dicantumkan dalam lambang negara sebagai representasi dari keberagaman yang tetap bersatu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2) Proses Perancangan Garuda Pancasila



Monumen Pancasila Flores – Shutterstock.com/2158614891

Dalam prosesnya, Sultan Hamid II merancang berbagai sketsa lambang negara yang kemudian disempurnakan oleh Soekarno dan tim perancang lainnya. Setelah melewati berbagai penyempurnaan, akhirnya Garuda Pancasila diresmikan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Di dalam desain final, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditempatkan pada pita yang dicengkeram oleh burung Garuda, menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman, tetapi tetap bersatu dalam satu kesatuan yang utuh.

Keberadaan Bhinneka Tunggal Ika dalam Garuda Pancasila kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951, yang menjelaskan struktur dan makna setiap elemen dalam lambang negara.

b. Struktur dan Makna Lambang Negara Garuda Pancasila

Lambang negara Garuda Pancasila terdiri dari beberapa unsur utama yang memiliki makna filosofis mendalam. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam lambang negara dan maknanya:

1) Burung Garuda sebagai Simbol Kekuatan dan Kedaulatan

Burung Garuda dipilih sebagai lambang negara karena memiliki akar yang kuat dalam mitologi Nusantara, khususnya dalam cerita-cerita Hindu dan Buddha yang berkembang di kerajaan-kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit. Garuda melambangkan:

- ▷ Kekuatan dan keperkasaan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan.

- ▷ Kecepatan dan ketegasan dalam bertindak, sebagaimana burung Garuda yang dikenal sebagai burung perkasa dalam mitologi.
- ▷ Kemandirian dan kebebasan, mencerminkan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat.
- ▷ Garuda yang menoleh ke kanan melambangkan bahwa bangsa Indonesia selalu menjunjung nilai-nilai kebenaran dalam setiap pengambilan keputusan.

2) Perisai di Dada Garuda

Perisai yang terdapat di dada Garuda melambangkan pertahanan dan ketahanan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Di dalam perisai tersebut terdapat lima simbol utama, yang masing-masing menggambarkan lima sila dalam Pancasila:

- ▷ Bintang emas: Melambangkan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa."
- ▷ Rantai emas: Melambangkan sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."
- ▷ Pohon beringin: Melambangkan sila ketiga, "Persatuan Indonesia."
- ▷ Kepala banteng: Melambangkan sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."
- ▷ Padi dan kapas: Melambangkan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia."

Selain itu, perisai di dada Garuda juga memiliki garis hitam tebal yang membelah perisai secara horizontal, melambangkan garis khatulistiwa yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara tropis yang berada di sekitar garis ekuator.

3) Pita Bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika

Pada bagian bawah lambang negara, terdapat pita berwarna putih yang dicengkeram oleh kaki Garuda, bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Makna dari pita ini adalah sebagai pengingat bahwa meskipun Indonesia memiliki keberagaman dalam berbagai aspek—baik suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat—bangsa ini tetap satu dan tidak terpecah-belah.

c. Dasar Hukum dan Legalitas Penggunaan Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara

Keberadaan Garuda Pancasila sebagai lambang negara telah diatur secara legal dalam berbagai regulasi. Beberapa peraturan yang mengatur tentang lambang negara antara lain:

1) Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 66 Tahun 1951

Mengatur secara khusus mengenai elemen-elemen yang terdapat dalam Garuda Pancasila, termasuk Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari pita yang dicengkeram oleh Garuda.

2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009

Undang-undang ini mengatur tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dijelaskan bahwa:

- ▷ Bentuk lambang negara adalah Garuda Pancasila, dengan kepala menoleh ke kanan.
- ▷ Perisai di dada Garuda menggambarkan lima sila dalam Pancasila.
- ▷ Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus selalu dicantumkan dalam pita yang dicengkeram oleh Garuda.
- ▷ Jumlah bulu Garuda disesuaikan dengan angka-angka yang mencerminkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jumlah bulu pada Garuda adalah sebagai berikut:

- 17 helai bulu di setiap sayap: Melambangkan tanggal 17 (hari proklamasi kemerdekaan).
- 8 helai bulu di ekor: Melambangkan bulan Agustus (bulan ke-8).
- 19 helai bulu di pangkal ekor: Melambangkan tahun 1945.
- 45 helai bulu di leher: Melambangkan tahun 1945 sebagai tahun kemerdekaan Indonesia.



Jejak Pancasila

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* bukan hanya menjadi simbol negara, tetapi juga pedoman hidup dalam masyarakat yang beragam. Di tengah perbedaan suku, agama, dan bahasa, kita tetap bisa hidup damai, saling menghormati, dan bersama-sama membangun negeri. Keberagaman ini tak hanya terasa dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dirayakan melalui berbagai festival budaya dari Sabang sampai Merauke. Artinya, *Bhinneka Tunggal Ika* bukan sekadar kalimat indah, melainkan bagian nyata dari warna kehidupan bangsa Indonesia.



Contoh Soal

Soal 1

Siapakah tokoh yang pertama kali mencetuskan konsep "Bhinneka Tunggal Ika" dalam sejarah Nusantara?

- A. Gajah Mada
- B. Hayam Wuruk
- C. Mpu Tantular
- D. Raden Wijaya
- E. Patih Udara

Jawaban yang benar: C. Mpu Tantular

Pembahasan:

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* pertama kali diperkenalkan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, Mpu Tantular mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan di masyarakat, tetap ada kesatuan dan keharmonisan yang harus dijaga. Frasa ini kemudian diadopsi sebagai semboyan negara Indonesia untuk menegaskan persatuan dalam keberagaman.

Soal 2

Apa makna utama dari semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* bagi bangsa Indonesia?

- A. Keberagaman harus dihapus demi kesatuan negara

- B. Semua warga negara harus memiliki budaya yang sama
- C. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa
- D. Indonesia harus menjadi negara yang seragam dalam segala aspek
- E. Keanekaragaman hanya terjadi di bidang budaya, bukan dalam kehidupan sosial

Jawaban yang benar: C. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa

Pembahasan:

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa. Konsep ini menjadi dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan.

Kegiatan Kelompok 1

Membongkar Makna dan Perjalanan Bhinneka Tunggal Ika

Tujuan: Menumbuhkan pemahaman mendalam tentang sejarah, makna, dan relevansi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa.

- 1) Bentuk kelompok terdiri atas 4–5 peserta didik.
- 2) Setiap kelompok akan membagi tugas anggotanya menjadi 4 peran:
 - a. Sejarawan: Menelusuri asal-usul dan konteks sejarah Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Filosof: Menjelaskan makna filosofis dan nilai-nilai dalam semboyan tersebut.
 - c. Pengamat Sosial: Menganalisis penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masa kini.
 - d. Perancang Simbol: Meneliti makna lambang negara dan menjelaskan hubungan Bhinneka Tunggal Ika dalam Garuda Pancasila.
- 3) Isi Tabel Analisis berikut melalui diskusi dalam kelompok berdasarkan peran masing-masing. Setiap kolom wajib diisi lengkap.

Peran Anggota	Pertanyaan Kunci	Temuan/Pemahaman Kelompok	Contoh Aktual atau Visualisasi
Sejarawan	Di mana dan kapan muncul pertama kali frasa Bhinneka Tunggal Ika?		
Filosof	Apa makna "Tan Hana Dharma Mangrwa"?		
Pengamat Sosial	Bagaimana semboyan ini diterapkan dalam masyarakat majemuk saat ini?		
Perancang Simbol	Mengapa frasa ini diletakkan di lambang negara Garuda Pancasila?		

- 4) Setelah mengisi tabel, buatlah satu ringkasan narasi (maks. 150 kata) yang menjawab pertanyaan: "Mengapa Bhinneka Tunggal Ika tetap relevan sebagai semboyan bangsa Indonesia di era sekarang?"
- 5) Sajikan hasil analisis kelompok dalam bentuk:

- a. Poster ringkas yang memuat visualisasi Garuda Pancasila, kutipan Kitab Sutasoma, serta rangkuman makna modern Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Presentasi singkat (maks. 5 menit) di depan kelas.
- 6) Refleksi Akhir (Individu):
- Tiap anggota kelompok menulis 3 kalimat refleksi pribadi tentang makna Bhinneka Tunggal Ika bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari.



2. Bhinneka Tunggal Ika sebagai Modal Sosial

Sebagai semboyan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menggambarkan keberagaman yang ada di Indonesia, tetapi juga menjadi modal sosial yang memperkuat persatuan dan kesatuan. Keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan apabila masyarakat mampu menjunjung tinggi nilai toleransi, gotong royong, serta saling menghormati. Dengan adanya kesadaran bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tetapi justru sebuah kekayaan bangsa, maka Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai alat pemersatu yang memperkuat interaksi sosial antarindividu dan kelompok.

Modal sosial yang terbentuk dari semangat Bhinneka Tunggal Ika berperan dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan memiliki solidaritas tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, seperti dalam musyawarah untuk mencapai mufakat, kerja sama dalam pembangunan daerah, serta toleransi dalam perbedaan keyakinan. Dengan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial, bangsa Indonesia dapat terus menjaga stabilitas sosial dan memperkuat integrasi nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.

Pentingnya Memahami Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia



Keberagaman – pinterest.com

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama yang sangat luas. Keberagaman ini merupakan hasil dari sejarah panjang interaksi antar kelompok masyarakat, pengaruh perdagangan dengan bangsa lain, serta letak geografis Indonesia yang strategis.

Agar keberagaman ini tetap menjadi modal sosial yang memperkuat persatuan, penting bagi setiap individu untuk memahami dan menghargai perbedaan yang ada. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai serta bekerja sama dalam membangun bangsa yang lebih maju dan harmonis.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang menyebabkan keberagaman di Indonesia:

a. Faktor Penyebab Keberagaman di Indonesia

- 1) Letak Geografis yang Beragam

Indonesia terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, yang menyebabkan setiap wilayah memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda.

- ▷ Perbedaan kondisi lingkungan: Masyarakat pesisir cenderung memiliki budaya yang lebih terbuka dan bersifat maritim, sementara masyarakat pedalaman lebih tertutup dan bergantung pada pertanian atau perkebunan.
- ▷ Perbedaan sumber daya alam: Daerah yang kaya akan hasil laut seperti Sulawesi dan Maluku memiliki budaya nelayan yang kuat, sedangkan daerah seperti Sumatra dan Kalimantan lebih dikenal dengan budaya pertanian dan perkebunan.

2) Sejarah Perdagangan dan Migrasi

Sejak zaman dahulu, Indonesia menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan berbagai peradaban, seperti India, Arab, Tiongkok, dan Eropa. Hal ini menyebabkan:

- ▷ Masuknya agama dan budaya dari luar, seperti Islam, Hindu, Buddha, dan Kristen, yang kemudian berakulturasi dengan budaya lokal.
- ▷ Interaksi antarsuku dan bangsa, yang menyebabkan munculnya masyarakat multikultural di beberapa wilayah, seperti Melayu-Tionghoa di Sumatra, Arab-Bugis di Sulawesi, dan sebagainya.

3) Keberagaman Suku dan Bahasa

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan hingga saat ini. Beberapa contoh keberagaman suku di Indonesia antara lain:

- ▷ Suku Jawa: Mayoritas berada di Pulau Jawa dan memiliki budaya yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha serta Islam.
- ▷ Suku Batak: Dikenal dengan sistem kekerabatan yang kuat dan budaya adat yang masih dipertahankan hingga sekarang.
- ▷ Suku Dayak: Mayoritas tinggal di Kalimantan dengan tradisi rumah panjang dan kepercayaan lokal yang masih bertahan.
- ▷ Suku Papua: Memiliki budaya yang sangat khas dengan sistem sosial yang erat dengan kehidupan alam.

4) Pengaruh Agama dan Kepercayaan Lokal

Indonesia mengakui enam agama resmi yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu, beberapa daerah juga masih memiliki kepercayaan lokal yang berkembang sebelum masuknya agama-agama besar.

Perbedaan keyakinan ini menciptakan tradisi keagamaan yang beragam, seperti perayaan Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu di Bali, perayaan Waisak bagi umat Buddha, dan berbagai upacara adat keagamaan lainnya.

Sikap toleransi menjadi kunci dalam menjaga keberagaman ini, agar tidak terjadi konflik berbasis agama.

b. Tantangan dalam Mengelola Keberagaman

Keberagaman di Indonesia dapat menjadi sumber kekuatan tetapi juga dapat menjadi pemicu konflik jika tidak dikelola dengan baik. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam masyarakat yang beragam antara lain:

- 1) Konflik Sosial yang Berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan)

Ketegangan antar kelompok masyarakat sering kali dipicu oleh perbedaan identitas etnis, agama, atau ras.

Sikap eksklusif dan fanatisme berlebihan terhadap kelompok sendiri dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok lain.

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial dapat memperburuk situasi dan meningkatkan potensi konflik.

2) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketidakseimbangan dalam pembangunan daerah menyebabkan kecemburuan sosial antara wilayah yang maju dan yang tertinggal.

Akses pendidikan dan kesehatan yang tidak merata membuat sebagian kelompok masyarakat merasa diabaikan oleh negara.

Lapangan pekerjaan yang tidak merata sering kali menyebabkan urbanisasi besar-besaran, yang dapat memicu permasalahan sosial di kota-kota besar.

3) Primordialisme dan Etnosentrisme

Sikap primordialisme adalah kecenderungan seseorang untuk lebih mengutamakan kelompoknya sendiri dibandingkan dengan kepentingan bangsa.

Etnosentrisme adalah anggapan bahwa budaya atau nilai kelompok sendiri lebih baik dibandingkan kelompok lain, yang sering kali menyebabkan sikap diskriminatif.

c. Keberagaman sebagai Modal Sosial untuk Membangun Persatuan

Meskipun keberagaman memiliki tantangan tersendiri, keberagaman juga bisa menjadi modal sosial yang kuat jika dikelola dengan baik. Modal sosial dalam keberagaman dapat diwujudkan melalui:

1) Menanamkan Sikap Toleransi

Toleransi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial, pendidikan, maupun dunia kerja.

Pendidikan multikultural harus diajarkan sejak dini, agar generasi muda terbiasa dengan keberagaman dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa.

2) Mengedepankan Gotong Royong dalam Masyarakat

Gotong royong merupakan budaya asli Indonesia yang menjadi dasar dalam membangun kerja sama antar kelompok masyarakat.

Dengan semangat gotong royong, perbedaan yang ada dapat dilebur menjadi kekuatan kolektif dalam membangun bangsa yang lebih maju.

3) Mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pemerintah harus memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, agar tidak ada daerah yang merasa tertinggal.

Kesetaraan dalam akses pendidikan dan kesehatan harus dijamin, agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Upaya Meningkatkan Kesadaran Akan Keberagaman

Untuk memastikan bahwa keberagaman tetap menjadi modal sosial yang memperkuat bangsa, perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:

▷ Pendidikan Multikultural

Sekolah harus menjadi tempat untuk menanamkan nilai-nilai keberagaman, agar siswa memiliki pemahaman yang lebih luas tentang budaya dan adat istiadat dari berbagai daerah.

Mata pelajaran sejarah dan kewarganegaraan perlu dikembangkan, agar generasi muda memahami bagaimana keberagaman telah menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia.

▷ Penguatan Peran Media dalam Menyebarkan Pesan Persatuan

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik, sehingga harus digunakan untuk menyebarkan pesan kebersamaan dan toleransi.

Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian harus diberantas, agar tidak menjadi alat provokasi yang memperburuk hubungan antar kelompok masyarakat.

Toleransi Terhadap Perbedaan Norma, Suku, Agama, Ras, Dan Golongan

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu memiliki norma dan nilai yang berbeda sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan lingkungan sosialnya. Keberagaman norma ini menjadi bagian dari dinamika kehidupan sosial yang harus dikelola dengan sikap saling menghormati dan memahami. Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia mengajarkan pentingnya sikap toleransi dalam menerima perbedaan, termasuk dalam aspek norma yang dianut oleh berbagai kelompok masyarakat.

Toleransi terhadap perbedaan norma menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Dengan sikap saling menghargai, masyarakat dapat hidup berdampingan tanpa memaksakan norma atau nilai tertentu kepada orang lain. Sikap ini tidak hanya mencerminkan kedewasaan sosial, tetapi juga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, di mana setiap individu memiliki ruang untuk menjalankan norma yang diyakini tanpa mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

a. Toleransi terhadap Perbedaan Norma



Toleransi beragama – Shutterstock.com/2450222525

Dalam kehidupan bermasyarakat, norma berfungsi sebagai pedoman yang mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sosial tertentu. Norma ini mencerminkan aturan tak tertulis yang berkembang berdasarkan adat, kebiasaan, serta pandangan hidup masyarakat. Keberagaman norma dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu keniscayaan karena setiap kelompok masyarakat memiliki kebiasaan dan aturan yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya serta nilai yang dianut.

1) Pengertian Norma dan Jenis-jenisnya

Secara umum, norma adalah seperangkat aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Norma berfungsi sebagai rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan norma sosial yang berkembang menjadi beragam, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di setiap daerah. Norma dalam masyarakat dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

- ▷ Norma Adat: Aturan yang berkembang berdasarkan kebiasaan dan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Misalnya, dalam beberapa suku di Indonesia, masih terdapat adat istiadat yang mengatur tata cara pernikahan, pembagian warisan, serta upacara keagamaan.
- ▷ Norma Kesopanan: Mengatur bagaimana seseorang harus bersikap dalam lingkungan sosial, seperti cara berbicara, berpakaian, atau berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, dalam budaya Jawa, seseorang diajarkan untuk berbicara dengan lemah lembut dan sopan kepada orang yang lebih tua.
- ▷ Norma Kesusilaan: Mengacu pada nilai moral yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan etika dan akhlak yang baik, seperti larangan berbohong, mencuri, atau melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
- ▷ Norma Agama: Berasal dari ajaran agama dan mengatur bagaimana umat harus menjalankan keyakinan mereka, seperti kewajiban beribadah, larangan berbuat jahat, dan perintah untuk berbuat kebaikan.
- ▷ Norma Hukum: Norma yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi yang jelas apabila dilanggar, misalnya undang-undang lalu lintas atau peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia.

Perbedaan norma yang berkembang di berbagai daerah membuat setiap individu perlu memahami dan menghormati keberagaman norma yang ada, agar dapat hidup berdampingan secara harmonis tanpa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman.

2) Pentingnya Toleransi terhadap Keberagaman Norma

Dalam kehidupan sehari-hari, individu dari berbagai latar belakang budaya sering kali berinteraksi satu sama lain. Perbedaan norma dalam masyarakat bisa menimbulkan gesekan sosial jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, sikap toleransi menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling menghormati. Beberapa alasan mengapa toleransi terhadap perbedaan norma itu penting, antara lain:

▷ Mencegah Konflik Sosial

Perbedaan norma sering kali menjadi pemicu kesalahpahaman antara kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Dengan adanya toleransi, masyarakat bisa lebih memahami perbedaan tersebut dan menghindari konflik.

▷ Membangun Sikap Saling Menghormati

Dengan memahami bahwa setiap kelompok memiliki aturan dan kebiasaan yang berbeda, individu dapat lebih menghormati cara hidup orang lain tanpa merasa lebih unggul atau lebih benar dari yang lain.

▷ Menjaga Ketertiban dan Keharmonisan Sosial

Norma berfungsi untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Jika seseorang menghormati norma yang berlaku di suatu daerah, maka ketertiban sosial dapat tetap terjaga dan tidak ada gesekan yang dapat mengganggu keharmonisan.

Meningkatkan Rasa Solidaritas dan Persatuan

Sikap saling menghargai terhadap perbedaan norma akan memperkuat persatuan dalam masyarakat yang multikultural. Ketika individu merasa dihormati dalam keberagaman, mereka lebih cenderung bekerja sama dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik.

3) Bentuk Implementasi Toleransi terhadap Keberagaman Norma

Untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, sikap toleransi terhadap keberagaman norma dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku, di antaranya:

▷ Tidak Memandang Rendah Norma dan Kebiasaan yang Berbeda

Setiap kelompok masyarakat memiliki norma yang berbeda-beda, tetapi bukan berarti satu norma lebih baik daripada yang lain. Penting untuk memahami bahwa norma berkembang berdasarkan kebutuhan dan konteks sosial masyarakat setempat.

▷ Tidak Memaksakan Suatu Norma kepada Kelompok Lain

Setiap individu atau kelompok memiliki hak untuk mempertahankan norma dan kebiasaannya sendiri. Memaksakan norma dari satu kelompok kepada kelompok lain hanya akan menimbulkan penolakan dan ketegangan sosial.

▷ Meyakini bahwa Setiap Norma dan Kebiasaan Memiliki Nilai bagi Penganutnya

Norma yang berlaku dalam suatu masyarakat pasti memiliki nilai-nilai tertentu yang dianggap penting oleh para penganutnya. Oleh karena itu, menghargai norma orang lain merupakan bentuk penghormatan terhadap keyakinan dan budaya mereka.

▷ Menghargai dan Menghormati Perbedaan Norma yang Berlaku di Daerah Lain

Ketika seseorang berada di lingkungan dengan norma yang berbeda, ia harus bisa menyesuaikan diri tanpa meremehkan aturan yang berlaku di tempat tersebut.

▷ Berusaha Beradaptasi dengan Norma yang Berlaku di Lingkungan Baru

Jika seseorang berpindah ke daerah dengan budaya yang berbeda, penting untuk mempelajari dan memahami norma yang berlaku di daerah tersebut agar dapat berbaur dengan masyarakat setempat.

▷ Mengutamakan Dialog dalam Menghadapi Perbedaan Norma

Jika terjadi perbedaan pandangan mengenai suatu norma, maka dialog dan diskusi yang sehat harus menjadi cara utama dalam menyelesaikan perbedaan, bukan dengan konfrontasi atau pemaksaan kehendak.

4) Contoh Toleransi terhadap Keberagaman Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

Sikap toleransi terhadap keberagaman norma dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam skala kecil maupun besar. Beberapa contoh nyata dari penerapan toleransi terhadap norma adalah:

▷ Dalam lingkungan sekolah

Siswa yang berasal dari daerah yang berbeda memiliki kebiasaan yang berbeda pula. Misalnya, di beberapa daerah, siswa terbiasa berbicara dengan nada yang lebih tinggi, sementara di daerah lain berbicara dengan nada lebih halus. Siswa yang berasal dari budaya berbeda harus saling menghargai cara berbicara satu sama lain.

▷ Dalam kehidupan bertetangga

Setiap daerah memiliki kebiasaan dalam berinteraksi dengan tetangga. Di beberapa daerah, masyarakat terbiasa berkumpul di luar rumah untuk bersosialisasi, sementara di daerah lain masyarakat lebih menjaga privasi. Seseorang yang pindah ke daerah dengan kebiasaan berbeda harus bisa menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku.

▷ Dalam lingkungan kerja

Di tempat kerja, karyawan berasal dari berbagai latar belakang budaya dan memiliki cara kerja yang berbeda. Misalnya, dalam beberapa budaya, bekerja secara individual lebih dihargai, sementara di budaya lain kerja tim lebih diutamakan. Dengan memahami perbedaan ini, kolaborasi kerja bisa berjalan dengan lebih baik.

▷ Dalam perayaan hari besar keagamaan atau adat

Ketika seseorang menghadiri acara keagamaan atau adat dari kelompok lain, penting untuk mengikuti norma yang berlaku dalam acara tersebut, seperti berpakaian sopan dan mengikuti tata cara yang telah ditentukan.

b. Toleransi Dalam Agama Yang Beragama



Toleransi beragama – Pinterest.com

Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman dalam hal keyakinan dan kepercayaan. Kebebasan beragama telah dijamin dalam Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak setiap warga negara dalam menjalankan ibadah serta mengamalkan ajaran agamanya dengan bebas dan aman.

Namun, di tengah keberagaman agama yang ada, toleransi menjadi prinsip utama yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan toleransi, masyarakat dapat hidup berdampingan

dalam suasana damai tanpa saling mengganggu atau memaksakan keyakinan satu sama lain. Toleransi beragama mencerminkan sikap saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda, baik dalam menjalankan ibadah, perayaan hari besar keagamaan, maupun dalam kehidupan sosial lainnya.

1) Pentingnya Toleransi dalam Keberagaman Agama

▷ Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama

Sikap saling menghargai dan menghormati ajaran agama lain akan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan adanya kerukunan, kehidupan bermasyarakat akan lebih damai dan terhindar dari konflik.

▷ Mencegah Konflik dan Fanatisme Berlebihan

Salah satu penyebab perpecahan dalam masyarakat adalah fanatisme yang berlebihan terhadap agama sendiri, sehingga menimbulkan sikap eksklusif yang meremehkan pemeluk agama lain. Toleransi mencegah hal ini dengan membangun pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan kebaikan.

▷ Menegaskan Identitas Bangsa yang Multikultural

Sebagai negara dengan enam agama yang diakui secara resmi, Indonesia harus menjadi contoh dalam menjaga keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan.

▷ Memperkuat Solidaritas Sosial

Dengan menghargai perbedaan agama, masyarakat dapat bersatu dalam membantu sesama, terutama dalam menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan, bencana alam, dan krisis kemanusiaan.

2) Cara Menunjukkan Sikap Toleransi dalam Keberagaman Agama

Toleransi dalam beragama dapat diterapkan dalam berbagai bentuk tindakan nyata, di antaranya:

▷ Membangun dialog antar umat beragama

Berpartisipasi dalam diskusi atau kegiatan lintas agama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman antar umat beragama.

▷ Menghormati peribadatan agama lain

Tidak mengganggu kegiatan ibadah pemeluk agama lain, misalnya dengan menjaga ketenangan saat ada yang sedang beribadah.

▷ Menghargai perbedaan keyakinan

Tidak memaksakan ajaran agama sendiri kepada orang lain atau menganggap rendah keyakinan agama yang berbeda.

▷ Bersedia bekerja sama dengan orang dari agama yang berbeda

Menjalin hubungan sosial yang baik dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama.

▷ Menghormati perayaan hari besar agama lain

Ikut mengucapkan selamat pada hari raya agama lain sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan.

- ▷ Mencegah penyebaran ujaran kebencian terkait agama
- Tidak menyebarkan berita palsu (hoaks) atau provokasi yang dapat memicu perpecahan antar umat beragama.

3) Contoh Toleransi dalam Keberagaman Agama

- ▷ Seorang Muslim yang tinggal di lingkungan mayoritas non-Muslim tetap diberi kebebasan untuk menjalankan ibadahnya tanpa gangguan.
- ▷ Umat Kristen yang sedang melaksanakan ibadah di gereja tidak diganggu oleh warga sekitar yang berbeda agama.
- ▷ Warga yang berbeda agama tetap bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong membersihkan lingkungan.
- ▷ Pada hari besar keagamaan, warga saling memberikan ucapan selamat meskipun mereka berbeda keyakinan.

c. Toleransi dalam Keberagaman Suku Bangsa dan Ras

Indonesia terdiri dari lebih dari 1.300 suku bangsa dan berbagai kelompok ras yang hidup berdampingan di seluruh wilayah Nusantara. Keanekaragaman ini menjadi identitas bangsa dan merupakan bagian dari kekuatan dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap suku dan ras memiliki karakteristik unik, baik dalam budaya, adat istiadat, bahasa, maupun nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.

1) Alasan Mengapa Toleransi terhadap Keberagaman Suku dan Ras Itu Penting

- ▷ Menjaga Kesatuan dan Persatuan Bangsa

Keberagaman suku bangsa dan ras harus menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Dengan sikap toleransi, setiap kelompok masyarakat dapat hidup berdampingan secara harmonis.
- ▷ Mencegah Diskriminasi dan Sentimen Etnis

Diskriminasi berbasis suku dan ras dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan merusak hubungan antarmasyarakat. Toleransi mengajarkan bahwa semua suku bangsa memiliki hak yang sama.
- ▷ Mengurangi Konflik Antar Suku dan Ras

Sejarah mencatat bahwa konflik antarsuku sering terjadi akibat perbedaan budaya dan kepentingan. Dengan sikap toleransi, konflik ini dapat diminimalkan dan diselesaikan dengan cara damai.
- ▷ Memperkaya Budaya Nasional

Setiap suku memiliki seni, tarian, musik, serta kuliner khas yang memperkaya kebudayaan nasional. Dengan sikap saling menghargai, keberagaman ini akan tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

2) Bentuk Sikap Toleransi terhadap Keberagaman Suku dan Ras

- ▷ Mau bekerja sama dengan orang dari suku dan ras lain.
- ▷ Tidak memilih-milih teman, kolega, atau rekan kerja berdasarkan suku atau ras tertentu.
- ▷ Menjunjung tinggi nilai persaudaraan dan kemanusiaan.

- ▷ Memperlakukan semua orang dengan baik, tanpa memandang asal-usulnya.
- ▷ Mengakui persamaan derajat setiap suku dan ras.
- ▷ Setiap individu, apa pun sukunya, memiliki hak yang sama di mata hukum dan masyarakat.
- ▷ Melaksanakan hak dan kewajiban yang sama dengan orang dari suku dan ras yang berbeda.
- ▷ Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat tanpa merasa lebih unggul atau lebih rendah dari kelompok lain.
- ▷ Menghargai serta menghormati adat, kebiasaan, dan budaya suku serta ras yang berbeda.
- ▷ Menghormati tradisi dan adat istiadat daerah lain tanpa meremehkan atau menganggapnya aneh.

3) Contoh Toleransi dalam Keberagaman Suku dan Ras

- ▷ Seorang mahasiswa dari Papua yang kuliah di Jakarta diterima dengan baik oleh teman-temannya yang berasal dari suku lain.
- ▷ Dalam acara pernikahan adat, masyarakat dari berbagai suku ikut hadir dan menghormati prosesi pernikahan yang berlangsung sesuai dengan adat daerah tersebut.
- ▷ Tim olahraga nasional Indonesia terdiri dari atlet yang berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda, tetapi tetap bersatu demi nama bangsa.
- ▷ Masyarakat dari berbagai suku bekerja sama dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti dan acara keagamaan, tanpa membedakan asal-usul mereka.

d. Toleransi Terhadap Perbedaan Golongan



Perbedaan Golongan – freepik.com

Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai golongan sosial, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Golongan sosial adalah kelompok dalam masyarakat yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu, seperti pekerjaan, latar belakang ekonomi, tingkat pendidikan, atau kepentingan tertentu. Keberadaan golongan sosial dalam masyarakat merupakan realitas yang tidak dapat dihindari dan telah menjadi bagian dari kehidupan sosial sejak lama.

Setiap golongan memiliki identitas dan ciri khasnya sendiri, yang sering kali terbentuk karena kesadaran kolektif di dalam kelompok tersebut. Misalnya, golongan profesional seperti dokter, guru, pengacara, dan insinyur memiliki aturan dan kode etik khusus yang mengatur cara mereka menjalankan profesinya. Begitu pula dengan golongan pemuda, petani, buruh, dan pengusaha, yang masing-masing memiliki peran serta dalam dinamika sosial dan ekonomi negara.

Namun, perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu diskriminasi atau konflik sosial. Sikap toleransi antar golongan sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis serta menghindari kesenjangan yang dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat.

1) Alasan Mengapa Toleransi terhadap Perbedaan Golongan Itu Penting

Toleransi dalam keberagaman golongan bertujuan untuk membangun kesetaraan dan harmoni sosial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa toleransi terhadap perbedaan golongan sangat penting:

▷ Menghindari Diskriminasi dan Ketimpangan Sosial

Perbedaan status sosial dapat memunculkan diskriminasi, baik dalam kesempatan kerja, akses pendidikan, maupun pelayanan publik. Dengan adanya toleransi, setiap individu diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.

▷ Menjaga Keharmonisan dalam Masyarakat

Ketimpangan sosial sering kali menjadi pemicu konflik antar golongan. Toleransi dapat membantu mengurangi kesalahpahaman antar kelompok dan membangun hubungan yang lebih harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

▷ Meningkatkan Solidaritas dan Saling Membantu

Setiap golongan dalam masyarakat memiliki peran masing-masing yang saling melengkapi. Dengan sikap toleransi, kerja sama antar golongan dapat terjalin, sehingga pembangunan sosial dan ekonomi dapat berjalan lebih baik.

▷ Membangun Rasa Saling Menghormati

Keberagaman golongan tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, tetapi justru menjadi modal sosial yang memperkaya kehidupan bermasyarakat. Setiap golongan harus menghargai keberadaan golongan lain tanpa merasa lebih unggul atau lebih rendah.

2) Cara Menerapkan Sikap Toleransi terhadap Keberagaman Golongan

Toleransi antar golongan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap dan tindakan nyata, seperti:

▷ Menghormati dan Menghargai Golongan Lain

Setiap individu harus memiliki sikap terbuka dan tidak meremehkan orang lain hanya karena perbedaan status sosial atau ekonomi. Sikap ini penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang inklusif dan adil.

▷ Menghindari Sikap Diskriminatif

Diskriminasi berbasis golongan dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus menghindari perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu hanya karena latar belakang sosial mereka.

▷ Memahami Kepentingan Golongan Lain

Setiap golongan memiliki kepentingan dan tujuan tertentu dalam kehidupan sosial. Dengan memahami perspektif golongan lain, masyarakat dapat menghindari egoisme sosial yang dapat menghambat kerja sama dan persatuan.

▷ Membangun Jaringan Sosial yang Inklusif

Interaksi antar golongan harus terus diperkuat melalui kerja sama dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, dan kegiatan sosial. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan sosial dan membangun solidaritas antar golongan.

▷ Mengutamakan Kepentingan Bersama

Meskipun setiap golongan memiliki perbedaan, kepentingan nasional harus tetap diutamakan. Dengan menanamkan nilai gotong royong, masyarakat dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar bagi bangsa.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai Landasan untuk Memperkuat Modal Sosial

Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekadar semboyan, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam membangun persatuan di tengah keberagaman. Dalam konteks modal sosial, Bhinneka Tunggal Ika berperan sebagai landasan moral, etika, dan nilai dalam menjaga hubungan sosial antar individu, kelompok, maupun komunitas yang beragam. Prinsip ini menekankan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam suku, agama, ras, budaya, dan golongan sosial, semua warga negara tetap bagian dari satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keberagaman di Indonesia bisa menjadi sumber kekuatan jika dikelola dengan baik, tetapi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak ada rasa toleransi dan kesadaran untuk menerima perbedaan. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar dalam membangun modal sosial, yaitu modal yang memungkinkan masyarakat untuk hidup berdampingan, bekerja sama, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

a. Peran Bhinneka Tunggal Ika dalam Memperkuat Modal Sosial

Modal sosial merupakan aset tak berwujud dalam masyarakat yang mencakup kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun hubungan yang harmonis dan produktif. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan, modal sosial dapat berfungsi sebagai alat pemersatu dalam menghadapi tantangan keberagaman. Berikut adalah beberapa peran penting Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat modal sosial:

1) Meningkatkan Rasa Persatuan dan Kebersamaan

Bhinneka Tunggal Ika membantu masyarakat dalam memahami dan menerima perbedaan sebagai bagian dari identitas bangsa. Jika setiap individu dapat menghargai keberagaman yang ada, maka akan tercipta rasa kebersamaan dan kesadaran kolektif untuk tetap bersatu.

Persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi justru menerima perbedaan tersebut sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Sikap saling menghormati antar suku, agama, dan budaya memperkuat identitas nasional dan menciptakan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.



Supporter Persatuan – Shutterstock.com/ 2381187293

2) Mengurangi Konflik Sosial akibat Perbedaan Golongan

Dalam masyarakat yang beragam, sering kali muncul potensi gesekan sosial akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan keyakinan. Namun, dengan mengamalkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, masyarakat dapat:

- ▷ Menghindari prasangka negatif terhadap kelompok lain dan lebih mengutamakan dialog dalam menyelesaikan perbedaan.
- ▷ Mencegah munculnya diskriminasi berbasis suku, agama, ras, atau golongan sosial yang dapat memicu konflik berkepanjangan.
- ▷ Membangun jembatan komunikasi antar kelompok untuk mempererat hubungan sosial.

3) Membangun Kepercayaan Antar Kelompok

Kepercayaan merupakan salah satu unsur utama dalam modal sosial yang membantu membangun kerja sama dan interaksi sosial yang sehat. Dengan adanya kepercayaan antar individu maupun kelompok, masyarakat dapat:

- ▷ Menghindari rasa curiga dan sikap eksklusif yang dapat menghambat interaksi sosial.
- ▷ Memperkuat solidaritas sosial, sehingga individu merasa lebih nyaman untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi.
- ▷ Membangun jaringan sosial yang kuat di berbagai sektor, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun kehidupan bermasyarakat.

4) Mendorong Partisipasi dalam Pembangunan Sosial

Ketika masyarakat memahami nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, mereka akan merasa memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun bangsa. Dengan partisipasi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, maka akan tercipta masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing. Setiap individu merasa memiliki peran dalam mewujudkan kesejahteraan bersama, baik di tingkat lokal maupun nasional. Golongan sosial yang berbeda tetap dapat bekerja sama dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kebudayaan, dan kebijakan publik.

b. Implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam Kehidupan Sehari-hari

Agar nilai Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan, masyarakat perlu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara konkret dalam mengimplementasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat modal sosial:

- 1) Menghargai Perbedaan dalam Kehidupan Sosial
 - ▷ Menghormati kebiasaan dan adat istiadat masyarakat lain tanpa merendahkan atau menghakimi.
 - ▷ Menerima perbedaan bahasa, budaya, dan cara berpikir sebagai bagian dari keberagaman bangsa.
- 2) Menjalin Hubungan Baik antar Golongan
 - ▷ Mengembangkan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak membedakan teman, rekan kerja, atau tetangga berdasarkan latar belakang suku dan agama.
 - ▷ Mendorong kerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, bakti sosial, dan diskusi lintas golongan.
- 3) Mendukung Kebijakan Inklusif
 - ▷ Pemerintah harus membuat kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif, seperti pemerataan pembangunan di seluruh daerah tanpa memandang etnis atau agama tertentu.
 - ▷ Lembaga pendidikan dan perusahaan harus membuka kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa membedakan latar belakang sosial mereka.
- 4) Mengedukasi Generasi Muda tentang Keberagaman
 - ▷ Kurikulum di sekolah harus mengajarkan nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan persatuan bangsa.
 - ▷ Masyarakat perlu mengenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada anak-anak sejak dini, misalnya dengan mengenalkan lagu daerah, pakaian adat, dan cerita rakyat dari berbagai daerah.
- 5) Menjaga Perdamaian dan Stabilitas Sosial
 - ▷ Setiap individu harus berperan dalam mencegah penyebaran hoaks atau ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial.
 - ▷ Masyarakat harus selalu mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan, bukan dengan cara kekerasan atau perpecahan.

Contoh Soal

Soal 1

Siapakah tokoh yang pertama kali mencetuskan konsep "Bhinneka Tunggal Ika" dalam sejarah Nusantara?

- A. Gajah Mada
- B. Hayam Wuruk
- C. Mpu Tantular
- D. Raden Wijaya
- E. Patih Udara

Jawaban yang benar: C. Mpu Tantular

Pembahasan:

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pertama kali diperkenalkan dalam Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut, Mpu Tantular mengajarkan bahwa meskipun ada perbedaan keyakinan di masyarakat, tetap ada kesatuan dan keharmonisan yang harus dijaga. Frasa ini kemudian diadopsi sebagai semboyan negara Indonesia untuk menegaskan persatuan dalam keberagaman.

Soal 2

Apa makna utama dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia?

- A. Keberagaman harus dihapus demi kesatuan negara
- B. Semua warga negara harus memiliki budaya yang sama
- C. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa
- D. Indonesia harus menjadi negara yang seragam dalam segala aspek
- E. Keanekaragaman hanya terjadi di bidang budaya, bukan dalam kehidupan sosial

Jawaban yang benar: C. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu sebagai bangsa

Pembahasan:

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti "Berbeda-beda tetapi tetap satu" yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa. Konsep ini menjadi dasar untuk menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga perbedaan bukan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan.



3. Membangun Harmoni dalam Keberagaman

Kerja sama dalam kehidupan sosial merupakan kunci utama dalam membangun harmoni dalam keberagaman. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, Indonesia membutuhkan sikap saling membantu dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya kerja sama, masyarakat dapat mengatasi perbedaan dan memperkuat rasa persatuan. Nilai ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana keberagaman bukan menjadi pemisah, melainkan kekuatan yang mendukung terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan sejahtera.

Makna Kerjasama Dalam Kehidupan Sosial

Kerja sama merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan sosial yang memungkinkan individu atau kelompok mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, kerja sama bukan sekadar aktivitas kolektif, melainkan juga wujud dari nilai-nilai luhur yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kerja sama, setiap individu dapat saling melengkapi, berbagi tanggung jawab, dan menciptakan lingkungan sosial yang harmonis serta sejahtera.

a. Definisi Kerjasama



Kerjasama – Shutterstock.com/ 2461317895

Kerja sama dalam konteks sosial dapat didefinisikan sebagai upaya bersama yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau institusi untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kerja sama merujuk pada aktivitas atau usaha yang dilakukan secara kolektif oleh beberapa pihak guna mencapai hasil yang lebih optimal dibandingkan dengan usaha individu.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, kerja sama telah menjadi elemen kunci dalam membangun persatuan. Sejak masa perjuangan melawan kolonialisme, kerja sama antar suku, agama, dan budaya telah mendorong rakyat Indonesia untuk bersatu dalam mengusir penjajah. Semangat kebersamaan ini kemudian menjadi fondasi bagi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Prinsip kerja sama didasarkan pada nilai-nilai berikut:

- ▷ Kesetaraan: Setiap individu memiliki peran yang sama dalam mencapai tujuan bersama.
- ▷ Saling Menghargai: Perbedaan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi tidak menjadi penghalang dalam bekerja sama.
- ▷ Gotong Royong: Masyarakat bekerja sama untuk saling membantu tanpa mengharapkan imbalan pribadi.

- ▷ Tanggung Jawab Bersama: Setiap individu dalam kelompok memiliki kewajiban untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya.

b. Signifikansi Kerjasama Dalam Kehidupan Bermasyarakat

Kerja sama memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat memperkuat hubungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kerja sama sangat signifikan dalam kehidupan sosial:

1) Mendorong Kesadaran Akan Kepentingan Umum

Kerja sama mengajarkan masyarakat untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, individu akan lebih sadar akan pentingnya kepedulian sosial dan gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan bersama.

2) Mewujudkan Tujuan dengan Lebih Efektif

Dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan, kerja sama memungkinkan tujuan dapat tercapai dengan lebih efisien. Ketika individu atau kelompok bersatu, sumber daya dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal.

3) Menumbuhkan Rasa Persatuan dan Kesatuan

Kerja sama memperkuat rasa kebersamaan di antara anggota masyarakat, sehingga memperkuat persatuan. Dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen, kerja sama menjadi sarana untuk mengatasi perbedaan dan mempererat hubungan antarindividu maupun kelompok.

4) Meringankan Beban Kerja

Dengan adanya kerja sama, tugas yang berat dapat terasa lebih ringan karena dikerjakan secara kolektif. Konsep ini terlihat jelas dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, pembangunan fasilitas umum, dan aktivitas gotong royong lainnya.

5) Meningkatkan Produktivitas dan Efisiensi

Dalam dunia kerja maupun lingkungan sosial, kerja sama yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Kolaborasi antarindividu memungkinkan pembagian tugas yang lebih efektif sehingga hasil kerja menjadi lebih optimal.

6) Menanamkan Rasa Tanggung Jawab Sosial

Kerja sama melatih individu untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan peran masing-masing. Dengan memahami bahwa keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggotanya, individu akan lebih terdorong untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.

7) Mempererat Hubungan Sosial

Melalui kerja sama, hubungan antarindividu dan kelompok menjadi lebih harmonis. Interaksi yang intens dalam kerja sama menciptakan ikatan sosial yang kuat, yang pada akhirnya dapat mengurangi konflik dan memperkuat solidaritas sosial.

8) Mengembangkan Sikap Setia Kawan

Dalam kerja sama, individu belajar untuk saling mendukung dan menjaga hubungan yang baik satu sama lain. Sikap setia kawan yang tumbuh dari kerja sama akan memperkuat solidaritas dalam berbagai situasi, terutama ketika menghadapi tantangan atau kesulitan.

9) Memupuk Sikap Kebersamaan dan Kepedulian Sosial

Masyarakat yang menerapkan kerja sama cenderung lebih peduli terhadap sesama. Hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana alam, sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan, dan dukungan bagi individu yang sedang menghadapi kesulitan.

10) Menciptakan Lingkungan yang Damai dan Rukun

Ketika masyarakat bekerja sama dengan baik, konflik dan perpecahan dapat diminimalkan. Kerja sama yang didasarkan pada rasa saling menghargai dan menghormati akan menciptakan lingkungan sosial yang aman, damai, dan sejahtera.

Konsep Gotong Royong Dalam Masyarakat

Gotong royong merupakan nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Konsep ini tidak hanya mencerminkan semangat kerja sama, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Gotong royong telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk solidaritas sosial yang memperkuat persatuan dan kesatuan.

a. Pengertian Gotong Royong

Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yang terdiri dari dua kata, yaitu gotong, yang berarti mengangkat atau memikul, dan royong, yang berarti bersama-sama. Secara harfiah, gotong royong dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan secara kolektif untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gotong royong didefinisikan sebagai kegiatan kerja sama antarindividu atau kelompok dalam masyarakat untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan tujuan yang sama. Gotong royong mencerminkan nilai tolong-menolong dan kebersamaan dalam menyelesaikan suatu tugas agar lebih ringan.



Gotong royong masyarakat – Shutterstock.com/
1836832393

▷ Klasifikasi gotong royong

Ahli antropologi, Koentjaraningrat, mengklasifikasikan gotong royong menjadi dua bentuk utama, yaitu:

- 1) Gotong royong dalam bentuk tolong-menolong → Berfokus pada bantuan individual yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Contohnya adalah membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, seperti saat membangun rumah atau saat ada musibah.
- 2) Gotong royong dalam bentuk kerja bakti → Bersifat kolektif dan ditujukan untuk kepentingan umum. Contohnya adalah kerja bakti membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, atau menjaga keamanan wilayah.

▷ Kategori gotong royong berdasarkan bidang kehidupan

Selain dua bentuk utama tersebut, gotong royong juga dapat dikategorikan berdasarkan bidang kehidupan, seperti:

- 1) Gotong royong dalam kegiatan pertanian: Misalnya membantu panen di sawah atau ladang secara bersama-sama.

- 2) Gotong royong dalam kehidupan rumah tangga: Contohnya adalah membantu tetangga dalam menyiapkan acara pernikahan atau hajatan.
- 3) Gotong royong dalam situasi darurat: Seperti membantu korban bencana alam atau kecelakaan.

▷ Nilai-nilai gotong royong

Gotong royong tidak hanya sekadar kegiatan kerja sama, tetapi juga mencerminkan berbagai nilai sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam gotong royong antara lain:

- 1) Kebersamaan dan Solidaritas

Gotong royong menanamkan kesadaran bahwa setiap individu dalam masyarakat saling bergantung satu sama lain. Dengan kebersamaan, beban yang berat dapat terasa lebih ringan karena dikerjakan secara kolektif.

- 2) Keikhlasan dan Ketulusan

Dalam gotong royong, setiap individu memberikan tenaga dan waktu mereka dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Sikap ini menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama.

- 3) Tanggung Jawab Sosial

Masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong memiliki rasa tanggung jawab untuk menjaga lingkungan dan membantu sesama. Nilai ini memperkuat ikatan sosial dan mencegah sikap individualisme yang berlebihan.

- 4) Persatuan dan Kesatuan

Dengan bekerja sama, masyarakat dapat hidup dalam harmoni meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda. Gotong royong menjadi perekat dalam kehidupan sosial dan membantu mencegah terjadinya konflik antarwarga.

- 5) Kemandirian dan Ketahanan Sosial

Dengan mengedepankan gotong royong, masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah atau pihak lain dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Sikap ini menciptakan ketahanan sosial yang kuat.

▷ Peran gotong royong

Gotong royong memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam lingkup kecil seperti keluarga, hingga dalam skala yang lebih besar seperti komunitas atau bangsa. Berikut adalah beberapa peran utama gotong royong dalam kehidupan masyarakat:

- 1) Dalam Kehidupan Sehari-hari

Gotong royong dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai cara, seperti membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan, berbagi makanan dengan sesama, atau bekerja sama dalam menyelenggarakan acara sosial.

- 2) Dalam Pembangunan Infrastruktur dan Lingkungan

Pembangunan di tingkat desa maupun perkotaan sering kali melibatkan kerja bakti, misalnya dalam pembangunan jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya. Gotong royong dalam bidang ini meringankan beban pemerintah dan mempercepat pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3) Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban

Sistem ronda malam yang dilakukan secara bergilir oleh warga merupakan contoh nyata gotong royong dalam menjaga keamanan lingkungan. Dengan adanya kerja sama ini, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi.

4) Dalam Situasi Darurat atau Bencana

Ketika terjadi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir, masyarakat yang memiliki semangat gotong royong akan lebih cepat tanggap dalam memberikan bantuan. Mereka akan bahu-membahu mengevakuasi korban, membangun tempat pengungsian, serta memberikan bantuan makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan.

5) Dalam Dunia Pendidikan

Gotong royong juga berperan dalam dunia pendidikan, misalnya dalam kegiatan sekolah seperti kerja bakti membersihkan kelas, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran, atau mengadakan penggalangan dana bagi siswa yang kurang mampu.

6) Dalam Kehidupan Ekonomi

Gotong royong di Indonesia tidak hanya menjadi nilai sosial, tetapi juga terwujud dalam praktik ekonomi berbasis komunitas seperti koperasi dan arisan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota. Nilai ini telah mengakar dalam tradisi masyarakat di berbagai daerah. Misalnya, tradisi sambatan di Jawa berupa bantuan warga untuk membangun rumah tanpa bayaran, subak di Bali sebagai sistem irigasi kolektif petani, ronda malam yang dilakukan bergiliran demi menjaga keamanan lingkungan, serta sasi di Maluku dan Papua sebagai upaya bersama dalam melestarikan sumber daya alam. Semua ini menunjukkan bahwa gotong royong hidup dalam berbagai bentuk dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia.

b. Pentingnya Gotong Royong Bagi Bangsa Indonesia

Gotong royong adalah bagian penting dari identitas budaya Indonesia yang menyatukan masyarakat di tengah keberagaman yang ada. Sebagai konsep sosial, gotong royong mendorong masyarakat untuk bekerja bersama-sama, menghilangkan perbedaan, dan memfokuskan energi kolektif untuk tujuan bersama. Dengan begitu, kerja sama antar individu, kelompok, atau golongan sosial menjadi lebih harmonis dan terarah.

1) Makna Gotong Royong bagi Bangsa Indonesia

Gotong royong tidak hanya sekadar tradisi, tetapi juga merupakan bagian dari budaya Indonesia yang memiliki nilai luhur yang mendalam. Nilai-nilai tersebut seperti kebersamaan, rasa hormat, dan sikap tolong-menolong menjadi sangat penting dalam memelihara persatuan bangsa, khususnya di tengah keberagaman sosial, budaya, dan agama.

▷ Memperkuat Solidaritas Sosial

Gotong royong adalah kunci untuk mempererat solidaritas di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong memungkinkan masyarakat untuk saling mendukung dan menghargai satu sama lain meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Kebersamaan ini penting dalam membangun kepercayaan antar kelompok, yang berujung pada persatuan dan kesejahteraan bersama.

▷ Meringankan Beban Bersama

Gotong royong memungkinkan masyarakat untuk mengatasi beban atau masalah secara kolektif. Dalam banyak kasus, kegiatan gotong royong meringankan pekerjaan yang seharusnya bisa menjadi berat, namun menjadi lebih ringan jika dilakukan bersama-sama. Hal

ini menggambarkan konsep "berat sama dipikul, ringan sama dijinjing", yang berarti beban bersama akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama.

▷ Menjaga Keharmonisan dalam Keberagaman

Sebagai budaya yang tumbuh subur di Indonesia, gotong royong juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial di tengah keberagaman. Dengan memiliki nilai-nilai tolong-menolong dan kerja sama, gotong royong mampu mencegah terjadinya konflik antar kelompok yang mungkin timbul akibat perbedaan ras, agama, atau suku. Bahkan, secara spesifik, gotong royong dapat mengurangi kemungkinan konflik dan memperkuat rasa persatuan di dalam masyarakat.

2) Pengaplikasian Gotong Royong dalam Kehidupan Sehari-hari

▷ Gotong Royong dalam Lingkungan Sehari-hari

Pelaksanaan gotong royong tidak hanya terbatas pada waktu atau tempat tertentu, tetapi dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Misalnya, dalam kegiatan sosial, gotong royong dapat dilakukan untuk memperbaiki lingkungan, membantu tetangga, atau mendukung kegiatan masyarakat lainnya. Contoh sederhana gotong royong di lingkungan bisa dilihat pada kegiatan membersihkan jalan desa atau memperbaiki fasilitas umum yang digunakan bersama. Dengan demikian, masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik dan nyaman untuk semua.

▷ Gotong Royong dalam Penanggulangan Bencana



Evakuasi Korban Bencana – Shutterstock.com/ 2341723395

Selain kegiatan sehari-hari, gotong royong juga sangat penting dalam situasi darurat seperti bencana alam. Misalnya, dalam kasus banjir atau gempa bumi, masyarakat dengan cepat mengorganisir bantuan untuk korban, baik berupa tenaga, barang, atau dukungan moral. Kolaborasi dan koordinasi yang efektif antara berbagai pihak dapat membantu pemulihan yang lebih cepat dan efektif.

3) Peran Gotong Royong dalam Pembangunan Nasional

Gotong royong bukan hanya penting dalam lingkup keluarga atau lingkungan sekitar, namun juga memainkan peran besar dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Pembangunan Indonesia yang merata dan adil tidak dapat terwujud tanpa adanya semangat gotong royong di seluruh lapisan masyarakat.

▷ Menunjang Pembangunan Ekonomi

Di sektor ekonomi, gotong royong membantu masyarakat untuk bekerja bersama dalam menciptakan peluang usaha, membangun infrastruktur, dan mengurangi kesenjangan sosial. Kerja sama ini dapat mendorong tumbuhnya ekonomi lokal dan memperkuat daya saing bangsa di tingkat global.

▷ Memperkuat Persatuan dalam Politik

Dalam politik, gotong royong dapat diterapkan dalam bentuk kerjasama antara berbagai golongan, partai, dan tokoh politik untuk menciptakan kebijakan yang adil dan pro-rakyat. Sebagaimana dalam sejarah Indonesia, gotong royong telah menjadi dasar dalam memperjuangkan kemerdekaan, dan hingga kini semangat itu dapat digunakan untuk menjaga kestabilan politik dan sosial di Indonesia.

▷ Mewujudkan Tujuan Bersama

Pentingnya gotong royong dalam mencapai tujuan bersama menjadi nyata dalam berbagai sektor kehidupan. Baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun dalam bidang lainnya, gotong royong merupakan landasan yang kokoh untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.

c. Beragam Istilah Gotong Royong Di Berbagai Daerah Indonesia

Sebagai tradisi yang telah lama dikenal di Indonesia, gotong royong merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang mencerminkan kebersamaan dan solidaritas. Dengan beragamnya budaya dan kebiasaan di setiap daerah, istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep gotong royong pun bervariasi. Meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda, inti dari gotong royong tetap sama, yaitu kerja sama untuk mencapai tujuan bersama, tanpa memandang perbedaan. Berikut adalah beberapa istilah gotong royong yang berbeda di berbagai daerah di Indonesia:

Tabel Istilah Gotong royong di setiap daerah di Indonesia

No.	Daerah	Istilah	Keterangan
1	Aceh	Alang tulung	Tradisi tolong-menolong yang dilakukan dalam berbagai aktivitas sosial, agama, dan budaya.
2	Sumatera Utara	Siadapari	Kegiatan bergotong royong dalam bertani atau bercocok tanam.
3	Sumatera Barat	Hoyak tabuik	Bentuk kerja bakti dalam kegiatan sosial, seperti membersihkan saluran air.
4	Riau	Batobo	Gotong royong di bidang pertanian, biasanya bekerja sama dalam mengelola sawah.
5	Kepulauan Riau	Beganjal	Tolong-menolong dalam pelaksanaan upacara, seperti pernikahan dan adat.

No.	Daerah	Istilah	Keterangan
6	Jambi	Pelarian	Gotong royong dalam bidang bertani, dengan saling membantu dalam kegiatan tani.
7	Bangka Belitung	Nganggung	Tradisi berbagi makanan saat perayaan hari besar, seperti 1 Muharram dan Idulfitri.
8	Lampung	Sakai sambiaan	Sikap toleransi dalam kehidupan sosial, saling membantu dalam kegiatan bersama.
9	Jawa Barat	Sabileunghan	Tradisi untuk mendukung pembangunan dan gotong royong di masyarakat Sunda.
10	Yogyakarta	Gugur gunung	Kerja sosial untuk membersihkan atau membantu pekerjaan berat di masyarakat.
11	Jawa Timur	Song-osong lombhung	Kegiatan gotong royong dalam pembangunan rumah atau infrastruktur lainnya.
12	Bali	Ngayah	Pekerjaan sukarela, sering kali dalam konteks kebersihan lingkungan dan adat.
13	Nusa Tenggara Timur	Pawonda	Gotong royong untuk membersihkan tanah atau membersihkan rumah bersama.
14	Kalimantan Selatan	Nyempolo	Kerja bakti untuk membersihkan sawah atau kebun yang tidak terawat.
15	Kalimantan Timur	Paleo	Gotong royong untuk membersihkan ladang dan menanam padi secara bersama-sama.
16	Sulawesi Utara	Mapalus	Kegiatan saling membantu antar masyarakat untuk membangun atau bertani.
17	Sulawesi Selatan	Ammossi	Gotong royong untuk pembangunan atau pekerjaan rumah secara bersama.
18	Gorontalo	Hileiya	Tolong-menolong ketika ada kesulitan, membantu membawa barang atau tugas lain.
19	Maluku	Masohi	Kegiatan gotong royong di bidang perdagangan atau sosial.
20	Papua Barat Daya	Anu beta tubat	Tradisi dalam masyarakat Maybrat, Papua Barat Daya, yang menekankan kerja sama dalam berbagai hal.

1) Makna Penting Gotong Royong bagi Bangsa Indonesia

Sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, gotong royong memiliki arti yang sangat penting dalam memperkuat solidaritas dan persatuan. Dengan beragamnya suku, agama, ras, dan budaya yang ada, gotong royong menjadi simbol bahwa meskipun ada perbedaan, masyarakat Indonesia mampu bekerja sama dengan tujuan yang sama. Gotong royong mencakup nilai-nilai luhur yang penting untuk dijaga dan dilestarikan.



Harmoni dalam Budaya – Shutterstock.com/ 2592210349

Gotong royong bukan hanya soal berbagi tenaga, tetapi juga mencerminkan kebersamaan, saling menghargai, dan mendukung antar sesama. Selain itu, gotong royong juga memperkuat hubungan antar kelompok dalam masyarakat, menjadikannya lebih harmonis dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik. Praktik ini mampu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil, baik secara sosial maupun ekonomi.

2) Pentingnya Menjaga dan Merawat Gotong Royong dalam Kehidupan Sosial

Untuk menjaga keberagaman dan mencegah konflik sosial, masyarakat Indonesia perlu terus menjaga dan merawat gotong royong. Praktik gotong royong harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan diterapkan dalam berbagai bidang, baik fisik maupun nonfisik. Gotong royong sebagai konsep hidup yang mengutamakan kebersamaan dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial dan mempererat hubungan antar individu, kelompok, dan komunitas.

Selain itu, gotong royong juga dapat membantu masyarakat untuk mengatasi permasalahan bersama, seperti bencana alam, kemiskinan, dan masalah lainnya. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, gotong royong menjadi salah satu pendorong utama dalam memperjuangkan kebebasan bangsa ini. Seluruh elemen masyarakat turut berkontribusi dalam meraih kemerdekaan, meskipun dengan cara dan kemampuan yang berbeda.

Gotong royong tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga melibatkan partisipasi dalam pemikiran bersama. Hal ini mencakup penyelesaian masalah melalui diskusi atau keputusan kolektif, yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, gotong royong berperan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

3) Implementasi Gotong Royong dalam Kehidupan Sehari-hari

Untuk memastikan bahwa gotong royong tetap menjadi bagian integral dari kehidupan sosial, perlu adanya upaya untuk mengimplementasikannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu harus bekerjasama untuk mempromosikan nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan mengenai gotong royong sejak usia dini juga sangat penting untuk memastikan bahwa generasi mendatang memahami dan menghargai nilai-nilai ini.



Pembelajaran Gotongroyong – Shutterstock.com/ 2426618643

d. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dalam Gotong Royong

Gotong royong merupakan tradisi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang telah lama berkembang. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, gotong royong tidak terjadi secara otomatis. Banyak faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalannya dalam masyarakat. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong terbentuknya gotong royong di masyarakat.

1) Faktor Pendorong Gotong Royong

- ▷ Adanya Kesadaran Bahwa Manusia Adalah Makhluk Sosial

Setiap individu menyadari bahwa ia membutuhkan bantuan dari orang lain. Hal ini mendorong setiap individu untuk bekerjasama, karena mereka saling bergantung satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan.

- ▷ Manusia Memiliki Kecenderungan Berkelompok

Secara alami, manusia cenderung hidup dalam kelompok. Kecenderungan ini mempermudah terwujudnya gotong royong karena orang lebih mudah bekerjasama dalam kelompok yang memiliki tujuan yang sama.

- ▷ Manusia Memiliki Kecenderungan Untuk Mencapai Kesejahteraan

Keinginan untuk mencapai kesejahteraan bersama dapat menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan gotong royong. Individu merasa bahwa dengan bekerjasama, mereka dapat mencapai tujuan yang lebih besar yang membawa manfaat bagi semua pihak.

- ▷ Manusia Memiliki Kesadaran Untuk Membantu dan Menolong Sesamanya

Keinginan untuk menolong orang lain, yang merupakan bagian dari sifat kemanusiaan, menjadi pendorong kuat bagi terwujudnya kegiatan gotong royong.

- ▷ Memiliki Kesadaran Untuk Menciptakan Kehidupan Yang Rukun dan Harmonis

Gotong royong berfungsi untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat. Kesadaran akan pentingnya keharmonisan ini membuat individu lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan sosial bersama.

▷ Adanya Kesadaran Mengenai Pentingnya Bekerja Sama Untuk Mencapai Tujuan Bersama

Setiap individu memahami bahwa dengan bekerjasama, mereka dapat lebih mudah mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Inilah yang mendorong partisipasi dalam gotong royong.

2) Faktor Penghambat Gotong Royong

Selain faktor-faktor pendorong, ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya gotong royong. Beberapa faktor penghambat tersebut antara lain:

▷ Sikap Individualisme yang Kuat dalam Diri Manusia

Ketika individu memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, ini bisa menghambat upaya untuk bekerjasama dengan orang lain dalam kegiatan gotong royong. Sikap individualisme yang berlebihan sering kali menyebabkan ketidaksepahaman antar anggota masyarakat.

▷ Adanya Perbedaan Pendapat di Masyarakat

Perbedaan pendapat atau pandangan dalam suatu komunitas dapat menimbulkan perpecahan yang menghalangi terwujudnya gotong royong. Ketika anggota masyarakat tidak dapat menyatukan perbedaan mereka, pelaksanaan gotong royong menjadi sulit.

▷ Sikap yang Cenderung Mementingkan Kepentingan Diri Sendiri Daripada Kepentingan Umum

Individu yang hanya fokus pada kepentingan pribadi atau kelompoknya dapat menghambat upaya gotong royong. Jika setiap orang hanya berfokus pada kepentingan pribadi, tujuan bersama akan sulit tercapai.

▷ Rasa Percaya Diri yang Kurang

Ketika individu merasa tidak yakin akan kemampuannya atau merasa rendah diri, mereka cenderung tidak mau terlibat dalam kegiatan gotong royong. Kepercayaan diri yang kurang dapat menjadi hambatan dalam membangun kerja sama sosial.

▷ Kurangnya Kesadaran Untuk Bersikap Simpati dan Empati Terhadap Orang Lain

Gotong royong membutuhkan sikap simpati dan empati antar individu. Tanpa adanya rasa peduli terhadap kesulitan orang lain, kegiatan gotong royong akan terhambat.

▷ Kurangnya Sosialisasi di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat yang kurang berinteraksi atau memiliki hubungan yang terisolasi akan sulit melakukan gotong royong. Sosialisasi yang kurang bisa menyebabkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan orang lain dalam masyarakat.

Bentuk Kerjasama Dan Gotong Royong Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat

a. Jenis-Jenis Kerjasama Di Masyarakat Indonesia

Kerja sama dalam kehidupan masyarakat Indonesia memiliki berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut:

1) Kerja Sama dalam Bidang Kehidupan Sosial Politik

Dari sisi sosial politik, kerja sama dapat terlihat jelas dalam kegiatan musyawarah. Dalam kegiatan ini, kerja sama dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah merupakan prinsip

yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, tepatnya sila keempat yang berbicara tentang "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".

- ▷ Sila keempat mengandung nilai kerakyatan yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Berdasarkan nilai ini, rakyat memiliki peran yang penting dalam jalannya pemerintahan. Setiap kelompok masyarakat memiliki peran yang sama dalam pemerintahan, meskipun terbatas oleh kedudukannya. Untuk itu, masyarakat perlu membangun kerja sama untuk menutupi keterbatasan tersebut, sehingga terbentuklah kesatuan yang utuh dalam pemerintahan.
- ▷ Nilai lain dari sila keempat adalah hikmat yang dapat diartikan sebagai suatu kebijaksanaan yang mengandung manfaat bagi kepentingan umum. Kebijakan tersebut adalah dorongan kehendak yang bertujuan pada kebaikan yang rasional dan manusiawi. Kebajikan ini dijalankan dengan sikap yang adil dan beradab sesuai dengan ajaran agama atau kerakyatan yang dijelaskan oleh sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai persatuan.
- ▷ Nilai permusyawaratan mengacu pada cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai keputusan yang didasarkan pada kebulatan pendapat atau mufakat.
- ▷ Perwakilan mengacu pada suatu tata cara (prosedur) yang mengusahakan tutur serta rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, salah satunya dilakukan melalui badan-badan perwakilan. Hal ini menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga-lembaga yang dapat mengakomodasi berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

2) Kerja Sama dalam Bidang Kehidupan Pertahanan dan Keamanan Negara



Tentara Negara Indonesia – Pinterest.com

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta dan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta diperjangkan sejak dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Pertahanan negara menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tentang pertahanan negara. Berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

- ▷ Keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dapat diwujudkan dalam upaya bela negara. Dalam Pasal 27 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, disebutkan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Hal tersebut bersesuaian dengan penjelasan atas UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Upaya bela negara sendiri diartikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwakan oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
- ▷ Kerja sama dalam pertahanan negara diwujudkan dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, pelatihan dasar kemiliteran, dan pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing.

3) Kerja Sama Antarumat Beragama

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama dan keyakinan. Hal tersebut perlu dikelola dengan baik agar kehidupan antarumat beragama berjalan harmonis. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengajarkan prinsip toleransi dan saling menghargai. Kebebasan beragama dan berkeyakinan dijamin oleh Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaan.

Dalam pelaksanaannya, kerja sama antarumat beragama harus didorong dengan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama. Misalnya dalam kegiatan sosial, pemerintah, dan organisasi keagamaan sering kali bekerja sama dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti bencana alam, kemiskinan, dan konflik sosial.

4) Kerja Sama dalam Pembentukan Masyarakat yang Toleran dan Berkeadilan

Dengan sistem yang tepat, hak dan kebebasan masyarakat untuk memilih agama dan beribadah dapat terjamin. Keberagaman agama di Indonesia harus dilindungi dengan sistem yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut. Keberagaman agama yang ada di Indonesia saling diiringi dengan rasa toleransi, saling menghargai, dan saling memahami, sehingga kerukunan antarumat beragama dapat tercipta. Pancasila mengajarkan bahwa dalam kerukunan tersebut, setiap orang harus menghargai hak-hak orang lain untuk menjalankan ajaran agamanya.

b. Berbagai Bentuk Gotong Royong Dalam Masyarakat Indonesia

Gotong royong adalah tradisi yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejak zaman prasejarah, gotong royong telah terwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan. Tradisi ini tidak hanya terjaga pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup kegiatan sosial dan budaya yang terwujud dalam sikap saling tolong-menolong.

Salah satu contoh tradisi gotong royong yang masih dilestarikan adalah tradisi melambu yang ada di Sulawesi Tenggara dan monyilo di Sulawesi Tengah. Melambu adalah tradisi berburu binatang liar, sedangkan monyilo adalah kegiatan gotong royong untuk menangkap ikan di laut.

Selain berburu dan mengumpulkan makanan, gotong royong juga berkembang dalam banyak aspek kehidupan lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk gotong royong yang masih berlangsung dalam masyarakat Indonesia:

1) Gotong Royong Bercocok Tanam

Gotong royong dalam bercocok tanam telah lama menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang agraris. Kegiatan bercocok tanam bersama mengurangi beban individu dan memungkinkan pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Di Jawa Tengah, misalnya, para petani sering kali bekerja sama dalam menanam padi di sawah mereka yang berdampingan. Mereka saling membantu dalam membajak, menanam, dan merawat tanaman, menghindari pekerjaan yang berat dilakukan sendiri.

Di beberapa daerah lain, seperti di Sulawesi Tenggara, masyarakat Tolaki melakukan gotong royong dalam membuka ladang secara berkelompok. Ini menunjukkan bahwa gotong royong dalam bercocok tanam adalah bagian dari tradisi yang memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah masyarakat.

2) Gotong Royong Membangun Rumah

Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan gotong royong tidak hanya terbatas pada bidang pertanian, tetapi juga meluas ke dalam kehidupan rumah tangga. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi gotong royong dalam pembangunan rumah, seperti yang terlihat dalam tradisi bataga kudo-kudo di Sumatra Barat atau barifola di Tidore. Gotong royong ini tidak hanya bermanfaat untuk mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga mempererat hubungan antar warga yang saling membantu.

Sebagai contoh, di beberapa daerah seperti di Sulawesi Selatan, terdapat tradisi marakka' bola, yaitu kegiatan gotong royong untuk memindahkan rumah secara bersama-sama. Proses ini tidak hanya membangun rumah tetapi juga mempererat tali persaudaraan antar warga.

3) Kerja Bakti

Kerja bakti adalah bentuk kegiatan gotong royong tanpa pamrih atau tanpa imbalan, yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerja bakti merupakan aktivitas yang bertujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum. Kerja bakti bisa dilakukan di lingkungan sekitar seperti membersihkan saluran air, memperbaiki jalan rusak, atau membangun fasilitas umum.

Contoh lain dari kerja bakti adalah memperbaiki fasilitas pendidikan atau kesehatan, seperti membangun pos kesehatan atau menyemprotkan pestisida untuk mencegah penyakit. Kegiatan kerja bakti memberikan kontribusi yang besar terhadap pemeliharaan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup bersama.



Kerja Bakti – Shutterstock.com/ 2476390493

4) Melaksanakan Kegiatan Ronda

Ronda adalah bentuk gotong royong yang dilakukan untuk menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ronda biasanya dilakukan pada malam hari dengan tujuan menjaga ketertiban dan mencegah tindak kriminal. Pada kegiatan ronda, warga saling bekerja sama untuk menjaga pintu masuk dan keluar serta mengontrol wilayah sekitar untuk menghindari ancaman dari luar.

Kegiatan ronda ini mengajarkan warga untuk meningkatkan rasa tanggung jawab sosial dan membangun solidaritas di tengah-tengah masyarakat. Ronda membantu membentuk ikatan emosional antar warga yang dapat menjaga stabilitas keamanan lingkungan.

5) Membantu Tetangga yang Mengadakan Acara

Gotong royong juga terlihat pada saat-saat tertentu seperti perayaan, syukuran, atau acara kematian. Warga sering kali saling membantu dalam mempersiapkan acara dengan memberikan bantuan tenaga, bahan makanan, serta perlengkapan lain. Misalnya, membantu mendirikan tenda atau mempersiapkan makanan bagi tamu yang datang.

Hal ini juga membantu mempererat hubungan antar warga serta menumbuhkan rasa kebersamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Warga yang saling membantu dalam acara perayaan menunjukkan semangat solidaritas yang tinggi dan mempererat jalinan persahabatan.

6) Menolong Warga yang Terkena Musibah atau Bencana

Menolong sesama yang terkena musibah atau bencana juga merupakan bagian dari gotong royong yang sangat mendalam dalam kehidupan masyarakat. Warga yang terkena bencana akan dibantu oleh tetangga dan masyarakat di sekitar untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal sementara.

Bentuk bantuan ini bisa berupa bantuan fisik atau moral, tergantung pada kondisi yang ada. Misalnya, setelah bencana banjir, warga saling membantu untuk membersihkan rumah atau memberikan bantuan logistik. Gotong royong dalam konteks ini sangat penting karena mencerminkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama.



Jejak Pancasila

Di Sulawesi Selatan, ada tradisi gotong royong unik bernama marakka' bola, yaitu memindahkan rumah secara utuh dengan cara diangkat bersama-sama oleh warga. Rumah tradisional yang terbuat dari kayu diangkat menggunakan bambu panjang dan dibawa ke lokasi baru, biasanya karena alasan adat atau kebutuhan keluarga. Proses ini bisa melibatkan puluhan hingga ratusan orang, disertai doa dan iringan musik tradisional. Semua orang ikut membantu tanpa dibayar, hanya karena rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Tradisi ini masih berlangsung hingga kini dan jadi simbol solidaritas masyarakat yang luar biasa.



Contoh Soal

Soal 1

Apa faktor utama yang diperlukan untuk membangun harmoni dalam keberagaman di Indonesia?

- A. Mengutamakan budaya daerah sendiri dan menolak budaya lain
- B. Memaksakan satu agama atau kepercayaan agar semua seragam
- C. Menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati
- D. Membatasi interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda
- E. Menjaga jarak dengan orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda

Jawaban yang benar: C. Menjunjung tinggi nilai toleransi dan saling menghormati

Pembahasan:

Harmoni dalam keberagaman dapat terwujud jika setiap individu dalam masyarakat memiliki sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan. Dengan menghargai keunikan budaya, agama, dan tradisi yang berbeda, masyarakat bisa hidup berdampingan secara damai. Sebaliknya, pemaksaan keseragaman dan pengabaian keberagaman justru dapat menimbulkan konflik.

Soal 2

Bagaimana peran pendidikan dalam membangun harmoni dalam keberagaman di Indonesia?

- A. Mendorong pemahaman bahwa satu suku atau budaya lebih unggul dari yang lain
- B. Mengajarkan pentingnya keberagaman dan memperkuat sikap toleransi sejak dini
- C. Membatasi pembelajaran sejarah budaya daerah lain agar tidak terjadi konflik
- D. Menyediakan sekolah khusus untuk kelompok budaya tertentu agar tetap eksklusif
- E. Mengurangi interaksi antarsuku dan agama untuk mencegah perbedaan pendapat

Jawaban yang benar: B. Mengajarkan pentingnya keberagaman dan memperkuat sikap toleransi sejak dini

Pembahasan:

Pendidikan memainkan peran penting dalam membangun harmoni dalam keberagaman. Melalui kurikulum yang mengenalkan budaya dan tradisi berbagai suku serta agama di Indonesia, siswa dapat belajar untuk menghargai perbedaan dan menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan multikultural juga membantu mencegah munculnya sikap diskriminatif dan memperkuat persatuan bangsa.



4. Gotong Royong sebagai Sistem Ekonomi Pancasila Inklusif dan Berkeadilan

Kerjasama dalam Konteks Kehidupan Ekonomi

Kerja sama dalam kehidupan ekonomi sangatlah penting, terutama bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam ekonomi berperan sebagai landasan untuk membangun sistem yang adil dan berkelanjutan, yang mengutamakan kesejahteraan bersama. Sila kelima Pancasila, yang berbunyi "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," mengandung ajaran bahwa kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan bagi sebagian orang, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini merupakan inti dari sistem ekonomi Pancasila, yang mengedepankan pemerataan, keadilan, dan peluang yang setara bagi setiap warga negara.

a. Penerapan Gotong Royong dalam Kehidupan Ekonomi

Seperti yang diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Artinya, dalam setiap kegiatan ekonomi, kita diajarkan untuk tidak hanya berfokus pada keuntungan pribadi atau kelompok, tetapi untuk mengutamakan kepentingan bersama. Oleh karena itu, gotong royong dalam ekonomi bukan hanya sekadar konsep sosial, tetapi juga menjadi dasar utama dalam merancang kebijakan ekonomi negara. Dalam penerapannya, hal ini berarti menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya mementingkan laba atau keuntungan material, tetapi juga menekankan pada peningkatan kualitas hidup seluruh rakyat.

b. Koperasi sebagai Wujud Kerja Sama Ekonomi

Salah satu bentuk nyata penerapan gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila adalah koperasi. Koperasi merupakan badan usaha yang berdasarkan prinsip gotong royong, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta turut berperan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi bersama. Koperasi tidak hanya berorientasi pada profit semata, melainkan pada pemerataan hasil ekonomi bagi seluruh anggota. Dengan demikian, koperasi menjadi contoh konkret bagaimana prinsip gotong royong dalam ekonomi bisa diterapkan untuk menciptakan keadilan sosial dan solidaritas di antara sesama.

c. Pajak sebagai Bagian dari Gotong Royong Ekonomi Negara



Pembayaran Pajak – Shutterstock.com/ 2586229343

Sistem pajak juga merupakan bagian dari prinsip gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara untuk membiayai berbagai

kebutuhan umum, seperti infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan kesehatan. Pajak ini mencerminkan semangat gotong royong, di mana setiap warga negara berperan serta dalam pembangunan bangsa, tidak hanya melalui uang tetapi juga melalui rasa tanggung jawab sosial untuk kemajuan bersama. Pajak juga menjadi alat untuk menciptakan pemerataan pembangunan, di mana pembangunan yang didorong oleh pajak tidak hanya terpusat di satu wilayah, melainkan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

d. Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Kerja Sama Gotong Royong

Agar prinsip gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila dapat terwujud dengan baik, setiap individu dan kelompok masyarakat harus menjalankan prinsip-prinsip ekonomi yang adil dan bijaksana. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

- ▷ Menjalankan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai luhur seperti kekeluargaan dan gotong royong. Tindakan ini dapat tercermin dalam berbagai kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama, misalnya dalam bentuk koperasi, pembangunan infrastruktur, atau proyek sosial bersama.
- ▷ Bersikap adil dan bijaksana dalam kehidupan ekonomi. Setiap keputusan ekonomi harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan demi keuntungan segelintir orang.
- ▷ Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dalam ekonomi, setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan ekonomi, tetapi juga wajib untuk memberikan kontribusi yang adil terhadap pembangunan bersama.
- ▷ Menghormati hak-hak orang lain. Dalam ekonomi, terutama dalam transaksi bisnis, menghormati hak orang lain merupakan kunci untuk menjaga hubungan yang baik dan saling menguntungkan. Kepercayaan dalam hubungan ekonomi akan membangun sistem yang lebih kokoh dan stabil.
- ▷ Membiasakan diri untuk bekerja keras. Masyarakat yang bekerja keras akan menciptakan peluang ekonomi bagi dirinya dan orang lain. Semangat kerja keras menjadi bagian dari etos gotong royong yang harus terus dipupuk dalam setiap lini kehidupan masyarakat.

e. Keberhasilan Sistem Ekonomi Pancasila melalui Gotong Royong

Dengan prinsip-prinsip di atas, ekonomi dalam sistem Pancasila dapat berjalan dengan lebih adil dan merata. Gotong royong menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, yang mana tidak ada satu pun golongan atau individu yang tertinggal dari kemajuan ekonomi. Dengan sistem yang inklusif dan berkeadilan ini, rakyat Indonesia dapat merasakan manfaat ekonomi secara lebih adil, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sistem ekonomi Pancasila tidak hanya mengutamakan aspek material semata, tetapi juga memperhatikan aspek moral, sosial, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam ekonomi, Indonesia dapat menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, yang tidak hanya mengutamakan kemajuan di sektor tertentu, tetapi memastikan setiap lapisan masyarakat ikut serta dalam proses tersebut. Dengan begitu, Indonesia bisa mencapai kemakmuran yang sejati, di mana setiap rakyat memiliki peran dalam pembangunan ekonomi dan mendapatkan hasilnya secara adil.

Sistem Ekonomi Pancasila Yang Mengutamakan Keadilan Sosial

Sistem ekonomi Pancasila bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ini menolak dominasi segelintir pihak atas sumber daya ekonomi dan menekankan pentingnya kerja sama, gotong royong, serta peran aktif negara dalam mengelola perekonomian demi kepentingan bersama. Keseimbangan antara nilai ekonomi dan nilai-nilai moral, sosial, serta spiritual menjadi fondasi utama pelaksanaannya.



Mohammad Hatta – Detik.com

a. Pandangan tokoh tentang sistem ekonomi Pancasila

- ▷ Sukarno menekankan peran aktif seluruh rakyat dalam ekonomi, dengan negara sebagai pengatur utama demi tercapainya kesejahteraan bersama.
- ▷ Mubyarto melihat sistem ini tidak hanya berorientasi pada kekayaan materi, tapi juga pada nilai kemanusiaan melalui pendekatan sosial, moral, dan spiritual.
- ▷ Sri Edi Swasono menyatakan bahwa masyarakat harus aktif dalam ekonomi, dengan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

b. Peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila

- ▷ Negara bertugas menciptakan iklim ekonomi yang adil dan menjaga agar tidak ada kelompok yang terpinggirkan.
- ▷ Pemerintah wajib menjamin hak-hak dasar rakyat seperti pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
- ▷ Intervensi negara melalui regulasi dan kebijakan diperlukan untuk menjamin distribusi hasil ekonomi secara merata.

c. Koperasi sebagai wujud ekonomi kerakyatan

- ▷ Koperasi mencerminkan semangat gotong royong, di mana setiap anggota memiliki hak setara dalam keputusan dan hasil usaha.
- ▷ Koperasi mendukung pemerataan ekonomi dan membuka lapangan kerja berbasis keadilan sosial.
- ▷ Konsep ini sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

d. Pajak sebagai instrumen keadilan sosial

- ▷ Pajak adalah bentuk partisipasi warga negara dalam pembangunan nasional.
- ▷ Dana pajak digunakan untuk membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan.
- ▷ Pajak mencerminkan solidaritas sosial karena seluruh lapisan masyarakat ikut berkontribusi untuk kepentingan umum.

e. Prinsip-prinsip utama dalam mencapai keadilan sosial ekonomi

- ▷ Pemerataan ekonomi: hasil pembangunan harus didistribusikan secara adil.
- ▷ Kesejahteraan bersama: menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
- ▷ Keberpihakan pada rakyat: negara mendukung ekonomi rakyat melalui kebijakan yang memihak masyarakat.
- ▷ Gotong royong dalam ekonomi: menanamkan semangat kerja sama dalam aktivitas ekonomi.
- ▷ Menghargai hasil kerja orang lain: menghormati kontribusi setiap individu dalam ekonomi.
- ▷ Berorientasi pada kesejahteraan sosial: memastikan manfaat ekonomi dirasakan oleh seluruh masyarakat.



Jejak Pancasila

Pajak bukan hal yang menakutkan, lho! Dengan membayar pajak, kita seakan berkontribusi dalam membangun negeri. Apa yang kita bayar digunakan untuk membangun infrastruktur, rumah sakit, sekolah, dan banyak lagi yang bermanfaat bagi kita semua. Itulah esensi dari gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila!



Contoh Soal

Soal 1

Bagaimana prinsip gotong royong diterapkan dalam sistem ekonomi Pancasila?

- A. Memberikan kesempatan ekonomi hanya kepada kelompok tertentu
- B. Menekankan persaingan bebas tanpa adanya intervensi pemerintah
- C. Mengutamakan usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama
- D. Menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama tanpa memperhatikan aspek sosial
- E. Membiarkan individu bersaing sendiri dalam perekonomian tanpa kerja sama

Jawaban yang benar: C. Mengutamakan usaha bersama untuk mencapai kesejahteraan bersama

Pembahasan:

Gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila menekankan kerja sama dan usaha bersama untuk kesejahteraan semua pihak, bukan hanya untuk segelintir orang. Prinsip ini diterapkan dalam bentuk koperasi, usaha bersama, serta kebijakan ekonomi yang mendukung keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Soal 2

Di bawah ini, manakah contoh nyata implementasi gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila?

- A. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan kerja sama antar anggotanya
- B. Perusahaan swasta yang hanya fokus pada keuntungan pemilik modal
- C. Bank konvensional yang memberikan bunga tinggi untuk meningkatkan laba
- D. Bisnis monopoli yang membatasi persaingan pasar untuk kepentingan tertentu
- E. Sistem perdagangan bebas tanpa kontrol pemerintah

Jawaban yang benar: A. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan kerja sama antar anggotanya

Pembahasan:

Koperasi adalah salah satu bentuk implementasi nyata dari prinsip gotong royong dalam ekonomi Pancasila. Dalam koperasi, anggota bekerja sama dan berbagi keuntungan secara adil. Sistem ini mencerminkan nilai kekeluargaan dan kebersamaan, yang sesuai dengan prinsip ekonomi Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

Soal 3

Mengapa pajak dianggap sebagai bentuk gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila?

- A. Karena pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif
- B. Karena pajak hanya menguntungkan pemerintah dan tidak berpengaruh pada rakyat
- C. Karena pajak adalah kewajiban yang tidak memiliki dampak pada pembangunan
- D. Karena pajak hanya dibayar oleh kelompok tertentu dalam masyarakat
- E. Karena pajak bersifat opsional dan tidak berpengaruh terhadap ekonomi negara

Jawaban yang benar: A. Karena pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif

Pembahasan:

Pajak merupakan bentuk nyata dari gotong royong dalam sistem ekonomi Pancasila. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan sistem perpajakan yang adil, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan berjalan merata dan kesejahteraan sosial dapat tercapai.

Kegiatan Kelompok 2

Simulasi Ekonomi Gotong Royong

Tujuan: Melatih peserta didik memahami konsep sistem ekonomi Pancasila melalui kerja sama, gotong royong, dan keadilan sosial dalam praktik ekonomi sederhana.

- 1) Bentuk kelompok berisi 5–6 orang.

- 2) Setiap kelompok akan menjalankan simulasi sebagai "Komunitas Ekonomi Mini".
Tugas mereka adalah:
- Mendirikan koperasi mini (fiktif) dengan nama dan jenis usaha bebas (misalnya: koperasi makanan ringan, koperasi alat tulis, koperasi sayur, dll).
 - Menentukan struktur dan peran masing-masing anggota (misal: ketua, bendahara, anggota produksi, pemasaran, dll).
- 3) Isi Tabel Rencana Usaha Gotong Royong berikut ini berdasarkan hasil diskusi kelompok:

Komponen	Penjelasan Kelompok
Nama Koperasi Mini	
Jenis Usaha	
Prinsip Gotong Royong yang Diterapkan	
Cara Pembagian Tugas dan Hasil Usaha	
Bentuk Keadilan Sosial dalam Usaha	
Kontribusi Setiap Anggota (kerja/pajak/sumbangan)	

- 4) Presentasi dan Dialog Antar Kelompok

Setiap kelompok mempresentasikan hasil simulasi koperasinya, kemudian guru akan memandu diskusi setelah seluruh presentasi selesai.

- Apa tantangan menerapkan prinsip gotong royong dalam kegiatan ekonomi?
- Bagaimana pajak bisa menjadi bentuk solidaritas dalam kehidupan nyata?

Rangkuman

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang menggambarkan keberagaman dalam persatuan Indonesia, yang memiliki makna penting dalam menjaga keharmonisan antara berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Asal usul semboyan ini tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, menunjukkan bahwa meskipun berbeda-beda, semua elemen masyarakat dapat hidup berdampingan dalam persatuan. Pemahaman atas Bhinneka Tunggal Ika membantu menguatkan modal sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia untuk saling menghargai dan bekerja bersama, meskipun ada perbedaan.

Penerapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai modal sosial tidak hanya memperkuat kesatuan, tetapi juga mendorong pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini mengajarkan kita untuk membangun harmoni dan kerja sama antar individu, kelompok, dan komunitas. Keberagaman yang ada bukan menjadi pemisah, melainkan pemersatu yang memperkaya budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ini juga tercermin dalam pelaksanaan gotong royong yang menjadi dasar ekonomi Pancasila, dimana setiap individu berkontribusi untuk kesejahteraan bersama.

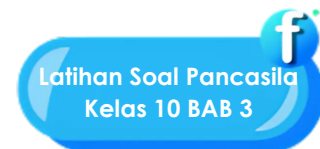
Sebagai sistem ekonomi Pancasila yang inklusif, gotong royong berperan penting dalam membangun ekonomi yang adil dan merata, yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan prinsip gotong royong, sistem ekonomi Pancasila mendorong masyarakat untuk berkolaborasi dalam menciptakan kesejahteraan dan kemajuan, serta mengurangi ketimpangan sosial. Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan, tetapi juga merupakan landasan penting dalam memperkuat solidaritas dan mempercepat pembangunan sosial ekonomi di Indonesia.

Latihan Soal

1. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika dipilih sebagai semboyan negara Indonesia, dan bagaimana semboyan ini berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat?
 - A. Untuk menggambarkan dominasi satu budaya yang lebih unggul di Indonesia
 - B. Untuk mendorong perpecahan antar kelompok dalam masyarakat yang berbeda
 - C. Untuk menunjukkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempererat persatuan bangsa
 - D. Untuk memaksakan satu agama yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia
 - E. Untuk mengabaikan perbedaan yang ada dalam kehidupan masyarakat
2. Apa yang dimaksud dengan "modal sosial" dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana konsep ini memperkuat kehidupan sosial masyarakat Indonesia?
 - A. Modal sosial adalah persatuan yang tercapai dengan memaksakan norma yang seragam
 - B. Modal sosial berfungsi untuk memperkuat hubungan antar individu dengan cara mengecualikan kelompok minoritas
 - C. Modal sosial mendorong interaksi sosial yang inklusif, memperkuat hubungan dan solidaritas antar kelompok
 - D. Modal sosial adalah cara untuk mendominasi kelompok lain dalam masyarakat
 - E. Modal sosial memisahkan kelompok berdasarkan kesamaan budaya dan suku
3. Mengapa penting untuk mengajarkan nilai Bhinneka Tunggal Ika pada generasi muda dalam konteks pembangunan sosial Indonesia?
 - A. Agar generasi muda mengutamakan homogenitas budaya dan agama
 - B. Agar generasi muda dapat memahami dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia
 - C. Agar generasi muda hanya menghormati satu budaya saja
 - D. Agar generasi muda tidak perlu berinteraksi dengan kelompok yang berbeda
 - E. Agar generasi muda dapat menciptakan perpecahan demi memperkuat nasionalisme
4. Bagaimana penerapan Bhinneka Tunggal Ika dapat memperkuat ekonomi kerakyatan di Indonesia?
 - A. Dengan menciptakan sistem ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok mayoritas
 - B. Dengan menekankan pada distribusi ekonomi yang tidak adil antar kelompok
 - C. Dengan mempromosikan kerja sama antar kelompok yang berbeda untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
 - D. Dengan mengurangi kerjasama antar suku dan agama dalam kegiatan ekonomi
 - E. Dengan membatasi akses ekonomi untuk kelompok tertentu saja
5. Dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian dari lambang negara, apa yang dapat dipelajari oleh masyarakat Indonesia dari lambang Garuda Pancasila yang mencantumkan semboyan tersebut?
 - A. Lambang negara menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan satu agama dan budaya
 - B. Lambang negara mengajarkan pentingnya perpecahan antar kelompok untuk memperkuat identitas nasional

- C. Lambang negara mengingatkan bahwa keberagaman adalah kekuatan yang harus dirayakan dalam persatuan
 - D. Lambang negara menggambarkan dominasi satu suku bangsa dalam negara
 - E. Lambang negara hanya menggambarkan pemerintahan yang otoriter tanpa melibatkan keberagaman
6. Bagaimana Bhinneka Tunggal Ika berfungsi dalam memperkuat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, suku, dan agama?
- A. Dengan mendorong eksklusivitas budaya tertentu yang lebih dominan
 - B. Dengan memisahkan kelompok berdasarkan agama dan suku
 - C. Dengan mengedepankan kebijakan yang menghargai perbedaan dan mengutamakan kesatuan
 - D. Dengan membatasi hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat
 - E. Dengan melarang perbedaan pendapat antar kelompok
7. Apa peran Bhinneka Tunggal Ika dalam memperkuat modal sosial yang mendukung pembangunan nasional?
- A. Menghambat kerja sama antar kelompok sosial
 - B. Membentuk sikap saling menghormati dan membantu antar kelompok yang berbeda
 - C. Mendorong diskriminasi berdasarkan perbedaan suku dan agama
 - D. Menyebabkan ketegangan sosial antar kelompok
 - E. Memperkenalkan prinsip-prinsip individualisme dalam pembangunan

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Effendi, T. A. (2003). *Bhinneka Tunggal Ika: Membangun Harmoni dalam Keberagaman*.
- Hatta, Mohammad. (1992). *Koperasi sebagai Usaha Bersama*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kuntowijoyo, (2003). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mubyarto. (1998). *Ekonomi Pancasila: Sebuah Konsep Ekonomi Indonesia yang Berdasarkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ramli, G. (2011). *Keragaman dalam Kebudayaan Indonesia: Refleksi atas Konsep Bhinneka Tunggal Ika*. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Sri Edi Swasono. (2000). *Sistem Ekonomi Pancasila dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Indonesia.
- Soekarno, Ir. (2005). *Pancasila dan Implementasinya dalam Kehidupan Bangsa*. Jakarta: Pustaka Rakyat.
- Sukarno. (1963). *Pendidikan dan Kebudayaan Pancasila sebagai Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryana, Y. (2005). *Gotong Royong dan Pembangunan Ekonomi dalam Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Yamin, M. (2002). *Gotong Royong: Sebuah Praksis dalam Kehidupan Sosial Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.



BAB 4

WARGA NEGARA YANG BERPERAN AKTIF DAN POSITIF

Karakter Pelajar Pancasila

- ▷ **Bernalar Kritis**
Memahami hak dan kewajiban secara rasional.
- ▷ **Bergotong royong**
Aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.
- ▷ **Berkebinekaan Global**
Menghargai perbedaan dan memperkuat persatuan.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban, Warga Negara, Sekolah, Masyarakat, Negara, Nilai-Nilai Pancasila, Keberagaman, Tanggung Jawab Sosial, Persatuan, Pembangunan Nasional.

Tujuan Pembelajaran: Memahami Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

- 1. Menerapkan Perilaku yang Mencerminkan Pemahaman terhadap Hak dan Kewajiban sebagai Bagian dari Lingkungan Sekolah, Masyarakat, dan Negara**
 - ▷ Menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
 - ▷ Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang mendukung terciptanya lingkungan yang harmonis dan kondusif.
- 2. Mengenali serta Memahami Peran dan Posisi Dirinya sebagai Warga Negara Indonesia**
 - ▷ Menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa dalam kehidupan sosial.

- ▷ Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

3. Mengenali serta Memahami Peran dan Posisi Dirinya sebagai Warga Negara Indonesia

- ▷ Menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa dalam kehidupan sosial.
- ▷ Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

4. Mengenali serta Memahami Peran dan Posisi Dirinya sebagai Warga Negara Indonesia

- ▷ Menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa dalam kehidupan sosial.
- ▷ Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

5. Mengenali serta Memahami Peran dan Posisi Dirinya sebagai Warga Negara Indonesia

- ▷ Menghargai keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa dalam kehidupan sosial.
- ▷ Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional.



F I T R I



1. Hak dan Kewajiban dalam Berbagai Lingkungan



Taat Aturan – Shutterstock.com/2450355695

Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam kehidupan sosial, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang. Hak merupakan sesuatu yang dapat dinikmati oleh individu sebagai bagian dari masyarakat dan negara, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sangat penting agar setiap individu dapat menjalankan perannya dengan baik dalam berbagai lingkungan, seperti sekolah, masyarakat, dan negara.

Hak dan kewajiban merupakan konsep dasar yang mengatur hubungan sosial antara individu, kelompok, dan negara. Keduanya tidak dapat dipisahkan, karena hak seseorang sering kali berkaitan erat dengan kewajiban pihak lain. Sebagai contoh, hak seorang siswa untuk memperoleh pendidikan yang layak juga bergantung pada kewajiban guru untuk mengajar dengan baik serta kewajiban siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan disiplin.

a. Pengertian Hak

Hak dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang secara moral maupun hukum dapat dimiliki dan dinikmati oleh individu. Hak dapat berbentuk kebebasan, perlindungan, serta berbagai fasilitas yang diberikan oleh masyarakat dan negara untuk menunjang kehidupan yang layak. Berikut merupakan contoh hak dalam kehidupan sehari-hari:

- ▷ Hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
- ▷ Hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
- ▷ Hak atas perlindungan hukum tanpa diskriminasi.
- ▷ Hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan.

b. Pengertian Kewajiban

Sebaliknya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh individu sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap hak yang ia terima. Kewajiban bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan sosial sehingga setiap individu dapat menikmati haknya tanpa melanggar hak orang lain. Berikut merupakan contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari:

- ▷ Kewajiban untuk menaati peraturan sekolah dan hukum yang berlaku.
- ▷ Kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan.
- ▷ Kewajiban untuk menghormati orang lain dan tidak merugikan mereka.
- ▷ Kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

c. Hubungan Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban harus dijalankan secara beriringan. Jika seseorang hanya menuntut haknya tanpa menjalankan kewajibannya, maka akan muncul ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Sebagai contoh, seorang siswa yang ingin mendapatkan nilai tinggi dalam ujian harus menjalankan kewajibannya untuk belajar dengan tekun. Dengan kata lain, pemenuhan hak tidak akan optimal jika kewajiban diabaikan.

Hak dan Kewajiban di Lingkungan Sekolah, Masyarakat, dan Negara

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dalam berbagai lingkungan. Hak dan kewajiban ini berbeda sesuai dengan peran yang diemban dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai peserta didik, anggota masyarakat, maupun warga negara.

a. Hak dan Kewajiban di Lingkungan Sekolah

Sekolah adalah tempat utama dalam pembentukan karakter dan pengetahuan peserta didik. Di lingkungan sekolah, hak dan kewajiban harus dijalankan dengan seimbang agar tercipta suasana belajar yang kondusif.

1) Hak peserta didik di sekolah:

- ▷ Mendapatkan pendidikan yang layak
Setiap siswa berhak memperoleh pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- ▷ Mendapatkan perlakuan yang adil
Tidak ada diskriminasi berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.
- ▷ Mendapatkan fasilitas pendidikan
Sarana dan prasarana yang memadai harus tersedia agar siswa dapat belajar dengan baik.
- ▷ Berpartisipasi dalam kegiatan sekolah
Siswa memiliki hak untuk terlibat dalam organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang perkembangan diri.

2) Kewajiban peserta didik di sekolah:

- ▷ Belajar dengan sungguh-sungguh
Menuntut ilmu dengan serius adalah kewajiban utama siswa.

- ▷ Mematuhi tata tertib sekolah
Peraturan yang dibuat bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan kondusif.
- ▷ Menghormati guru dan teman
Sikap sopan dan saling menghormati adalah bagian dari pendidikan karakter.
- ▷ Menjaga kebersihan dan ketertiban
Setiap siswa wajib menjaga fasilitas sekolah dan tidak melakukan tindakan yang merugikan.

Lingkungan sekolah yang baik tidak hanya bergantung pada kebijakan sekolah, tetapi juga pada kesadaran siswa dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan seimbang.

b. Hak dan Kewajiban di Lingkungan Masyarakat

Sebagai anggota masyarakat, individu harus memahami bahwa hak-hak mereka bergantung pada kewajiban yang harus dijalankan agar tercipta keharmonisan sosial.

1) Hak individu dalam masyarakat:

- ▷ Hak untuk hidup dengan aman
Setiap warga masyarakat berhak untuk tinggal di lingkungan yang nyaman dan bebas dari ancaman.
- ▷ Hak atas fasilitas umum
Seperti jalan, transportasi, layanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya.
- ▷ Hak untuk menyampaikan pendapat
Setiap orang berhak berbicara dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan sosial.



*Hak Fasilitas Kesehatan –
Shutterstock.com/2465131945*

2) Kewajiban individu dalam masyarakat:

- ▷ Menghormati hak orang lain – Kebebasan individu tidak boleh melanggar hak orang lain.
- ▷ Berpartisipasi dalam kegiatan sosial – Gotong royong, kerja bakti, dan kegiatan keagamaan memperkuat solidaritas sosial.
- ▷ Menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan – Masyarakat yang tertib akan menciptakan suasana yang lebih nyaman untuk semua.

- ▷ Kolaborasi antara anggota masyarakat sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan.

c. Hak dan Kewajiban di Lingkungan Negara

Sebagai warga negara, individu memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi dan kewajiban yang harus dipenuhi demi kesejahteraan bersama.

1) Hak warga negara Indonesia:

- ▷ Hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan
Negara bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya.
- ▷ Hak atas perlindungan hukum
Setiap warga negara harus mendapatkan keadilan hukum yang adil.
- ▷ Hak berpartisipasi dalam pemerintahan
Termasuk memilih pemimpin dan menyampaikan aspirasi politik.

2) Kewajiban warga negara Indonesia:

- ▷ Menaati hukum dan peraturan negara
Hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban dan keadilan.
- ▷ Membayar pajak
Pajak adalah sumber utama pembangunan nasional.
- ▷ Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
Menghormati perbedaan adalah kunci keberagaman di Indonesia.
- ▷ Ikut serta dalam upaya bela negara
Bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun sosial.

Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Peserta didik merupakan bagian dari masyarakat pendidikan yang memiliki hak dan kewajiban dalam lingkungan sekolah, masyarakat, dan negara. Hak peserta didik adalah segala sesuatu yang mereka peroleh dalam proses pendidikan dan kehidupan sosial, sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang harus mereka jalankan untuk menjaga keseimbangan dalam lingkungan tersebut. Kesadaran akan hak dan kewajiban akan membantu peserta didik menjadi individu yang bertanggung jawab serta berkontribusi dalam membangun lingkungan yang harmonis.

a. Sebagai Anggota Sekolah

Di lingkungan sekolah, peserta didik diperkenalkan dengan berbagai hak dan kewajiban yang harus mereka pahami dan laksanakan dengan seimbang. Sekolah bukan hanya tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai wahana pembentukan karakter dan disiplin.

1) Hak Peserta Didik di Sekolah

- ▷ Hak atas pendidikan berkualitas: Setiap siswa berhak mendapatkan pembelajaran yang layak sesuai dengan standar pendidikan nasional.

- ▷ Hak atas lingkungan belajar yang aman: Peserta didik berhak merasa nyaman di sekolah tanpa adanya ancaman perundungan atau diskriminasi.
- ▷ Hak untuk memperoleh informasi dan sumber belajar: Mereka berhak mendapatkan akses terhadap buku, laboratorium, dan teknologi yang menunjang pendidikan.
- ▷ Hak untuk dievaluasi secara adil: Setiap siswa berhak mendapatkan penilaian yang objektif berdasarkan prestasi akademik dan sikapnya di sekolah.
- ▷ Hak untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi: Dalam batas etika yang berlaku, peserta didik berhak untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, organisasi sekolah, atau musyawarah OSIS.

2) Kewajiban Peserta Didik di Sekolah

- ▷ Kewajiban menaati peraturan sekolah: Peserta didik harus mengikuti tata tertib yang berlaku, seperti mengenakan seragam yang sesuai dan hadir tepat waktu.
- ▷ Kewajiban menghormati guru dan sesama siswa: Saling menghargai adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang harmonis.
- ▷ Kewajiban menjaga fasilitas sekolah: Setiap siswa harus ikut menjaga kebersihan dan kerapian kelas, perpustakaan, serta sarana sekolah lainnya.
- ▷ Kewajiban mengikuti proses pembelajaran dengan aktif: Siswa harus berpartisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- ▷ Kewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah: Kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab bersama.

b. Sebagai Anggota Masyarakat

Sebagai bagian dari masyarakat, peserta didik tidak hanya memiliki hak di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Interaksi dengan komunitas sekitarnya memungkinkan mereka belajar nilai-nilai sosial, budaya, dan kepedulian terhadap sesama.

1) Hak Peserta Didik sebagai Warga Masyarakat

- ▷ Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan budaya: Setiap individu berhak mengikuti kegiatan komunitas, seperti acara kebudayaan, kegiatan keagamaan, dan kerja bakti.
- ▷ Hak untuk mengembangkan bakat dan minat di luar sekolah: Peserta didik berhak mengikuti kursus atau ekstrakurikuler di luar sekolah yang dapat meningkatkan keterampilan mereka.
- ▷ Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara: Setiap warga masyarakat memiliki hak untuk dihargai tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau status ekonomi.
- ▷ Hak untuk memperoleh informasi dan berita yang benar: Dalam era digital, peserta didik berhak mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat bagi kehidupan mereka.
- ▷ Hak atas perlindungan sosial: Jika mengalami kesulitan atau masalah sosial, peserta didik berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, komunitas, atau pemerintah.

2) Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Masyarakat

- ▷ Kewajiban untuk menghormati hak orang lain: Setiap individu harus menghargai keberagaman dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain.

- ▷ Kewajiban menaati norma sosial dan hukum yang berlaku: Peserta didik harus mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat, seperti tidak melakukan tindakan kriminal atau vandalisme.
- ▷ Kewajiban berperan aktif dalam kegiatan sosial: Mereka dapat berpartisipasi dalam kerja bakti, program lingkungan, atau kegiatan kepemudaan.
- ▷ Kewajiban menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan: Misalnya, tidak melakukan kebisingan yang mengganggu tetangga atau tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan masyarakat.
- ▷ Kewajiban menjaga lingkungan sekitar: Kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga masyarakat.

Dengan memahami hak dan kewajiban ini, peserta didik dapat menjadi anggota masyarakat yang peduli, aktif, dan memiliki kontribusi positif terhadap lingkungannya.



Kewajiban menghormati: Shutterstock.com/1947956794

c. Sebagai Warga Negara

Dalam konteks negara, peserta didik juga memiliki hak dan kewajiban yang dijamin oleh konstitusi. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka harus memahami bahwa hak-hak yang mereka peroleh juga disertai dengan tanggung jawab untuk membangun negara yang lebih baik.

1) Hak Peserta Didik sebagai Warga Negara

- ▷ Hak atas pendidikan yang berkualitas dan setara: Negara bertanggung jawab menyediakan pendidikan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.
- ▷ Hak untuk memperoleh informasi yang benar: Warga negara berhak mendapatkan berita yang akurat serta tidak menyesatkan.
- ▷ Hak menyampaikan pendapat: Peserta didik dapat menyuarakan aspirasinya dalam diskusi publik atau kegiatan demokrasi di sekolah.
- ▷ Hak untuk berserikat dan berorganisasi: Misalnya, mengikuti OSIS atau organisasi kepemudaan di luar sekolah.

- ▷ Hak atas perlindungan hukum: Setiap warga negara, termasuk peserta didik, berhak mendapatkan keadilan hukum.
- ▷ Hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial: Negara wajib memberikan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja di masa depan.

2) Kewajiban Peserta Didik sebagai Warga Negara

- ▷ Kewajiban menaati hukum dan peraturan negara: Setiap warga negara harus patuh terhadap konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
- ▷ Kewajiban berperan dalam pembangunan nasional: Misalnya, dengan belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi generasi yang produktif.
- ▷ Kewajiban menjaga persatuan dan kesatuan bangsa: Tidak melakukan tindakan yang memicu perpecahan di masyarakat.
- ▷ Kewajiban berpartisipasi dalam demokrasi: Misalnya, dengan ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS sebagai bentuk latihan dalam sistem demokrasi.
- ▷ Kewajiban menjaga lingkungan dan sumber daya alam: Sebagai bagian dari bangsa, menjaga kelestarian lingkungan adalah tanggung jawab semua warga negara.



Jejak Pancasila

Dari hak pendidikan hingga hak mendapatkan udara bersih, Indonesia memiliki ribuan peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam pembahasan hak asasi manusia (HAM) di dunia. Bahkan, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB dan ikut serta dalam menyusun berbagai konvensi HAM internasional!



Contoh Soal

Soal 1

Hak seorang siswa dalam lingkungan sekolah adalah....

- a. Menyontek saat ujian agar mendapatkan nilai bagus
- b. Meminta fasilitas belajar yang layak dari sekolah
- c. Tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru
- d. Mengabaikan peraturan sekolah jika tidak setuju
- e. Mengabaikan guru saat menjelaskan di kelas

Jawaban Benar: b. Meminta fasilitas belajar yang layak dari sekolah

Pembahasan:

Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas belajar yang layak, seperti ruang kelas yang nyaman, buku pelajaran, serta lingkungan pendidikan yang mendukung. Namun, hak ini harus dibarengi dengan kewajiban, seperti menaati peraturan sekolah dan menghormati guru.

Soal 2

Salah satu bentuk kewajiban warga negara dalam menjaga kebersihan lingkungan adalah....

- a. Membuang sampah sembarangan
- b. Mengabaikan kerja bakti di lingkungan sekitar
- c. Mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan
- d. Meninggalkan limbah industri tanpa pengelolaan yang benar
- e. Menggunakan kendaraan pribadi untuk perjalanan dekat

Jawaban Benar: c. Mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan

Pembahasan:

Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan. Salah satu bentuk tanggung jawab ini adalah mengikuti gotong royong dalam membersihkan area sekitar agar tetap sehat dan nyaman untuk ditinggali.

Soal 3

Hak asasi manusia (HAM) dijamin dalam UUD 1945 pada pasal....

- a. Pasal 28A-28J
- b. Pasal 30 ayat (1)
- c. Pasal 31 ayat (2)
- d. Pasal 33 ayat (1)
- e. Pasal 27 ayat (3)

Jawaban Benar: a. Pasal 28A-28J

Pembahasan:

Hak asasi manusia di Indonesia dijamin dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945, yang mencakup berbagai hak fundamental seperti hak hidup, hak memperoleh pendidikan, dan hak berpendapat.



2. Kewarganegaraan Indonesia



Identitas Warga Negara – Shutterstock.com/2320409199

Pengertian dan Status Kewarganegaraan

a. Definisi Warga Negara

Istilah *warga negara* berasal dari kata Latin *civicus* yang berarti penduduk suatu komunitas. Dalam konteks modern, warga negara bukan hanya penduduk di suatu wilayah, tetapi individu yang memiliki status hukum yang sah dengan negara, disertai hak dan kewajiban tertentu. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk yang sah status kewarganegaraannya, baik melalui kelahiran, keturunan, atau faktor lain yang diatur hukum. Warga negara berhak atas perlindungan hukum, fasilitas publik, dan kebebasan sipil, serta wajib menaati hukum, membayar pajak, dan menjaga kestabilan negara. Aristoteles memandang warga negara sebagai individu yang aktif dalam kehidupan politik. Austin Ranney menekankan aspek legal dan hak-kewajiban yang melekat. Koerniatmanto S. menyoroti pentingnya kedudukan hukum berdasarkan konstitusi. Sementara itu, A.S. Hikam melihat kewarganegaraan sebagai keterlibatan aktif dalam komunitas dan kehidupan berbangsa.

b. Cara Menentukan Status Kewarganegaraan

Setiap negara memiliki aturan berbeda dalam menentukan status kewarganegaraan, yang merupakan identitas hukum antara individu dan negara, disertai hak dan kewajiban. Tidak semua penduduk otomatis menjadi warga negara. Di Indonesia, kewarganegaraan diperoleh melalui prinsip hukum yang diatur undang-undang, termasuk melalui asas-asas umum dan proses naturalisasi, yaitu permohonan kewarganegaraan secara administratif kepada pemerintah.

1) Asas Penentu Status Warga Negara

Setiap negara memiliki sistem hukum yang mengatur status kewarganegaraan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Berikut adalah beberapa asas utama yang digunakan dalam menentukan status kewarganegaraan:

▷ *Ius Sanguinis* (Asas Keturunan)

Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan tempat kelahiran. Dengan demikian, individu akan memperoleh kewarganegaraan dari orang tuanya, meskipun ia lahir di luar wilayah negara tersebut. Contoh penerapan asas ini:

- Jepang dan Jerman menerapkan asas *ius sanguinis* secara ketat. Seorang anak yang lahir di Jepang atau Jerman dari orang tua yang bukan warga negara negara tersebut tidak akan otomatis mendapatkan kewarganegaraan Jepang atau Jerman.
- Indonesia juga menggunakan prinsip *ius sanguinis*, di mana anak yang lahir dari ayah atau ibu warga negara Indonesia tetap memiliki status kewarganegaraan Indonesia, meskipun lahir di luar negeri.

Implikasi hukum dan sosial:

- Asas ini menjaga keberlanjutan kewarganegaraan dalam suatu keluarga meskipun mereka bermigrasi ke negara lain.
- Dalam beberapa kasus, seseorang bisa menjadi stateless (tanpa kewarganegaraan) jika kedua orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas.
- Dapat menimbulkan masalah bagi anak-anak imigran yang lahir di negara dengan sistem *ius sanguinis* karena mereka tidak otomatis menjadi warga negara tempat kelahirannya.



Kebangsaan berdasarkan keturunan – Shutterstock.com/2369568051

▷ *Ius Soli* (Asas Tempat Lahir)

Asas *ius soli* (*law of the soil*) menyatakan bahwa seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya, tanpa memandang kewarganegaraan orang tuanya. Prinsip ini umum digunakan di negara-negara dengan sejarah imigrasi yang tinggi. Contoh penerapan asas ini:

- Amerika Serikat dan Kanada menerapkan prinsip *ius soli*. Setiap anak yang lahir di wilayah AS atau Kanada otomatis menjadi warga negara negara tersebut, tanpa memperhitungkan kewarganegaraan orang tuanya.

- Brasil dan Argentina juga menerapkan sistem yang sama, sehingga anak yang lahir di negara tersebut langsung mendapatkan kewarganegaraan Brasil atau Argentina.

Implikasi hukum dan sosial:

- Sistem ini membantu mengurangi risiko seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan (stateless).
- Meningkatkan keanekaragaman masyarakat karena banyak anak dari keluarga imigran yang otomatis menjadi warga negara tempat kelahirannya.
- Dapat menimbulkan perdebatan politik, terutama di negara-negara yang memiliki kebijakan ketat terhadap imigrasi.

Namun, beberapa negara yang menerapkan asas *ius soli* tetap memiliki batasan tertentu, seperti pengecualian bagi anak diplomat asing yang lahir di wilayah mereka.

▷ Naturalisasi (Pewarganegaraan)

Naturalisasi adalah proses hukum yang memungkinkan seseorang yang bukan warga negara asli untuk memperoleh kewarganegaraan setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, seseorang dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan memenuhi syarat berikut:

- Berusia minimal 18 tahun atau telah menikah
Pemohon harus telah mencapai usia dewasa atau telah menikah secara sah menurut hukum yang berlaku.
- Memiliki masa tinggal yang cukup di Indonesia
Pemohon harus sudah berdomisili di wilayah Indonesia setidaknya selama lima tahun berturut-turut atau sepuluh tahun tidak berturut-turut sebelum mengajukan permohonan kewarganegaraan.
- Memiliki kondisi fisik dan mental yang sehat
Kesehatan jasmani dan rohani menjadi salah satu syarat utama agar individu dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara.
- Menguasai bahasa Indonesia dan memahami dasar negara
Pemohon harus memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta memahami dan menerima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tidak memiliki catatan kriminal berat
Pemohon tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya mencapai satu tahun penjara atau lebih.
- Tidak akan kehilangan kewarganegaraan asal akibat memperoleh kewarganegaraan Indonesia
Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seseorang akan kehilangan kewarganegaraan asalnya, ia harus menerima konsekuensi ini dan bersedia menjadi warga negara Indonesia sepenuhnya.
- Memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan tetap

Pemohon harus dapat membuktikan bahwa ia memiliki penghidupan yang layak dan tidak menjadi beban negara.

- Membayar biaya administrasi kewarganegaraan kepada negara

Proses naturalisasi memerlukan biaya yang dibayarkan oleh pemohon kepada pemerintah. Contohnya, di Amerika Serikat, naturalisasi dapat dilakukan setelah lima tahun tinggal dengan status penduduk tetap. Di Indonesia, warga negara asing dapat menjadi WNI setelah memenuhi syarat sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

2) Penentuan Status Warga Negara di Indonesia

Di Indonesia, status kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, seseorang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui berbagai cara.

▷ Warga Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Setiap individu yang diakui sebagai warga negara berdasarkan peraturan hukum dan perjanjian antara Indonesia dengan negara lain sebelum diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan, tetap memiliki status sebagai WNI.

▷ Kewarganegaraan Berdasarkan Keturunan dan Pernikahan

- Anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu WNI.
- Anak yang lahir dari ayah WNI dan ibu warga negara asing.
- Anak yang lahir dari ibu WNI dan ayah warga negara asing, dengan syarat diakui sebelum berusia 18 tahun.

▷ Kewarganegaraan Berdasarkan Tempat Lahir

Indonesia juga menerapkan prinsip *ius soli* dalam kondisi tertentu, seperti:

- Anak yang lahir di Indonesia dengan status kewarganegaraan orang tua yang tidak jelas.
- Anak yang baru lahir dan ditemukan di Indonesia dengan orang tua yang tidak diketahui keberadaannya.

▷ Pewarganegaraan Melalui Proses Naturalisasi

Warga negara asing yang ingin menjadi WNI dapat mengajukan permohonan naturalisasi dengan memenuhi persyaratan, termasuk:

- Berusia minimal 18 tahun.
- Telah tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Tidak memiliki catatan kriminal.
- Mampu berbahasa Indonesia dan memahami nilai-nilai Pancasila serta UUD 1945.



3) Konsekuensi Asas Kewarganegaraan

▷ Risiko Tanpa Kewarganegaraan (*Statelessness*)

Jika seseorang lahir di negara yang menerapkan *ius sanguinis*, tetapi orang tuanya tidak memiliki kewarganegaraan yang jelas, anak tersebut bisa menjadi *stateless*. Hal ini dapat menghambat akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

▷ Kemungkinan Memiliki Kewarganegaraan Ganda

Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan ganda (*dual citizenship*), sementara yang lain tidak. Indonesia secara umum tidak mengakui kewarganegaraan ganda, kecuali dalam kasus tertentu seperti anak-anak hasil perkawinan campuran yang diberi opsi memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun.

Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Setiap individu yang memiliki status sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan serta fasilitas yang diberikan oleh negara. Sebaliknya, mereka juga memiliki kewajiban untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta ikut serta dalam pembangunan nasional. Hak dan kewajiban ini telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Hak dan kewajiban warga negara bersifat saling melengkapi dan harus dijalankan secara seimbang agar kehidupan sosial yang harmonis dapat terwujud. Jika hak-hak warga negara tidak dihormati, maka kehidupan bernegara akan terganggu. Sebaliknya, jika kewajiban tidak dipenuhi, akan terjadi ketidakseimbangan sosial yang dapat merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan.

a. Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara telah mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Hak-hak ini meliputi hak dasar sebagai manusia serta hak yang berhubungan dengan kewarganegaraan, sedangkan kewajiban mencakup tanggung jawab warga negara terhadap negara dan sesama anggota masyarakat. Berikut adalah hak dan kewajiban warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945:

1) Terkait Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI Tahun 1945

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun. Beberapa hak yang tercantum dalam UUD NRI 1945 antara lain:

▷ Pasal 28A – Hak untuk Hidup

- Setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya dengan aman dan layak.
- Hak hidup ini mencakup perlindungan dari ancaman yang dapat membahayakan jiwa, seperti kejahatan, perang, atau bencana alam.

▷ Pasal 28B – Hak atas Keluarga dan Perlindungan Anak

- Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

▷ Pasal 28C – Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

- Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- Setiap individu juga memiliki hak untuk memperjuangkan kesejahteraannya, baik secara pribadi maupun kolektif, demi kepentingan bangsa dan negara.

▷ Pasal 28D – Hak atas Perlakuan Hukum yang Adil

- Setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil tanpa diskriminasi.
- Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta imbalan yang adil sesuai dengan upaya yang dilakukan.
- Warga negara juga berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan serta tidak boleh diperlakukan secara tidak adil dalam sistem hukum.

▷ Pasal 28E – Hak Kebebasan Beragama, Berpendapat, dan Berorganisasi

- Setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
- Setiap orang berhak menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tulisan, serta menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut.
- Setiap warga negara berhak untuk berkumpul, berserikat, dan membentuk organisasi guna menyalurkan aspirasi dan kepentingannya.

▷ Pasal 28F – Hak atas Informasi dan Komunikasi

- Setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi guna mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya.
- Hak ini mencakup kebebasan untuk mengakses, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi dengan berbagai cara, termasuk melalui media elektronik dan cetak.

▷ Pasal 28G – Hak atas Perlindungan Diri

Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang berada dalam kekuasaannya. Hak ini juga

mencakup jaminan rasa aman dari ancaman ketakutan atau pemaksaan yang dapat menghambat individu dalam mengekspresikan hak asasinya.

Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan serta perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Jika seseorang mengalami ancaman politik dari negara lain, ia juga berhak untuk mengajukan perlindungan atau suaka politik.

Hak ini menegaskan bahwa setiap individu harus dilindungi dari segala bentuk ancaman, baik secara fisik maupun mental. Negara wajib memastikan warganya merasa aman, bebas dari diskriminasi, penyiksaan, serta segala bentuk eksploitasi yang merendahkan martabat manusia.



Hak Perlindungan Memilih – Shutterstock.com/2158264555

▷ Pasal 28H – Hak atas Kesejahteraan dan Lingkungan yang Layak

- Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Hal ini mencakup hak atas tempat tinggal yang layak, lingkungan yang sehat, serta akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
- Setiap individu berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, termasuk dalam hal pekerjaan dan keadilan hukum, tanpa diskriminasi.
- Negara wajib menyediakan jaminan sosial yang memungkinkan setiap warga negara untuk berkembang sebagai manusia yang bermartabat.
- Hak kepemilikan pribadi juga dijamin oleh negara, dan kepemilikan tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
- Pasal ini menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat adalah prioritas utama negara. Tidak hanya dalam bentuk ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial, kesehatan, dan keseimbangan lingkungan hidup.

▷ Pasal 28I – Hak Asasi yang Tidak Dapat Dikurangi

Beberapa hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, kebebasan berpikir, kebebasan beragama, serta perlindungan dari diskriminasi dan perbudakan, merupakan hak mutlak yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun.

- Setiap individu berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.
- Hak budaya dan identitas masyarakat tradisional harus dihormati serta dijaga kelestariannya seiring perkembangan zaman.
- Negara bertanggung jawab atas perlindungan, penegakan, serta pengembangan hak asasi manusia, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.
- Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, negara wajib mengatur, menjamin, serta menuangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hak dalam bidang Kewarganegaraan

Beberapa hak yang berkaitan dengan kewarganegaraan, antara lain:

▷ Pasal 23A

Setiap warga negara wajib membayar pajak yang diatur oleh undang-undang.

▷ Pasal 26

Warga negara adalah orang Indonesia asli atau orang asing yang telah disahkan sebagai warga negara berdasarkan undang-undang.

▷ Pasal 27

- Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
- Hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak.
- Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

▷ Pasal 28

Hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

▷ Pasal 29

Hak untuk memeluk agama dan beribadah sesuai kepercayaan.

▷ Pasal 30 Ayat (1)

Hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

▷ Pasal 31

- Hak untuk mendapatkan pendidikan.
- Hak untuk memperoleh pendidikan dasar secara gratis yang dibiayai oleh pemerintah.
- Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan nasional.
- Anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

▷ Pasal 32

Hak untuk memajukan kebudayaan nasional dan menjaga bahasa daerah sebagai warisan budaya.

▷ Pasal 33

- Perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan.

- Cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara.
- Sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

▷ Pasal 34

- Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
- Negara wajib mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
- Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan layanan publik.

3) Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945

Selain memiliki hak, setiap warga negara juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa kewajiban utama warga negara Indonesia:

▷ Pasal 27 Ayat (1) – Kewajiban Mematuhi Hukum

- Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum serta berkewajiban untuk menaati peraturan yang berlaku.
- Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum, sehingga setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya.

▷ Pasal 27 Ayat (3) – Kewajiban Bela Negara

- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara demi menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia.
- Bentuk bela negara dapat berupa pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer, atau keterlibatan dalam organisasi sosial yang mendukung pertahanan nasional.

▷ Pasal 28J – Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain

- Dalam menjalankan haknya, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain.
- Hak individu tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau mengancam ketertiban umum.

▷ Pasal 29 Ayat (2) – Kewajiban Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Masing-Masing

- Setiap warga negara wajib menjalankan ibadah dan menaati ajaran agamanya dengan penuh tanggung jawab.
- Selain itu, individu juga harus menghormati perbedaan keyakinan dan tidak memaksakan agama kepada orang lain.

▷ Pasal 30 Ayat (1) – Kewajiban Menjaga Keamanan dan Ketertiban

- Setiap warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
- Hal ini dapat dilakukan melalui kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta bekerja sama dengan aparat dalam mewujudkan lingkungan yang aman.



Kewajiban menjalankan agama – Shutterstock.com/1722656113, shutterstock.com/1781837468

- ▷ Pasal 31 Ayat (2) – Kewajiban Mengikuti Pendidikan Dasar
 - Setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam sistem pendidikan nasional.
 - Negara juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga
- ▷ Pasal 28J – Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain dan Menjalankan Hak dengan Tanggung Jawab
 - Setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, individu harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh hukum demi menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, serta demi mempertahankan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
 - Hak dan kebebasan individu tidak boleh merugikan orang lain atau mengganggu kepentingan umum. Oleh karena itu, negara menetapkan batasan hukum untuk menghindari penyalahgunaan hak.
- ▷ Pasal 23A – Kewajiban Membayar Pajak
 - Pajak dan pungutan lain yang bersifat wajib untuk kepentingan negara diatur dalam undang-undang.
 - Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan serta penyediaan fasilitas umum bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- ▷ Pasal 30 – Kewajiban Membela Negara dan Berpartisipasi dalam Keamanan
 - Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
 - Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sipil.
 - Bela negara tidak hanya berarti bergabung dengan militer, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, kesadaran hukum, serta berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar.

▷ Pasal 31 – Kewajiban Mengikuti Pendidikan

- Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sebagaimana telah diatur dalam sistem pendidikan nasional.
- Negara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Pendidikan adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap warga negara. Dengan mendapatkan pendidikan yang layak, individu dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta berkontribusi dalam kemajuan negara.

b. Berdasarkan Peraturan di Bawah UUD NRI Tahun 1945

Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), hak dan kewajiban warga negara juga diperjelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, serta menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang mencakup hak serta kewajiban warga negara:

1) Kebebasan Berpendapat (UU No. 9 Tahun 1998)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan hak setiap warga negara dalam menyatakan pendapatnya, baik secara lisan maupun tertulis, terutama di tempat umum. Kebebasan ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam negara demokratis.

Namun, dalam pelaksanaannya, kebebasan berpendapat tetap harus memperhatikan norma hukum yang berlaku, menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta tidak mengandung unsur provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tidak hanya merupakan hak, tetapi juga harus disertai dengan tanggung jawab.



Hak Kebebasan Berpendapat – Shutterstock.com/1934467196

2) Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara khusus membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut, dikurangi, atau dibatasi tanpa alasan yang sah. Hak ini mencakup berbagai aspek, seperti:

- ▷ Hak untuk hidup, memperoleh keadilan, dan mendapatkan perlindungan hukum.
- ▷ Hak untuk bebas dari penyiksaan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi.
- ▷ Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Peraturan ini juga mengatur bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM setiap warga negara tanpa pengecualian.

3) Hak Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja (UU No. 13 Tahun 2003)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur hak-hak dasar tenaga kerja, termasuk hak untuk mendapatkan upah yang layak, kesempatan kerja yang sama, serta perlakuan yang adil dari perusahaan. Selain itu, peraturan ini juga meliputi:

- ▷ Hak pekerja atas kondisi kerja yang aman dan nyaman.
- ▷ Hak tenaga kerja perempuan, termasuk cuti hamil dan perlindungan dari diskriminasi gender.
- ▷ Hak pekerja untuk berserikat, berkumpul, dan memperjuangkan hak-haknya dalam hubungan industrial.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap perusahaan dan instansi kerja mematuhi aturan ini guna menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas nasional.

4) Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini bertujuan untuk:

- ▷ Mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- ▷ Menjamin kelestarian sumber daya alam bagi generasi mendatang.
- ▷ Mengatur tanggung jawab perusahaan dan individu dalam menjaga lingkungan.
- ▷ Menyediakan mekanisme sanksi bagi pelanggar hukum lingkungan.

Melalui undang-undang ini, setiap warga negara memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian alam dengan cara mengurangi limbah, mengelola sampah dengan bijak, serta tidak melakukan kerusakan ekosistem.

5) Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan revisi dari UU Perlindungan Anak yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara maksimal. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini meliputi:

- ▷ Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, serta kejahatan seksual.



Perlindungan Anak – Shutterstock.com/2035256672

- ▷ Hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan bebas dari eksploitasi.
- ▷ Tanggung jawab negara, keluarga, dan masyarakat dalam memberikan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Selain itu, undang-undang ini juga mengatur sanksi bagi individu atau lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah.

Peran dan Tanggung Jawab Warga Negara

Setiap individu yang menjadi bagian dari suatu negara memiliki peran serta tanggung jawab dalam mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Peran warga negara tidak hanya terbatas pada kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga mencakup partisipasi aktif dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan Pancasila berperan penting dalam membentuk karakter warga negara yang memiliki pola pikir kritis, rasional, serta kreatif agar mampu berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Melalui proses pembelajaran yang berbasis nilai-nilai Pancasila, diharapkan setiap warga negara, termasuk peserta didik, dapat memahami pentingnya berpikir logis, analitis, dan inovatif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjadi individu yang aktif dalam membangun bangsa dan mewujudkan kehidupan bernegara yang harmonis serta sejahtera.

a. Kategori Peran Warga Negara

Menurut Cholisin (1996), peran warga negara dalam kehidupan bernegara dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu:

▷ Peran Pasif

Peran pasif berarti warga negara hanya menjalankan kewajiban dasar mereka tanpa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kenegaraan. Mereka patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, tetapi tidak berkontribusi dalam pengambilan keputusan atau pembangunan. Contohnya termasuk membayar pajak tepat waktu dan menaati peraturan lalu lintas.

▷ Peran Aktif

Peran aktif mencerminkan partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan sosial, seperti memberikan suara dalam pemilu, menghadiri diskusi publik, serta mengikuti organisasi sosial dan politik. Dengan ikut serta dalam proses demokrasi, warga negara dapat memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

▷ Peran Positif

Dalam peran ini, warga negara berperan dalam meminta hak-hak mereka kepada negara guna meningkatkan kesejahteraan hidup. Contohnya adalah mengajukan permintaan pemasangan listrik atau air bersih kepada pemerintah daerah agar kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.

▷ Peran Negatif

Peran negatif terjadi ketika warga negara menginginkan batasan antara pemerintah dan kehidupan pribadinya. Dalam hal ini, individu menuntut agar negara tidak ikut campur dalam aspek tertentu, seperti kebebasan beragama dan hak privasi.

b. Peran Warga di Berbagai Aspek Kehidupan

Selain keempat peran tersebut, warga negara juga memiliki tanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang hukum, politik, sosial budaya, dan ekonomi.

▷ Dalam Bidang Hukum

Dalam kehidupan bernegara, kepatuhan terhadap hukum merupakan aspek penting yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib menaati seluruh peraturan yang berlaku. Peran dan tanggung jawab warga negara dalam bidang hukum tercermin melalui berbagai tindakan, seperti mematuhi hukum, berpartisipasi dalam perumusan

aturan, mendukung serta menanggapi kebijakan hukum pemerintah, berkontribusi dalam menciptakan aparat penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab, serta mendorong terciptanya penyelenggaraan hukum yang adil dan beradab di tengah masyarakat..

▷ Dalam Bidang Politik

Keterlibatan dalam dunia politik merupakan bentuk tanggung jawab warga negara dalam menjaga stabilitas demokrasi dan pemerintahan. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti bergabung dalam organisasi atau partai politik, mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat, serta mendukung terciptanya integrasi nasional melalui partisipasi politik yang sehat. Selain itu, warga negara juga berkontribusi dengan ikut serta dalam pemilihan umum sebagai pemilih yang aktif dan cerdas, sehingga proses demokrasi berjalan secara adil dan transparan.

▷ Dalam Bidang Sosial dan Budaya

Dalam kehidupan sosial dan budaya, warga negara memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga keharmonisan serta menghargai keberagaman yang ada di tengah masyarakat. Sebagai negara multikultural, Indonesia menuntut warganya untuk menegakkan persatuan nasional melalui sikap saling menghormati dan toleransi. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan aktif dalam kegiatan sosial dan budaya di lingkungan sekitar, membangun kerja sama dan gotong royong, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Warga negara juga diharapkan saling membantu demi kesejahteraan sosial, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta menghormati perbedaan budaya, agama, ras, dan golongan. Selain itu, menjalin komunikasi antar kelompok untuk menghindari konflik, melestarikan budaya daerah sebagai identitas nasional, dan berkontribusi dalam pendidikan demi menciptakan generasi muda yang cerdas dan kompetitif merupakan bagian penting dari tanggung jawab tersebut.



Melestarikan Budaya Daerah – Shutterstock.Com/ 2131958475

▷ Dalam Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi, warga negara memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang menekankan asas kekeluargaan dalam penyusunan sistem perekonomian. Peran ini dapat diwujudkan melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang berpihak pada kepentingan masyarakat, mendukung usaha kecil dan menengah (UKM), serta membayar pajak sebagai

kontribusi terhadap pembangunan nasional. Selain itu, warga negara juga diharapkan menjauhi praktik ekonomi yang merugikan, seperti korupsi dan penyelewengan, serta mendorong inovasi dan sektor industri kreatif untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi bangsa.

▷ Dalam Bidang Pertahanan dan Keamanan

Bidang pertahanan dan keamanan merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas serta ketahanan negara. Sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta dalam upaya pertahanan negara. Peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan, seperti bergabung dengan TNI atau POLRI bagi yang memenuhi kualifikasi, mengikuti program bela negara untuk memperkuat ketahanan nasional, serta aktif menjaga keamanan lingkungan dengan melaporkan tindakan mencurigakan. Warga negara juga diharapkan menghindari segala bentuk provokasi yang dapat memicu konflik sosial serta mengawasi aktivitas kelompok atau individu yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.



Jejak Pancasila

Meskipun Indonesia tidak secara umum mengakui kewarganegaraan ganda, anak hasil perkawinan campuran bisa memiliki dua kewarganegaraan hingga usia 18 tahun, dan wajib memilih salah satunya sebelum usia 21. Jika tidak memilih, ia otomatis kehilangan kewarganegaraan Indonesia.



Contoh Soal

Soal 1

Berikut ini yang bukan termasuk syarat naturalisasi biasa untuk menjadi Warga Negara Indonesia adalah....

- a. Bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut
- b. Berusia minimal 18 tahun
- c. Bisa berbahasa Indonesia
- d. Memiliki prestasi di bidang olahraga
- e. Tidak pernah terlibat tindak pidana

Jawaban Benar: d. Memiliki prestasi di bidang olahraga

Pembahasan:

Syarat utama naturalisasi biasa mencakup tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, berusia 18 tahun ke atas, menguasai bahasa Indonesia, serta memiliki kelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana. Prestasi di bidang olahraga hanya menjadi pertimbangan untuk naturalisasi istimewa.

Soal 2

Indonesia menganut sistem kewarganegaraan....

- a. ius soli
- b. ius sanguinis
- c. ius soli dan ius sanguinis terbatas
- d. Kewarganegaraan ganda
- e. ius matrimonii

Jawaban Benar: c. ius soli dan ius sanguinis terbatas

Pembahasan:

Indonesia menggunakan ius soli (berdasarkan tempat lahir) dan ius sanguinis terbatas (berdasarkan keturunan dengan aturan tertentu). Kewarganegaraan ganda hanya diberikan kepada anak-anak dalam situasi tertentu dan harus memilih kewarganegaraan saat mencapai usia 18 tahun.

Soal 3

Warga negara asing yang ingin menjadi WNI harus mengucapkan sumpah setia kepada....

- a. Pemerintah negara asal
- b. Undang-Undang Dasar negara asal
- c. Negara Indonesia dan Pancasila
- d. Dewan Perwakilan Rakyat
- e. Mahkamah Konstitusi

Jawaban Benar: c. Negara Indonesia dan Pancasila

Pembahasan:

Setiap orang yang ingin menjadi Warga Negara Indonesia harus mengucapkan sumpah setia kepada NKRI dan Pancasila, yang menegaskan kesetiaannya kepada negara, hukum, dan ideologi bangsa Indonesia.



3. Sistem Pertahanan dan Kemanan Negara



Keamanan Negara – Shutterstock.com/ 2504417351

Makna Pertahanan dan Keamanan Negara

Pertahanan dan keamanan suatu negara adalah dua konsep yang memiliki hubungan erat dan tak terpisahkan dalam menjaga kedaulatan, stabilitas, serta kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya merupakan aspek mendasar dalam memastikan bahwa sebuah negara tetap eksis serta mampu melindungi kepentingan nasionalnya.

Keamanan negara berfungsi untuk menjaga kestabilan internal suatu negara dengan memastikan ketertiban masyarakat serta perlindungan terhadap ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, pertahanan negara bertujuan melindungi negara dari ancaman yang bersifat militer, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya strategis, termasuk kekuatan militer dan nonmiliter.

Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut mengenai konsep pertahanan negara, konsep keamanan negara, serta bagaimana keduanya saling berkaitan.

a. Konsep Pertahanan Negara

Pertahanan negara didefinisikan sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh suatu negara untuk melindungi kedaulatannya dari ancaman dan serangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam menjalankan sistem pertahanan, negara memanfaatkan berbagai elemen, seperti sumber daya manusia, peralatan militer, teknologi, serta strategi nasional yang terorganisir. Beberapa aspek utama dalam sistem pertahanan negara meliputi:

▷ Menjaga Kedaulatan dan Wilayah Negara

Pertahanan negara bertujuan untuk melindungi batas wilayah dan kedaulatan negara dari ancaman eksternal. Hal ini mencakup pengendalian penuh atas wilayah negara dan mencegah intervensi pihak asing.

▷ Ketahanan terhadap Ancaman

Negara harus mampu mengidentifikasi dan merespons berbagai ancaman yang muncul, baik dalam bentuk serangan militer, terorisme, ancaman siber, maupun ancaman nonmiliter seperti bencana alam dan krisis ekonomi.

▷ Kekuatan Militer

Komponen utama dalam pertahanan negara adalah kekuatan militer, yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ketiga kekuatan ini dilengkapi dengan peralatan modern, teknologi canggih, serta personel yang terlatih untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.

▷ Kerja Sama Internasional dalam Pertahanan

Negara juga menjalin kerja sama internasional melalui perjanjian pertahanan, aliansi militer, serta forum keamanan global dan regional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional dan meningkatkan solidaritas antarnegara.



Kerjasama Bidang Pertahanan –kemhan.go.id/

b. Konsep Keamanan Negara

Keamanan negara mencakup upaya menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dari ancaman yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Konsep keamanan tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa elemen penting dalam sistem keamanan negara adalah:

▷ Keamanan dalam Negeri

Negara bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta pencegahan terhadap berbagai ancaman domestik seperti kejahatan, konflik sosial, dan terorisme.

▷ Keamanan Eksternal

Keamanan negara juga mencakup perlindungan dari ancaman eksternal, baik dalam bentuk serangan militer dari negara lain maupun ancaman nonmiliter seperti perang siber, spionase, dan sabotase ekonomi.

▷ Ketahanan Ekonomi

Stabilitas ekonomi adalah bagian dari keamanan nasional. Jika ekonomi suatu negara terganggu, maka dapat terjadi ketegangan sosial yang berujung pada ketidakstabilan politik dan keamanan.

▷ Keamanan Lingkungan

Lingkungan hidup yang sehat juga merupakan aspek penting dalam keamanan negara. Ancaman seperti perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional.

c. Hubungan Antara Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan negara merupakan dua konsep yang saling melengkapi dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas suatu negara. Keduanya memiliki peran penting dalam menghadapi berbagai ancaman yang bisa mengganggu keutuhan negara.

- 1) Pertahanan negara lebih berfokus pada perlindungan dari ancaman eksternal, terutama yang bersifat militer. Negara mengandalkan kekuatan militer sebagai garda terdepan dalam menghadapi serangan dari luar negeri.
- 2) Keamanan negara lebih menitikberatkan pada stabilitas internal. Negara memastikan bahwa masyarakat hidup dalam keadaan yang aman, sejahtera, serta terlindungi dari berbagai ancaman sosial, ekonomi, maupun politik.

Dalam praktiknya, strategi pertahanan dan keamanan negara sering dikembangkan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek militer, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, negara dapat tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dasar Hukum Pertahanan dan Keamanan di Indonesia



Bentuk Pertahanan – Shutterstock.com/1830778049

Dalam menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, suatu negara memerlukan landasan hukum yang kuat agar segala kebijakan dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan, kedaulatan, serta perlindungan terhadap warga negaranya. Di Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan negara diatur dalam berbagai ketentuan hukum, mulai dari konstitusi tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), hingga undang-undang dan peraturan lain yang mendukung penerapannya.

a. UUD NRI Tahun 1945

Sebagai hukum tertinggi di Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi dasar utama dalam pembentukan kebijakan pertahanan dan keamanan nasional. Konstitusi ini tidak hanya memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, tetapi juga mengatur peran lembaga negara, aparat pertahanan, serta kepolisian dalam menjaga stabilitas dan ketertiban nasional. Berikut adalah beberapa pasal dalam UUD NRI 1945 yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara:

1) Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI 1945

- ▷ Berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
- ▷ Alinea ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan bagi seluruh rakyatnya dalam segala aspek kehidupan, termasuk dari ancaman terhadap kedaulatan dan ketertiban nasional.

2) Pasal 27 Ayat (3)

- ▷ Menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
- ▷ Ini menunjukkan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam mempertahankan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

3) Pasal 30 Ayat (1)

- ▷ Mengatur bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
- ▷ Hal ini memperjelas bahwa keamanan nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat, tetapi juga menjadi kewajiban bersama.

4) Pasal 30 Ayat (2)

- ▷ Berbunyi: "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung."
- ▷ Sistem ini dikenal sebagai Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), yang mengintegrasikan peran militer dan kepolisian dengan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan.

5) Pasal 30 Ayat (3)

Menyatakan bahwa "Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara." Ini menegaskan bahwa TNI adalah garda terdepan dalam menjaga pertahanan nasional.

6) Pasal 30 Ayat (4)

- ▷ Berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum."
- ▷ Kepolisian bertindak sebagai institusi yang berperan dalam keamanan dalam negeri dan penegakan hukum.

b. Undang-Undang Terkait

Selain UUD 1945, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia juga diatur dalam beberapa undang-undang yang secara spesifik mengatur berbagai aspek pertahanan dan keamanan negara, antara lain:

1) UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Mengatur prinsip-prinsip dasar, struktur, dan fungsi pertahanan negara. Undang-undang ini juga mencakup penetapan kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sebagai tujuan utama pertahanan nasional.

2) UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Mengatur organisasi, tugas, fungsi, serta kewenangan TNI dalam menjalankan sistem pertahanan negara. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa TNI terdiri dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

3) UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-undang ini mengatur struktur dan fungsi aparatur sipil negara, termasuk pejabat dan pegawai yang terlibat dalam bidang pertahanan dan keamanan.

4) UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

Mengatur mekanisme pengerahan dan penggunaan sumber daya nasional dalam rangka pertahanan negara. Undang-undang ini juga mencakup pembentukan dan pelatihan komponen cadangan serta upaya bela negara yang melibatkan masyarakat sipil.

c. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden

Selain undang-undang, terdapat berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan presiden untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam UUD NRI 1945 dan undang-undang terkait. Beberapa di antaranya adalah:

1) PP RI No. 3 Tahun 2021

Mengatur pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Peraturan ini mencakup hal-hal mendetail mengenai organisasi, tugas, dan fungsi instansi-instansi terkait dalam bidang pertahanan dan keamanan.

2) Perpres RI No. 8 Tahun 2021

Menetapkan kebijakan umum pertahanan negara untuk periode 2020-2024. Peraturan ini mengatur strategi dan langkah-langkah dalam bidang pertahanan dan keamanan nasional.

d. Peraturan Daerah

Di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing. Peraturan daerah dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

- ▷ Pengendalian kerusuhan dan gangguan ketertiban masyarakat.
- ▷ Penegakan ketentuan keamanan lingkungan.
- ▷ Peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya.

e. Perjanjian Internasional

Indonesia juga menjalin kerja sama dengan berbagai negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Perjanjian internasional ini mencakup:

- ▷ Kerja sama bilateral dan multilateral dalam pertahanan, seperti kerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam hal keamanan kawasan.
- ▷ Aliansi militer dan kerja sama strategis, misalnya dalam bidang latihan militer bersama, pengembangan teknologi pertahanan, serta pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
- ▷ Perjanjian keamanan regional, seperti kerja sama dalam penanggulangan terorisme, perbatasan, serta ancaman siber.

Melalui perjanjian-perjanjian ini, Indonesia memperkuat posisinya dalam sistem pertahanan global, memastikan integritas wilayahnya tetap terjaga, serta meningkatkan kapasitas pertahanan dalam menghadapi berbagai ancaman.



Perjanjian Negara ASEAN - waa.com.tr

Sistem Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia merupakan suatu sistem terpadu yang mencakup berbagai elemen, baik dari sektor militer maupun sipil, yang bekerja sama dalam menjaga stabilitas, integritas, dan kedaulatan negara. Sistem ini didasarkan pada prinsip pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata), yang menempatkan seluruh komponen bangsa sebagai bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Sistem ini bertujuan untuk menjaga negara dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaannya, sistem ini melibatkan berbagai lembaga dan instansi pemerintah, kebijakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat. Berikut adalah komponen utama dalam sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia:

a. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara yang bertugas melindungi kedaulatan dan keamanan nasional dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Tugas utamanya mencakup menjaga kedaulatan negara dari agresi luar, termasuk perang siber dan spionase, serta melaksanakan operasi militer selain perang seperti penanggulangan bencana, pemberantasan terorisme, dan pengamanan wilayah perbatasan. Dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, TNI juga bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya. TNI terdiri dari tiga matra utama, yaitu Angkatan Darat yang bertanggung jawab atas pertahanan wilayah daratan,

Angkatan Laut yang mengamankan wilayah perairan dan pulau-pulau terluar, serta Angkatan Udara yang melindungi wilayah udara dan mendukung operasi militer. Selain itu, TNI memiliki pasukan khusus seperti Kopassus, Marinir, dan Paskhas yang disiapkan untuk menjalankan tugas-tugas strategis dalam kondisi darurat.



Logo TNI - paradigmbangsa.com

b. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)



Logo Polri - noc.scmmedia.co.id

Polri memiliki tugas utama dalam menjaga ketertiban dan keamanan dalam negeri. Beberapa tugas utama Polri meliputi:

- ▷ Penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
- ▷ Pencegahan dan pemberantasan kejahatan, termasuk kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, serta ancaman terorisme.
- ▷ Pengamanan acara-acara nasional seperti pemilu, peringatan kenegaraan, dan pertemuan internasional.
- ▷ Pengawasan lalu lintas dan transportasi, guna menciptakan keselamatan dan ketertiban dalam berkendara.

Polri juga memiliki satuan khusus seperti Densus 88 yang berperan dalam penanggulangan terorisme serta Brimob yang bertugas menangani gangguan keamanan dalam skala besar.

c. Badan Intelijen Negara (BIN)



Logo BIN – wikipedia.com

Sebagai lembaga intelijen nasional, BIN berfungsi mengumpulkan dan menganalisis berbagai informasi strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Tugas utama BIN meliputi:

- ▷ Mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terhadap keamanan negara, baik dari dalam maupun luar negeri.
- ▷ Mengumpulkan informasi terkait aktivitas kelompok radikal, separatis, dan organisasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
- ▷ Menjalin kerja sama intelijen dengan negara-negara lain untuk menghadapi ancaman global seperti terorisme dan spionase.

BIN memiliki peran krusial dalam menganalisis serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai langkah-langkah strategis dalam menangani potensi ancaman terhadap keamanan nasional.

d. Kementerian Pertahanan



Logo Kemenhan – Wikipedia.com

Kementerian Pertahanan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan strategi pertahanan nasional. Fungsi utama kementerian ini antara lain:

- ▷ Menyusun kebijakan pertahanan negara, termasuk pengelolaan anggaran militer dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista).
- ▷ Mengembangkan kekuatan militer nasional dengan meningkatkan kesiapan dan kapasitas tempur TNI.

Menjalin kerja sama internasional di bidang pertahanan, baik dalam aspek diplomasi militer, latihan bersama, maupun pertukaran teknologi pertahanan.

e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)



Logo BNPB – Kompas.id

BNPB merupakan lembaga yang berperan dalam mitigasi dan penanganan bencana nasional. Peran BNPB mencakup:

- ▷ Menanggulangi bencana alam dan bencana non-alam, seperti gempa bumi, banjir, pandemi, dan kebakaran hutan.
- ▷ Menyusun kebijakan dan program mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana di berbagai daerah rawan.
- ▷ Menyediakan bantuan darurat serta rehabilitasi pasca-bencana guna membantu pemulihan masyarakat yang terdampak.

BNPB bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, dan relawan kemanusiaan dalam menangani bencana nasional.

f. Sistem Hukum dan Kebijakan Publik

Keamanan dalam negeri juga didukung oleh sistem hukum yang kuat. Berbagai undang-undang dan peraturan dibuat untuk memastikan stabilitas negara, antara lain:

- ▷ Undang-Undang tentang Terorisme, yang mengatur tentang penindakan terhadap aksi terorisme dan perlindungan masyarakat dari ancaman ekstremisme.
- ▷ Undang-Undang tentang Keamanan Siber, yang bertujuan untuk melindungi infrastruktur digital dari ancaman serangan siber.
- ▷ Peraturan tentang Pengelolaan Keamanan Publik, yang mencakup penegakan hukum terhadap kejahatan dan ketertiban sosial.

Dengan sistem hukum yang kuat, Indonesia dapat mengantisipasi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks.

g. Partisipasi Masyarakat dalam Keamanan Negara

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Beberapa bentuk partisipasi masyarakat antara lain:

- ▷ Kewaspadaan terhadap potensi ancaman, misalnya melaporkan aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang.
- ▷ Berpartisipasi dalam kegiatan keamanan komunitas, seperti ronda malam dan forum komunikasi masyarakat.

- ▷ Mendukung program pencegahan kejahatan dan radikalisme, dengan meningkatkan kesadaran dan toleransi sosial.
- ▷ Kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sangat berpengaruh terhadap stabilitas nasional.

h. Kerja Sama Internasional dalam Pertahanan dan Keamanan

Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara lain dalam bidang pertahanan dan keamanan. Beberapa bentuk kerja sama internasional yang dilakukan meliputi:

- ▷ Latihan militer bersama dengan negara sahabat, seperti latihan tempur dan operasi maritim untuk memperkuat pertahanan kawasan.
- ▷ Pertukaran informasi intelijen dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional seperti narkoba dan terorisme.
- ▷ Partisipasi dalam operasi penjagaan perdamaian dunia, seperti kontribusi pasukan perdamaian PBB.

Melalui kerja sama ini, Indonesia dapat memperkuat posisinya di kancah internasional serta mengantisipasi ancaman yang bersifat lintas negara.

Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Pembangunan sistem pertahanan dan keamanan nasional merupakan prioritas utama bagi setiap negara, termasuk Indonesia, guna menjaga stabilitas dan kedaulatan bangsa. Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, sistem pertahanan yang kokoh harus didukung oleh kebijakan yang matang, infrastruktur yang memadai, serta kerja sama antara berbagai elemen negara, baik sipil maupun militer.

Pembangunan pertahanan dan keamanan tidak hanya berfokus pada kekuatan militer, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas intelijen, kesiapsiagaan dalam menangani bencana, serta kolaborasi dengan komunitas internasional. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif diperlukan untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga di tengah dinamika global yang terus berkembang.

a. Identifikasi Ancaman Dan Risiko

Langkah awal dalam memperkuat pertahanan nasional adalah memahami berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas negara. Ancaman ini dapat berasal dari dalam maupun luar negeri, serta bisa berbentuk militer maupun non-militer.

1) Ancaman Militer

Ancaman ini melibatkan penggunaan kekuatan militer oleh negara lain atau kelompok bersenjata yang dapat mengganggu kedaulatan Indonesia. Beberapa bentuk ancaman militer meliputi:

- ▷ Pelanggaran Wilayah: Masuknya kapal perang atau pesawat militer asing tanpa izin ke dalam perairan atau wilayah udara Indonesia.
- ▷ Invasi atau Agresi Militer: Serangan bersenjata yang dilakukan oleh negara lain.
- ▷ Pemberontakan Bersenjata: Gerakan separatistis yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI.
- ▷ Perang Siber: Serangan terhadap infrastruktur digital dan sistem pertahanan negara.

2) Ancaman Non-Militer

Ancaman ini berasal dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mengancam stabilitas nasional, di antaranya:

- ▷ Terorisme dan Radikalisme: Penyebaran ideologi ekstrem yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- ▷ Kejahatan Siber: Peretasan data penting negara, penyebaran berita hoaks, dan serangan digital terhadap infrastruktur publik.
- ▷ Bencana Alam: Gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan perubahan iklim yang dapat memengaruhi ketahanan masyarakat.
- ▷ Ancaman Ekonomi: Ketergantungan ekonomi terhadap negara lain, inflasi, dan ancaman resesi yang dapat melemahkan ketahanan ekonomi nasional.
- ▷ Penyelundupan dan Kejahatan Transnasional: Perdagangan manusia, narkoba, dan penyelundupan senjata yang melibatkan jaringan internasional.

Dengan pemetaan ancaman yang jelas, langkah antisipatif dapat dirancang untuk mengatasi potensi gangguan terhadap stabilitas nasional.

b. Penyusunan Kebijakan Pertahanan Dan Keamanan

Untuk menghadapi berbagai ancaman yang telah diidentifikasi, diperlukan kebijakan pertahanan dan keamanan yang komprehensif dan fleksibel dalam menyesuaikan diri dengan kondisi geopolitik global yang terus berubah.

1) Dasar Hukum dan Regulasi

- ▷ Konstitusi (UUD 1945): Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan.
- ▷ Undang-Undang: Seperti UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.
- ▷ Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden: Mengatur mekanisme operasional sistem pertahanan negara.

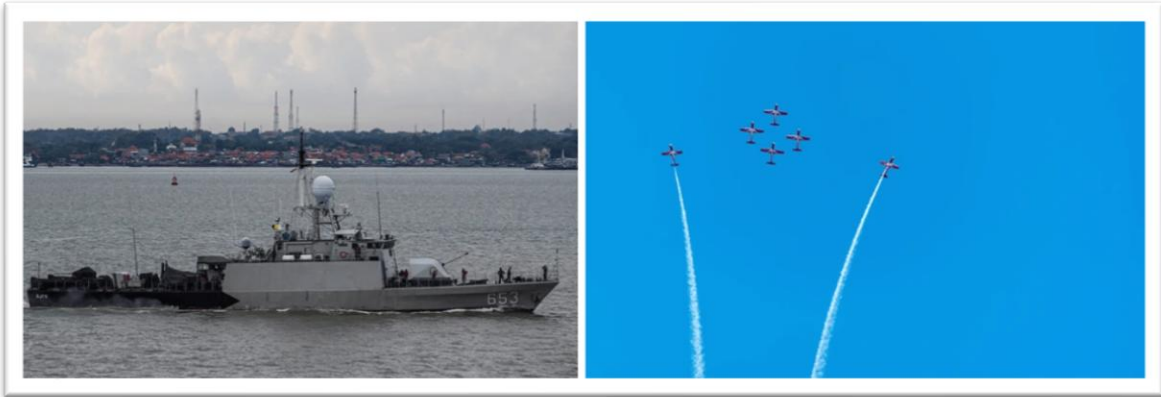
2) Strategi Pertahanan Negara

Strategi Pertahanan Berlapis: Melibatkan kombinasi antara kekuatan militer dan partisipasi masyarakat.

- ▷ Pendekatan Keamanan Holistik: Menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan diplomasi dalam menjaga stabilitas negara.
- ▷ Peningkatan Peran Wilayah Perbatasan: Memperkuat pos-pos keamanan di daerah rawan konflik.

Penyusunan kebijakan yang matang menjadi kunci dalam membangun sistem pertahanan yang kokoh dan berkelanjutan.

c. Modernisasi Alutsista Dan Infrastruktur



Alutsista – Shutterstock.com/ 2200310871, Shutterstock.com/ 2206536359

Kemajuan teknologi mengharuskan Indonesia untuk terus memodernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan memperkuat infrastruktur pertahanan.

1) Modernisasi Alutsista

- ▷ Pengadaan Pesawat Tempur Generasi Baru: Seperti F-16 Viper dan Sukhoi Su-35.
- ▷ Penguatan Armada Laut: Kapal selam, kapal patroli, dan kapal fregat untuk menjaga wilayah maritim Indonesia.

Pengembangan Sistem Pertahanan Udara: Rudal anti-serangan udara dan radar canggih.

2) Penguatan Infrastruktur Pertahanan

- ▷ Pembangunan Pangkalan Militer: Di wilayah perbatasan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap ancaman.
- ▷ Keamanan Siber: Membangun sistem keamanan digital untuk melindungi data negara dari ancaman peretasan.

Modernisasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tangkal Indonesia terhadap ancaman global.

d. Penguatan Militer Dan Aparat Keamanan

Selain alutsista, kualitas sumber daya manusia dalam sektor pertahanan juga perlu ditingkatkan. Berikut sumberdaya manusia dalam sektor pertahanan yang perlu ditingkatkan :

1) Pengembangan Kapasitas Militer

- ▷ Peningkatan Jumlah Personel TNI dan Polri: Untuk memperkuat ketahanan nasional.
- ▷ Latihan Militer Berskala Internasional: Melalui kerja sama dengan negara sahabat.
- ▷ Peningkatan Kesejahteraan Prajurit: Dengan fasilitas dan tunjangan yang lebih baik.

2) Reformasi Kepolisian

- ▷ Peningkatan Profesionalisme Polri: Dalam menegakkan hukum dan menjaga ketertiban.
- ▷ Penggunaan Teknologi Modern dalam Kepolisian: CCTV pintar dan sistem pengenalan wajah untuk mendukung pengamanan dalam negeri.

e. Pengembangan Intelijen Dan Sistem Pengamanan

Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks, peran intelijen menjadi semakin krusial.

1) Peningkatan Kemampuan Intelijen

- ▷ Penggunaan Big Data dan Artificial Intelligence (AI): Untuk mendeteksi ancaman sejak dini.
- ▷ Operasi Kontra-Terrorisme: Dengan kerja sama antara BIN, Polri, dan TNI.

2) Penguatan Sistem Pengamanan Publik

- ▷ Peningkatan Keamanan Digital: Melindungi infrastruktur penting dari serangan siber.
- ▷ Pembangunan Jaringan Informasi Intelijen: Berkoordinasi dengan lembaga intelijen internasional.

f. Penanganan Krisis Dan Bencana

Selain ancaman keamanan, negara harus siap dalam menghadapi krisis, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam.

1) Penguatan BNPB dan Basarnas

- ▷ Penempatan Tim Reaksi Cepat di Daerah Rawan Bencana: Untuk respons yang lebih sigap.
- ▷ Pembangunan Shelter dan Infrastruktur Tanggap Darurat: Sebagai upaya mitigasi.

2) Pelibatan TNI dan Polri dalam Penanganan Bencana

- ▷ Evakuasi dan Bantuan Logistik: Dalam situasi darurat nasional.
- ▷ Restorasi Pasca-Bencana: Melalui pembangunan kembali infrastruktur yang rusak.

g. Kerja Sama Internasional Dalam Pertahanan

Untuk memperkuat sistem pertahanan, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara lain.

1) Aliansi Keamanan Regional

Keikutsertaan dalam ASEAN Defence Ministers' Meeting (ADMM).

2) Kerja Sama Teknologi Militer

Transfer Teknologi dengan Negara Maju: Seperti pembelian dan pengembangan pesawat tempur.

3) Kontribusi dalam Misi Perdamaian PBB

Pengiriman Pasukan Garuda: Untuk membantu menjaga stabilitas dunia.

Bela Negara sebagai Wujud Pertahanan dan Keamanan

a. Hakikat Bela Negara

Bela negara adalah upaya yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Konsep ini tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan militer, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kontribusi yang mendukung ketahanan nasional secara keseluruhan. Bela negara menjadi perwujudan dari rasa cinta terhadap tanah air, serta komitmen dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut adalah prinsip-prinsip bela negara.

- 1) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara: Setiap warga negara harus memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan negara.
- 2) Cinta Tanah Air: Warga negara harus memiliki kecintaan yang mendalam terhadap Indonesia dan menunjukkan loyalitas kepada bangsa serta negaranya.
- 3) Setia kepada Pancasila dan UUD 1945: Sebagai dasar dan konstitusi negara, Pancasila dan UUD 1945 harus dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Rela Berkorban untuk Kepentingan Nasional: Sikap mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- 5) Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara: Setiap warga negara harus siap berkontribusi dalam mempertahankan bangsa sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing.

b. Landasan Hukum Bela Negara

Sebagai kewajiban setiap warga negara, bela negara telah diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang mengikat. Regulasi tersebut memberikan dasar bagi setiap individu untuk turut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - ▷ Pasal 27 Ayat (3): "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
 - ▷ Pasal 30 Ayat (1): "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara."
 - ▷ Pasal 30 Ayat (2): "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan rakyat semesta."
- 2) Undang-Undang Terkait
 - ▷ UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur kebijakan dan strategi pertahanan negara.
 - ▷ UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
 - ▷ UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang mengatur tugas TNI dalam sistem pertahanan negara.
 - ▷ UU RI No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- 3) Ketetapan MPR RI
 - ▷ TAP MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri.
 - ▷ TAP MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri dalam Pertahanan dan Keamanan.

c. Bentuk dan Implementasi Bela Negara

Bela negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kemampuan dan kondisi individu. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

1) Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen penting dalam menanamkan kesadaran bela negara sejak dini. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya menjaga keutuhan bangsa.



Pendidikan Kewarganegaraan – Shutterstock.com/2222919495

2) Pelatihan Dasar Kemiliteran

Pelatihan dasar kemiliteran memberikan warga negara kesempatan untuk meningkatkan kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi berbagai ancaman. Program ini biasanya melibatkan pelatihan fisik, strategi pertahanan, serta kesiapan menghadapi situasi darurat.

3) Pengabdian sebagai Prajurit TNI atau Anggota Polri

Menjadi anggota TNI atau Polri adalah salah satu bentuk konkret dari bela negara yang melibatkan tugas langsung dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional. Anggota TNI bertugas dalam aspek pertahanan militer, sedangkan Polri berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Pengabdian Sesuai Profesi

Bela negara juga dapat diwujudkan dalam bentuk pengabdian sesuai dengan profesi masing-masing. Contohnya adalah:

- ▷ Dokter yang bekerja di daerah terpencil untuk memberikan pelayanan kesehatan.
- ▷ Guru yang mengajar di wilayah pedalaman guna meningkatkan kualitas pendidikan.
- ▷ Relawan yang membantu dalam penanggulangan bencana.

5) Kegiatan Sosial dan Gotong Royong

Partisipasi dalam kegiatan sosial, seperti kerja bakti, siskamling, dan bakti sosial, merupakan bentuk bela negara yang mendukung ketahanan sosial masyarakat. Gotong royong dalam menyelesaikan masalah bersama menunjukkan semangat kebersamaan dan persatuan.

d. Nilai-Nilai Bela Negara

Untuk dapat diimplementasikan dengan efektif, bela negara harus didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

1) Cinta Tanah Air

- ▷ Menghargai dan melestarikan budaya bangsa.
- ▷ Menggunakan produk dalam negeri untuk mendukung perekonomian nasional.
- ▷ Menjaga lingkungan dan sumber daya alam.

2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

- ▷ Mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat.
- ▷ Menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya.
- ▷ Tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak stabilitas nasional.

3) Pancasila sebagai Ideologi Negara

- ▷ Pancasila harus dijadikan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan.
- ▷ Nilai-nilai Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga harmoni sosial.

4) Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Sikap rela berkorban diperlukan untuk menjaga kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Contohnya adalah:

- ▷ Mengikuti ajang internasional yang membawa nama baik Indonesia.
- ▷ Bersedia menjadi relawan dalam situasi bencana atau darurat nasional.

5) Memiliki Kemampuan Bela Negara

- ▷ Keterampilan dan keahlian yang dapat digunakan untuk kepentingan bangsa dan negara.
- ▷ Menjaga kesehatan fisik dan mental agar dapat berkontribusi secara optimal.
- ▷ Sikap disiplin dan kerja keras dalam menjalankan profesi dan tugas masing-masing.



Jejak Pancasila

TNI Pernah Dinobatkan sebagai Pasukan Paling Ditakuti di Asia Tenggara!

Militer Indonesia (TNI) dikenal memiliki kemampuan tempur yang luar biasa. Bahkan, dalam beberapa latihan militer bersama, tentara negara lain mengakui ketangguhan dan disiplin pasukan TNI.



Contoh Soal

Soal 1

Salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam sistem pertahanan dan keamanan negara adalah....

- a. Menjadi anggota militer aktif
- b. Melakukan aksi protes terhadap kebijakan pertahanan
- c. Melaporkan ancaman terhadap keamanan kepada pihak berwenang
- d. Menghindari kewajiban bela negara
- e. Menolak peran serta dalam pertahanan negara

Jawaban Benar: c. Melaporkan ancaman terhadap keamanan kepada pihak berwenang

Pembahasan:

Dalam sistem pertahanan semesta, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk mendukung keamanan negara, termasuk dengan melaporkan ancaman keamanan kepada pihak yang berwenang seperti kepolisian atau militer.

Soal 2

Lembaga yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pertahanan negara di Indonesia adalah....

- a. Kementerian Pertahanan (Kemhan)
- b. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
- d. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- e. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Jawaban Benar: a. Kementerian Pertahanan (Kemhan)

Pembahasan:

Kementerian Pertahanan bertanggung jawab dalam perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan pertahanan negara, termasuk penguatan TNI dan modernisasi alutsista.

Soal 3

Salah satu tujuan utama sistem pertahanan negara adalah....

- a. Melakukan ekspansi wilayah ke negara lain
- b. Meningkatkan jumlah tentara tanpa strategi yang jelas
- c. Menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman
- d. Memfokuskan keamanan hanya pada wilayah perkotaan
- e. Menggunakan militer untuk mengatur kebijakan ekonomi

Jawaban Benar: c. Menjaga kedaulatan negara dan melindungi masyarakat dari ancaman

Pembahasan:

Sistem pertahanan negara bertujuan untuk menjaga kedaulatan, melindungi masyarakat dari ancaman, serta memastikan stabilitas nasional dalam berbagai aspek, baik militer maupun non-militer.

Kegiatan Kelompok 1

Memahami Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia

Tujuan: Mengidentifikasi dan menganalisis peran serta implementasi nyata sistem pertahanan dan keamanan negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- 1) Bentuklah kelompok belajar yang terdiri dari 3–4 peserta didik.
- 2) Tentukan salah satu topik utama yang berkaitan dengan sistem pertahanan dan keamanan negara, misalnya:
 - a. Peran TNI atau Polri dalam menjaga keamanan nasional.
 - b. Sistem pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata).
 - c. Ancaman militer dan nonmiliter terhadap NKRI.
 - d. Kerja sama internasional Indonesia dalam bidang pertahanan.
 - e. Implementasi bela negara oleh masyarakat sipil.
- 3) Kumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya (buku, artikel, situs resmi pemerintah, dll.) mengenai topik yang dipilih.
- 4) Analisis informasi tersebut, lalu kaitkan dengan situasi aktual (konteks kekinian) di Indonesia. Bahas:
 - a. Apa yang sedang terjadi terkait isu tersebut?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya?
 - c. Apa dampaknya bagi masyarakat?
- 5) Buat produk kelompok dalam bentuk karya menarik yang mencerminkan pemahaman kalian, misalnya:
 - a. Infografis digital/cetak,
 - b. Video pendek berdurasi maksimal 3 menit,
 - c. Poster digital berisi kutipan dan ilustrasi,
 - d. Cerpen bertema pertahanan-keamanan,
 - e. Simulasi diskusi atau berita dalam bentuk rekaman suara (*podcast* mini).
- 6) Presentasikan karya kelompok kalian di depan kelas secara bergantian.
- 7) Unggah hasil karya kelompok ke platform yang telah disepakati bersama guru (misalnya Google Classroom, Padlet, dsb).



4. Peran Indonesia dalam Hubungan Antarnegara



Pertemuan G20 – Shutterstock.com/2224130185

Arti, Faktor Penyebab, dan Tujuan dari Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah suatu proses interaksi yang melibatkan kerja sama, diplomasi, serta potensi konflik di antara berbagai negara di tingkat global. Interaksi ini mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, hingga budaya. Dinamika dalam hubungan internasional menggambarkan upaya negara-negara dalam memperjuangkan kepentingan nasional mereka di arena global, baik melalui jalur diplomasi, perdagangan, kemitraan strategis, maupun melalui konfrontasi dalam kasus tertentu.

Terdapat sejumlah faktor yang mendorong terbentuknya hubungan internasional. Perbedaan dalam sistem politik, ideologi, agama, serta kebijakan pemerintahan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik maupun kerja sama antarnegara. Sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan mineral, juga sering kali menjadi faktor utama dalam hubungan antarnegara, baik sebagai alasan untuk membangun kerja sama ekonomi maupun sebagai sumber ketegangan geopolitik. Selain itu, faktor ekonomi, keamanan, serta kepentingan nasional masing-masing negara turut berperan dalam membentuk dinamika hubungan internasional.

Negara-negara berusaha membangun hubungan internasional dengan berbagai tujuan, antara lain untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan, membangun aliansi strategis, serta memperkuat posisi negara dalam percaturan global. Dengan adanya interaksi antarnegara yang efektif, perdamaian dunia dapat dipelihara, dan konflik yang muncul dapat diminimalkan.

a. Diplomasi

Diplomasi merupakan sarana utama dalam menjalin hubungan antarnegara yang melibatkan dialog, negosiasi, serta interaksi diplomatik guna mencapai tujuan tertentu, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun keamanan. Proses diplomasi mencakup pengiriman duta besar atau perwakilan diplomatik, perundingan internasional, serta penyelesaian konflik melalui jalur damai. Negara menggunakan diplomasi untuk membangun kerja sama bilateral maupun multilateral, serta sebagai sarana untuk mewakili kepentingan nasional di forum internasional.

b. Keamanan Internasional

Aspek keamanan dalam hubungan internasional berfokus pada berbagai isu yang berkaitan dengan konflik bersenjata, ancaman terorisme, penyebaran senjata nuklir, hingga keamanan siber. Keamanan

internasional juga mencakup upaya negara-negara dalam mencegah konflik global melalui kerja sama pertahanan, pembentukan aliansi militer, serta penerapan kebijakan yang bertujuan menjaga stabilitas keamanan global. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sering kali berperan dalam mediasi dan penyelesaian konflik antarnegara.

c. Ekonomi Internasional

Interaksi ekonomi antarnegara mencakup perdagangan internasional, investasi global, kebijakan moneter, serta pembangunan ekonomi. Negara-negara melakukan kerja sama ekonomi melalui perjanjian dagang, partisipasi dalam organisasi ekonomi dunia seperti WTO (World Trade Organization), serta melalui kerja sama dalam ekonomi regional. Dampak globalisasi terhadap ekonomi suatu negara juga menjadi perhatian utama dalam hubungan internasional, karena setiap perubahan dalam kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dunia.

d. Hukum Internasional

Hukum internasional mengatur berbagai aspek dalam interaksi antarnegara, mencakup hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, hukum perang, serta perjanjian-perjanjian internasional. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam hubungan internasional dan memastikan bahwa negara-negara menjalankan interaksinya berdasarkan prinsip keadilan serta keberlanjutan. Lembaga-lembaga internasional seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice) memainkan peran penting dalam penegakan hukum internasional.

e. Organisasi Internasional

Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ASEAN, Uni Eropa, NATO, serta WTO memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan global. Organisasi-organisasi ini memfasilitasi kerja sama antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk perdamaian, keamanan, ekonomi, lingkungan, serta hak asasi manusia. Keberadaan organisasi internasional memungkinkan negara-negara untuk mengatasi isu-isu global secara kolektif dan mencari solusi bersama atas berbagai tantangan internasional.

f. Studi Konflik dan Perdamaian

Kajian mengenai konflik dan perdamaian internasional melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang menyebabkan perselisihan antarnegara, strategi untuk mencegah konflik bersenjata, serta cara-cara dalam menangani situasi pascakonflik. Studi ini juga membahas mengenai diplomasi perdamaian, rekonsiliasi antarnegara, serta pembangunan kembali wilayah yang terkena dampak konflik.

g. Kebijakan Luar Negeri

Setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang dirancang untuk mengatur hubungan dengan negara lain. Kebijakan ini mencerminkan strategi politik, ekonomi, militer, serta budaya yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional dan mempertahankan kepentingan negara di panggung internasional. Kebijakan luar negeri juga mencerminkan bagaimana suatu negara menempatkan dirinya dalam hubungan bilateral dan multilateral.

h. Diplomasi Publik dan Diplomasi Budaya

Selain diplomasi formal yang dilakukan oleh pemerintah, diplomasi publik dan budaya juga berperan dalam membangun citra negara di mata dunia. Diplomasi publik melibatkan komunikasi dengan masyarakat internasional melalui media, pertukaran akademik, serta promosi kebudayaan. Sementara itu, diplomasi budaya mencakup pertukaran seni, tradisi, serta kegiatan budaya lainnya yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai dan identitas bangsa kepada dunia. Contohnya, Indonesia sering kali memanfaatkan seni dan budaya, seperti tarian tradisional dan kuliner khas, untuk memperkenalkan kekayaan budaya nasional kepada masyarakat internasional.

Prinsip-Prinsip dalam Hubungan Internasional



Teritorial Indonesia – Shutterstock.com/2289968211

Asas dalam hubungan antarnegara dan antarbangsa merupakan prinsip mendasar yang mengatur interaksi antarnegara di tingkat global. Asas-asas ini membentuk fondasi hukum, moral, dan etika dalam dinamika hubungan internasional. Dengan adanya asas ini, negara-negara dapat menjalankan kebijakan luar negerinya dengan lebih tertib dan harmonis sesuai dengan norma yang berlaku di dunia internasional. Berikut adalah beberapa asas penting dalam hubungan internasional:

a. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara adalah prinsip yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh dan mutlak dalam mengatur urusan dalam negerinya tanpa intervensi pihak lain. Asas ini menjadi dasar dalam hubungan internasional karena mencerminkan kemerdekaan dan keabsahan suatu negara dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi, sosial, serta pertahanannya.

Kedaulatan negara juga berhubungan erat dengan asas kebangsaan, di mana negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur warga negaranya dan menjalankan kedaulatannya dalam batas wilayah yang diakui. Dalam praktiknya, kedaulatan negara ini dihormati oleh negara lain dengan tidak melakukan campur tangan dalam urusan domestik suatu negara.

b. Kesetaraan Negara

Asas kesetaraan negara menyatakan bahwa semua negara, baik besar maupun kecil, memiliki kedudukan yang sama dalam hukum internasional. Tidak ada negara yang memiliki hak atau kewajiban lebih besar dibandingkan dengan negara lainnya. Prinsip ini sering tercermin dalam berbagai organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana setiap negara diberikan hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan global.

Dengan adanya asas ini, hubungan internasional dapat berjalan secara adil tanpa adanya dominasi dari negara tertentu atas negara lainnya. Kesetaraan ini juga menjadi kunci dalam diplomasi, perdagangan, dan kerja sama multilateral.

c. Teritorial

Asas teritorial menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak penuh atas wilayahnya, baik daratan, lautan, maupun udara yang menjadi bagian dari kedaulatannya. Hak ini mencakup pengelolaan sumber daya alam, pengaturan perbatasan, serta penegakan hukum dalam wilayah yurisdiksi negara tersebut. Dalam konteks hubungan internasional, asas ini berarti bahwa setiap individu atau pihak asing yang memasuki suatu negara harus menghormati peraturan yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, pelanggaran wilayah oleh negara lain, seperti invasi atau okupasi ilegal, dianggap sebagai bentuk pelanggaran asas teritorial.

d. Keterbukaan

Keterbukaan dalam hubungan internasional menekankan bahwa setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk berinteraksi dengan negara lain secara transparan dan jujur. Asas ini mengakui bahwa negara-negara harus dapat berbagi informasi tentang kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan mereka untuk memperkuat kerja sama global.

Prinsip keterbukaan juga mencakup transparansi dalam diplomasi dan hubungan antarnegara untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat memicu konflik. Dengan adanya asas ini, negara-negara dapat membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

e. Nonintervensi

Asas nonintervensi menggarisbawahi bahwa suatu negara tidak boleh ikut campur dalam urusan domestik negara lain tanpa persetujuan resmi. Prinsip ini mencakup larangan terhadap intervensi politik, militer, ekonomi, dan budaya yang bertujuan untuk mengubah sistem pemerintahan atau kebijakan internal negara lain. Dalam praktiknya, asas ini sering menjadi perdebatan dalam hubungan internasional, terutama dalam kasus intervensi kemanusiaan, di mana negara atau organisasi internasional terlibat untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara.

f. Hidup Berdampingan Secara Damai

Prinsip hidup berdampingan secara damai menegaskan pentingnya perdamaian dalam hubungan internasional. Negara-negara didorong untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui jalur diplomasi, dialog, dan negosiasi, bukan melalui kekuatan militer atau kekerasan.

Asas ini juga mencakup penghormatan terhadap perbedaan ideologi, politik, dan sistem pemerintahan yang dianut oleh negara lain. Dengan adanya prinsip ini, negara-negara dapat menjalin hubungan yang harmonis dan stabil dalam komunitas internasional.

g. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarnegara dalam berbagai aspek, seperti perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, perdagangan, dan lingkungan. Prinsip utama dalam hukum internasional mencakup konsep *pacta sunt servanda* (perjanjian harus dihormati) dan *equality rights* (kesetaraan hak antarnegara).

Hukum internasional bertujuan untuk menciptakan tatanan global yang lebih adil dan teratur, serta memberikan pedoman bagi negara-negara dalam menjalankan kebijakan luar negerinya. Hukum ini bersumber dari perjanjian, konvensi, kebiasaan internasional, serta keputusan badan hukum internasional.

h. Kerja Sama Internasional

Kerja sama internasional merupakan asas yang mendorong negara-negara untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan berbagai tantangan global, seperti perubahan iklim, kemiskinan, konflik bersenjata, dan krisis kemanusiaan. Asas ini mencerminkan semangat solidaritas antarnegara dalam menghadapi permasalahan yang bersifat lintas batas.

Kerja sama internasional dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian bilateral atau multilateral, bantuan kemanusiaan, perdagangan internasional, serta pertukaran pendidikan dan teknologi. Negara-negara yang aktif dalam kerja sama internasional cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil dan mendapatkan keuntungan ekonomi serta politik dari aliansi global.

i. Penghargaan terhadap Keberagaman dan Kebudayaan

Asas ini menekankan pentingnya menghormati perbedaan budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing negara. Dalam hubungan internasional, prinsip ini mendorong negara-

negara untuk mempromosikan dialog antarbudaya, meningkatkan toleransi, dan mencegah konflik berbasis perbedaan identitas.

Sebagai contoh, banyak negara yang menjalankan diplomasi budaya melalui pertukaran seni, festival budaya, serta kerja sama dalam bidang pendidikan untuk mempererat hubungan dengan negara lain. Dengan demikian, asas ini tidak hanya membantu memperkuat hubungan internasional, tetapi juga menjaga stabilitas sosial di tingkat global.



Penghargaan Budaya – Shutterstock.com/ 2590450817

Peran Indonesia dalam Organisasi Internasional

Indonesia memiliki peran yang cukup signifikan dalam berbagai organisasi internasional, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi-organisasi ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga stabilitas global, memperkuat hubungan diplomatik, serta meningkatkan kesejahteraan nasional dan internasional. Indonesia terlibat dalam organisasi yang berfokus pada perdamaian dunia, kerja sama ekonomi, perdagangan, serta hak asasi manusia. Berikut adalah peran Indonesia dalam beberapa organisasi internasional utama:

a. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Sebagai anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 28 September 1950, Indonesia telah berkontribusi dalam berbagai program yang bertujuan menjaga perdamaian dunia. Keanggotaan Indonesia dalam PBB memberi kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan kebijakan global yang menyangkut keamanan, pembangunan, dan hak asasi manusia.

Salah satu kontribusi penting Indonesia dalam PBB adalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke berbagai negara yang mengalami konflik, di bawah misi United Nations Peacekeeping Forces. Selain itu, Indonesia juga pernah terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB beberapa kali, yang memperkuat peran strategisnya dalam diplomasi global. Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai badan PBB seperti UNESCO, WHO, dan UNHCR untuk mendukung upaya dalam pendidikan, kesehatan, dan pengungsi.

b. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN)

Sebagai salah satu negara pendiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada 8 Agustus 1967, Indonesia berperan besar dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk dengan

tujuan meningkatkan kerja sama antarnegara di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan.

Indonesia sering kali menjadi mediator dalam penyelesaian konflik antara negara anggota ASEAN, serta mempromosikan konsep ASEAN Way, yaitu pendekatan diplomasi berbasis konsensus dan dialog. Dalam bidang ekonomi, Indonesia mendukung realisasi ASEAN Economic Community (AEC) yang bertujuan menciptakan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga berperan dalam berbagai inisiatif regional seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Defense Ministers' Meeting (ADMM) yang bertujuan memperkuat kerja sama pertahanan.

c. Gerakan Non-Blok (*Non-Aligned Movement/NAM*)

Indonesia merupakan salah satu negara yang memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961 bersama negara-negara berkembang lainnya. Gerakan ini didirikan sebagai respons terhadap ketegangan Perang Dingin antara blok Barat (dipimpin oleh Amerika Serikat) dan blok Timur (dipimpin oleh Uni Soviet).

Melalui GNB, Indonesia aktif memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan negara-negara berkembang, menentang kolonialisme, serta memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil. Indonesia juga terlibat dalam berbagai forum internasional di bawah GNB yang menyoroti isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan ekonomi global, dan pembangunan berkelanjutan.

d. Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (*Asia-Pacific Economic Cooperation/APEC*)

APEC adalah forum kerja sama ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang bertujuan meningkatkan integrasi ekonomi dan perdagangan bebas. Indonesia menjadi anggota APEC sejak didirikannya pada tahun 1989, dan telah dua kali menjadi tuan rumah KTT APEC, yakni pada tahun 1994 di Bogor dan tahun 2013 di Bali.

Dalam KTT APEC 1994, Indonesia memperkenalkan Bogor Goals, sebuah visi yang bertujuan mewujudkan perdagangan bebas dan investasi terbuka bagi negara maju pada tahun 2010, serta bagi negara berkembang pada tahun 2020. Indonesia terus berperan dalam mendorong kerja sama perdagangan regional, meningkatkan investasi asing, serta memperkuat daya saing ekonomi nasional dalam forum APEC.



Pertemuan Tahunan APEC – Shutterstock.com/ 2542685963

e. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki peran aktif dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang beranggotakan negara-negara Islam dari berbagai kawasan. OKI bertujuan meningkatkan solidaritas umat Islam, memperjuangkan hak-hak negara anggota, serta mengatasi berbagai permasalahan seperti konflik di dunia Islam, ketidakadilan global, dan krisis kemanusiaan.

Indonesia berperan dalam mendukung berbagai inisiatif diplomatik dan kemanusiaan OKI, termasuk dalam membantu penyelesaian konflik di Palestina, Rohingya, dan Filipina Selatan. Pada tahun 1993, Indonesia menjadi ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines (OIC PCSP), yang berkontribusi dalam perundingan damai antara Pemerintah Filipina dan kelompok Moro National Liberation Front (MNLF).

f. Kelompok G20 (Group of Twenty)

Indonesia merupakan satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20, sebuah forum kerja sama ekonomi yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia serta Uni Eropa. G20 memiliki peran strategis dalam membahas isu-isu global seperti kebijakan moneter, perdagangan internasional, investasi, serta stabilitas keuangan dunia.

Sebagai anggota G20, Indonesia aktif menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, terutama dalam hal pembangunan ekonomi yang inklusif, pengurangan kesenjangan global, serta penanganan perubahan iklim. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, yang mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, menyoroti pentingnya kerja sama global dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

g. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO)

Indonesia menjadi anggota WTO sejak organisasi ini didirikan pada tahun 1995 sebagai kelanjutan dari perjanjian perdagangan multilateral GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). WTO berperan dalam mengatur aturan perdagangan internasional, menyelesaikan sengketa dagang, serta mendorong liberalisasi ekonomi.

Dalam WTO, Indonesia aktif memperjuangkan kebijakan perdagangan yang adil bagi negara berkembang, serta menolak kebijakan proteksionisme yang merugikan ekonomi nasional. Indonesia juga terlibat dalam berbagai perundingan perdagangan, termasuk Doha Development Agenda, yang bertujuan meningkatkan akses pasar bagi negara-negara berkembang dan mengurangi hambatan tarif serta subsidi perdagangan.

Contoh Soal

Soal 1

Salah satu prinsip utama politik luar negeri Indonesia adalah....

- a. Berpihak pada negara-negara besar
- b. Mengisolasi diri dari hubungan internasional
- c. Politik bebas aktif
- d. Menerapkan kebijakan proteksionisme dalam perdagangan
- e. Mengutamakan kepentingan negara maju

Jawaban Benar: c. Politik bebas aktif

Pembahasan:

Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, yang berarti tidak memihak pada blok kekuatan tertentu, tetapi tetap aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan kerja sama internasional.

Soal 2

Organisasi internasional yang berperan dalam membangun kerja sama ekonomi di kawasan Asia-Pasifik adalah....

- a. ASEAN
- b. APEC

- c. PBB
- d. NATO
- e. Uni Eropa

Jawaban Benar: b. APEC

Pembahasan:

APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) adalah organisasi yang fokus pada kerja sama ekonomi dan perdagangan antarnegara di kawasan Asia-Pasifik.

Soal 3

Salah satu bentuk kontribusi Indonesia dalam hubungan internasional adalah....

- a. Mengirim pasukan perdamaian PBB
- b. Mengurangi kerja sama dengan negara lain
- c. Menutup diri dari perdagangan internasional
- d. Menolak hubungan diplomatik dengan negara-negara tertentu
- e. Menerapkan kebijakan luar negeri tertutup

Jawaban Benar: a. Mengirim pasukan perdamaian PBB

Pembahasan:

Indonesia secara aktif mengirim pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik dalam misi PBB untuk mendukung stabilitas global, seperti di Lebanon dan Sudan.



5. Implementasi Nilai Pancasila dalam Pembangunan



Mengenal Pancasila - Shutterstock.com/ 1983784727

Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Ideologi

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam berbagai aspek kehidupan. Lima sila dalam Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menjadi fondasi dalam pembangunan ideologi nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila membentuk identitas nasional, menyatukan keberagaman masyarakat, dan menjadi arah dalam pembangunan negara. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana masing-masing sila Pancasila berperan dalam pembangunan ideologi.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila mengandung prinsip fundamental yang menegaskan pentingnya kepercayaan dan penghormatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini mencerminkan keberagaman agama di Indonesia dan menekankan nilai toleransi serta harmoni antarumat beragama. Dalam pembangunan ideologi, sila ini berperan dalam menanamkan moralitas, integritas, dan spiritualitas dalam kehidupan masyarakat. Hal ini mendorong kebijakan-kebijakan negara yang berbasis pada nilai-nilai etika dan keagamaan, sehingga pembangunan nasional dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan aspek keimanan dan ketakwaan.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menggarisbawahi pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia serta keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pembangunan ideologi, nilai ini menjadi landasan dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, serta mendorong kesejahteraan sosial bagi seluruh warga negara. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi.

c. Persatuan Indonesia

Persatuan adalah aspek kunci dalam pembangunan ideologi nasional. Sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya kesatuan bangsa dalam keberagaman etnis, budaya, dan agama. Dalam

proses pembangunan ideologi, prinsip ini berfungsi sebagai perekat yang memperkuat identitas nasional serta mencegah potensi perpecahan dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam sila ini mengajarkan tentang pentingnya solidaritas, gotong royong, serta kesadaran kolektif dalam mencapai kepentingan bersama sebagai satu bangsa.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila menegaskan pentingnya sistem demokrasi yang berlandaskan prinsip musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pembangunan ideologi, prinsip ini diterapkan dalam sistem pemerintahan yang demokratis, di mana masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Demokrasi juga mencerminkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik dalam proses politik dan pembangunan nasional.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila mengandung nilai utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan ideologi, prinsip ini diterapkan dalam upaya menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif, distribusi kekayaan yang lebih merata, serta akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan bagi semua lapisan masyarakat. Keadilan sosial juga menekankan perlunya mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan memperjuangkan hak-hak rakyat dalam memperoleh manfaat dari pembangunan negara.



Hak untuk bekerja – Shutterstock.com/ 1793523331

Peran Pancasila dalam Pembangunan Politik

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran fundamental dalam membentuk sistem politik di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Setiap sila dalam Pancasila memberikan kontribusi terhadap pembangunan politik yang stabil dan harmonis, memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara serta menjaga persatuan dalam keberagaman. Berikut adalah penjelasan mengenai peran setiap sila Pancasila dalam sistem politik Indonesia.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menekankan pentingnya nilai keimanan dalam kehidupan politik. Dalam konteks pemerintahan, nilai ini mengajarkan bahwa pemimpin dan pejabat negara harus menjalankan tugasnya dengan moralitas yang tinggi, kejujuran, serta tanggung jawab spiritual. Prinsip ini memastikan bahwa kebijakan dan keputusan politik yang diambil selaras dengan nilai-nilai agama dan etika sosial.

yang dianut oleh masyarakat. Dengan kata lain, Pancasila mengarahkan politik Indonesia agar tidak hanya berlandaskan pada kepentingan praktis semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kebenaran yang berakar dari ajaran agama yang diakui di Indonesia.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam sistem politik Indonesia. Prinsip ini menjadi dasar bagi pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan politik yang diterapkan harus mengutamakan keadilan sosial, perlindungan hak-hak dasar warga negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan adanya sila ini, pembangunan politik di Indonesia diarahkan untuk menciptakan sistem yang bebas dari diskriminasi, memperjuangkan persamaan hak, serta menjamin kebebasan individu dalam menyuarakan pendapatnya. Selain itu, nilai ini juga menekankan pentingnya etika dalam berpolitik, mendorong para pemimpin untuk bersikap bijaksana, menghargai perbedaan, dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik politik.

c. Persatuan Indonesia

Sila ketiga menegaskan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dalam konteks politik. Keberagaman etnis, budaya, dan agama di Indonesia menuntut adanya sistem politik yang mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa memihak pada satu kelompok tertentu. Persatuan menjadi kunci dalam menciptakan stabilitas politik, mencegah konflik horizontal, serta membangun kesadaran kolektif bahwa kepentingan nasional harus diutamakan di atas kepentingan golongan. Dalam praktik politik, nilai ini tercermin dalam semangat kebangsaan, solidaritas nasional, serta upaya mempererat hubungan antarwarga negara melalui kebijakan yang berorientasi pada integrasi dan keharmonisan sosial.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat menggarisbawahi bahwa sistem politik Indonesia harus didasarkan pada prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilu, representasi parlemen, maupun forum-forum musyawarah lainnya. Dalam konteks pembangunan politik, sila ini menjadi landasan bagi sistem pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan rakyat. Dengan menerapkan prinsip demokrasi yang sehat, Indonesia dapat menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasinya dan berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan nasional.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya pemerataan dalam pembangunan politik dan ekonomi. Dalam konteks politik, keadilan sosial berarti menciptakan sistem yang memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menikmati manfaat dari kebijakan negara. Prinsip ini juga mencakup upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial, memastikan distribusi sumber daya yang adil, serta memperjuangkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pemerintahan yang berlandaskan pada sila ini akan berusaha untuk membangun sistem politik yang pro-rakyat, menjamin akses yang sama terhadap layanan publik, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan umum.

Peran Pancasila dalam Pembangunan Ekonomi

Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila memiliki peran fundamental dalam membentuk arah kebijakan ekonomi nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi landasan moral, etika, serta filosofi dalam perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pancasila mengarahkan pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial, distribusi sumber daya yang adil, serta

pembangunan yang menghormati hak asasi manusia. Berikut adalah nilai-nilai Pancasila dalam konteks pembangunan ekonomi:

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai dalam sila pertama Pancasila menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan dengan menjunjung tinggi moralitas, integritas, dan nilai-nilai etika yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini mengingatkan bahwa dalam setiap aspek perekonomian, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi, para pelaku ekonomi harus bertindak dengan penuh tanggung jawab moral dan spiritual.

Sila ini juga menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan ekonomi tidak hanya diukur dari akumulasi materi, tetapi juga dari keberkahan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, praktik bisnis yang beretika, kejujuran dalam perdagangan, serta upaya untuk menghindari praktik ekonomi yang merugikan orang lain, seperti monopoli dan eksploitasi tenaga kerja, menjadi bagian dari implementasi sila pertama dalam pembangunan ekonomi.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip dalam sila kedua Pancasila menggaris bawahi pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dalam setiap aktivitas ekonomi. Pembangunan ekonomi harus berlandaskan keadilan sosial dan keberadaban, sehingga semua warga negara memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya ekonomi dan peluang usaha.

Implementasi nilai ini mencakup kebijakan ekonomi yang pro-rakyat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), serta penghapusan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Pemerintah dan sektor swasta harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Perlindungan hak pekerja, upah yang layak, serta jaminan sosial merupakan bentuk nyata dari penerapan nilai ini dalam sistem ekonomi.



Produk UMKM – Shutterstock.com/ 2430467621

c. Persatuan Indonesia

Sila ketiga Pancasila menegaskan bahwa persatuan nasional harus menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang inklusif harus menciptakan kesetaraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras, maupun daerah. Dalam konteks ekonomi, sila ini mendorong kerja sama antarwilayah dalam rangka mempercepat

pertumbuhan ekonomi nasional yang merata. Hal ini dapat diwujudkan melalui kebijakan desentralisasi ekonomi, penguatan ekonomi daerah, serta peningkatan investasi di wilayah-wilayah tertinggal.

Selain itu, persatuan dalam ekonomi juga mencakup upaya untuk menghindari konflik kepentingan ekonomi yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Kolaborasi antaraktor ekonomi, baik antara pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat sipil, sangat diperlukan guna menciptakan ekonomi nasional yang kuat dan berdaya saing.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya demokrasi ekonomi, yang berarti bahwa kebijakan ekonomi harus dirumuskan melalui proses yang partisipatif dan musyawarah mufakat. Prinsip ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan ekonomi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor usaha, pekerja, akademisi, dan komunitas lokal.

Dalam praktiknya, nilai ini dapat diimplementasikan melalui penyusunan kebijakan ekonomi yang transparan dan berbasis kebutuhan rakyat. Misalnya, dalam pembuatan kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah harus mendengar aspirasi berbagai pihak agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Selain itu, keadilan dalam akses terhadap modal, peluang investasi, serta perlindungan hak-hak konsumen juga menjadi bagian dari demokrasi ekonomi yang sehat.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus berorientasi pada pemerataan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Nilai ini menekankan pentingnya penghapusan kesenjangan sosial-ekonomi melalui kebijakan redistribusi yang adil, seperti subsidi bagi kelompok masyarakat kurang mampu, jaminan sosial, serta akses yang setara terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan ekonomi yang berkeadilan juga harus mendorong penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan petani, buruh, dan pelaku usaha kecil. Negara bertanggung jawab dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi semua lapisan masyarakat agar mereka dapat berkembang dan mencapai kesejahteraan.

Selain itu, dalam konteks globalisasi ekonomi, sila ini mengajarkan bahwa Indonesia harus berperan aktif dalam sistem perdagangan internasional tanpa mengorbankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang pro-kepentingan nasional harus tetap dijaga, agar Indonesia dapat bersaing di pasar global tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi bangsa.

Peran Pancasila dalam Pembangunan Sosial dan Budaya

Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengaruh mendalam dalam pembentukan tatanan sosial dan budaya di Indonesia. Nilai-nilainya menjadi pedoman dalam menjaga harmoni, keadilan, serta kebersamaan di tengah keragaman masyarakat. Setiap sila dalam Pancasila berperan dalam membentuk kehidupan sosial budaya yang berkelanjutan, inklusif, dan harmonis.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama menegaskan pentingnya nilai keimanan dan penghormatan terhadap keberagaman agama yang dianut masyarakat Indonesia. Dalam konteks sosial dan budaya, nilai ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya diskriminasi.

Keberagaman keyakinan di Indonesia mencerminkan pluralitas yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, toleransi antarumat beragama menjadi aspek utama dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nilai moral dan etika juga ditekankan dalam interaksi sosial agar setiap individu dapat

hidup berdampingan dengan damai, menjunjung tinggi persaudaraan, serta menghindari konflik yang berakar dari perbedaan keyakinan.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila mengandung makna penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, serta sikap beradab dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pembangunan sosial budaya, nilai ini mendorong setiap individu untuk bersikap inklusif, menghargai sesama, serta mengedepankan kepedulian terhadap kelompok yang rentan atau kurang beruntung.

Prinsip ini juga mendorong budaya gotong royong dan solidaritas sosial, di mana setiap anggota masyarakat diharapkan saling membantu tanpa membedakan suku, agama, ras, atau golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan sosial seperti bakti sosial, donasi kemanusiaan, serta upaya perlindungan terhadap kelompok yang mengalami diskriminasi atau ketidakadilan.

c. Persatuan Indonesia



Melestarikan Budaya Daerah - kemenparekrat.go.id

Dalam sila ketiga, Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, suku, serta adat istiadat. Persatuan menjadi fondasi utama dalam membangun identitas nasional yang kokoh serta memperkuat rasa kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk.

Dalam ranah sosial dan budaya, persatuan menjadi landasan untuk menjaga keharmonisan serta mencegah konflik horizontal yang berpotensi memecah belah bangsa. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus berorientasi pada penguatan nilai-nilai kebersamaan, kerja sama, serta penghargaan terhadap keberagaman.

Penguatan identitas nasional juga dapat dilakukan melalui pelestarian budaya daerah, pengenalan seni tradisional, serta pendidikan multikultural yang mengajarkan generasi muda untuk menghargai warisan leluhur sekaligus menanamkan semangat cinta tanah air.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat menitikberatkan pada pentingnya demokrasi dalam kehidupan sosial dan budaya. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan harus dijamin agar setiap kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan sosial dapat mewakili kepentingan seluruh rakyat tanpa adanya diskriminasi.

Dalam pembangunan sosial budaya, nilai ini tercermin dalam berbagai bentuk musyawarah masyarakat, seperti rapat desa, rembug warga, serta forum diskusi publik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah harus bersifat adil, transparan, serta mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Selain itu, demokrasi juga mendorong adanya kebebasan berekspresi dalam aspek budaya dan sosial. Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan serta mengekspresikan identitas budayanya tanpa adanya pembatasan yang tidak adil.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menegaskan pentingnya pemerataan keadilan dalam kehidupan sosial dan budaya. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya, pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam pembangunan sosial budaya, prinsip ini mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama menciptakan kebijakan serta program yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Beberapa contoh konkret dari implementasi nilai ini dalam kehidupan sosial budaya adalah:

- ▷ Program perlindungan terhadap kelompok marginal, seperti penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin.
- ▷ Pelestarian budaya lokal melalui festival seni dan budaya untuk memastikan bahwa kekayaan budaya daerah tetap terjaga.
- ▷ Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil.

Penerapan keadilan sosial juga dapat diwujudkan melalui pemberdayaan komunitas lokal agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Peran Pancasila dalam Pembangunan Pertahanan dan Keamanan

Pancasila sebagai dasar ideologi negara memiliki peranan fundamental dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan yang kokoh dan berkelanjutan. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menjadi landasan bagi kebijakan, strategi, serta tindakan yang mendukung stabilitas nasional. Dalam konteks ini, setiap sila dalam Pancasila memiliki kontribusi spesifik dalam memperkuat pertahanan dan keamanan negara.

a. Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembangunan pertahanan dan keamanan menggarisbawahi pentingnya aspek moral dan spiritual dalam menjaga kedaulatan negara. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi pedoman dalam menjalankan tugas-tugas pertahanan dan keamanan, bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik dan strategi militer semata.

Dalam konteks ini, nilai ketuhanan mencerminkan keyakinan bahwa keberhasilan dalam menjaga stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, serta kejujuran dalam menjalankan amanah sebagai penjaga negara. Prinsip ini juga menuntut adanya integritas dan tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, sehingga tindakan yang diambil tetap sesuai dengan norma-norma agama dan kemanusiaan.

b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam setiap aspek pertahanan dan keamanan. Hal ini berarti bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam bidang ini harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghindari tindakan yang melanggar hak-hak individu atau kelompok.

Dalam realisasinya, nilai kemanusiaan ini mengarahkan sistem pertahanan agar tetap berorientasi pada keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Upaya pertahanan tidak hanya berfokus pada penggunaan kekuatan militer, tetapi juga pada pendekatan diplomasi, kerja sama antarnegara, serta penyelesaian konflik dengan cara yang adil dan beradab. Prinsip ini juga mendukung penggunaan kekuatan secara proporsional, menghindari pelanggaran HAM, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan ketegangan di tingkat nasional maupun internasional.



Kedutaan Besar RI – Id.wikipedia.org

c. Persatuan Indonesia

Persatuan nasional menjadi aspek kunci dalam menciptakan pertahanan yang kuat dan stabil. Sila ketiga Pancasila menekankan bahwa keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari segi suku, budaya, maupun agama, harus tetap menjadi kekuatan dalam membangun sistem keamanan yang inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Dalam konteks pertahanan, persatuan ini diwujudkan melalui semangat gotong royong dalam menjaga stabilitas negara. Semua elemen masyarakat, baik sipil maupun militer, memiliki peran dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan bangsa. Sila ini juga mengajarkan bahwa konflik internal yang dapat mengancam stabilitas harus diatasi dengan semangat nasionalisme dan kesetiakawanan. Selain itu, persatuan juga menjadi dasar dalam menjalin kerja sama internasional untuk memperkuat ketahanan negara di tengah dinamika global.

d. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila menegaskan bahwa setiap kebijakan pertahanan dan keamanan harus dibuat melalui proses yang transparan, partisipatif, dan mengakomodasi kepentingan seluruh rakyat. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil dalam sektor ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Partisipasi publik dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan pertahanan dan keamanan menjadi bagian penting dari prinsip ini. Demokrasi dalam pertahanan juga mencakup pengelolaan sumber daya pertahanan yang akuntabel, pembentukan strategi yang terbuka bagi kritik dan masukan, serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan rakyat. Prinsip ini juga mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan strategis yang menyangkut keamanan nasional, termasuk dalam hal kerja sama militer dengan negara lain.

e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima Pancasila menegaskan pentingnya distribusi keadilan dalam sistem pertahanan dan keamanan. Hal ini mencakup perlindungan yang merata bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya.

Prinsip keadilan dalam pertahanan menghendaki bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, kebijakan keamanan tidak boleh diskriminatif, tetapi harus mencerminkan kesejahteraan bersama. Implementasi nilai ini mencakup

peningkatan kesejahteraan prajurit dan aparat keamanan, penguatan infrastruktur keamanan di seluruh wilayah, serta distribusi sumber daya pertahanan yang merata hingga ke daerah terpencil.



- Jejak Pancasila

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara Indonesia, tetapi juga pernah dijadikan contoh oleh beberapa negara di Afrika dan Asia dalam merumuskan ideologi mereka, karena nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial dianggap relevan dan inspiratif. Di Indonesia sendiri, setiap kebijakan pemerintah wajib sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, dan jika ada kebijakan yang bertentangan, dapat dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Meski begitu, Pancasila sempat menghadapi tantangan serius, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru, ketika muncul upaya untuk menggantinya dengan ideologi lain. Namun berkat perjuangan rakyat dan tokoh bangsa, Pancasila tetap dipertahankan sebagai ideologi pemersatu bangsa hingga hari ini.



Contoh Soal

Soal 1

Sila Pancasila yang berkaitan dengan prinsip demokrasi dalam pemerintahan adalah....

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jawaban Benar: d. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pembahasan:

Sila keempat menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia harus demokratis, melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, serta mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

Soal 2

Implementasi nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pembangunan ekonomi diwujudkan dalam bentuk....

- a. Monopoli pasar oleh kelompok tertentu
- b. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan
- c. Mengutamakan investor asing dalam proyek nasional
- d. Menghapus program subsidi bagi rakyat miskin

e. Meningkatkan kesenjangan ekonomi antar daerah

Jawaban Benar: b. Peningkatan akses pendidikan dan kesehatan

Pembahasan:

Sila kelima Pancasila menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, termasuk memastikan akses pendidikan dan kesehatan bagi seluruh rakyat.

Soal 3

Dalam pembangunan budaya, nilai Persatuan Indonesia diwujudkan dengan....

- a. Menghapus perbedaan budaya daerah
- b. Melestarikan seni dan budaya nasional
- c. Mengutamakan budaya asing dibanding budaya lokal
- d. Melarang interaksi budaya antarbangsa
- e. Mengesampingkan nilai adat istiadat

Jawaban Benar: b. Melestarikan seni dan budaya nasional

Pembahasan:

Sila ketiga menekankan bahwa persatuan bangsa harus didukung dengan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya, termasuk dalam melestarikan seni dan budaya nasional sebagai identitas bangsa.

Kegiatan Kelompok 2

Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional

- 1) Bentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4–5 orang.
- 2) Pilih salah satu bidang pembangunan berikut ini:
 - a. Politik
 - b. Ekonomi
 - c. Sosial dan Budaya
 - d. Pertahanan dan Keamanan
 - e. Ideologi dan identitas nasional
- 3) Tugas kelompok:
 - a. Identifikasi dan jelaskan bagaimana lima sila Pancasila diterapkan dalam bidang pembangunan yang dipilih.
 - b. Kumpulkan contoh nyata dari media massa, buku, atau pengalaman di lingkungan sekitar yang menunjukkan penerapan nilai-nilai tersebut (bisa dalam bentuk berita, program pemerintah, atau kegiatan masyarakat).
 - c. Analisis apakah penerapan nilai-nilai tersebut sudah berjalan baik atau masih memiliki tantangan, berikan solusi atau rekomendasi.
- 4) Buat produk akhir kelompok dalam salah satu bentuk berikut:
 - a. Poster edukatif bertema “Pancasila dalam Aksi Pembangunan”
 - b. Video pendek berdurasi 2–3 menit

- c. Infografik digital
 - d. Cerpen atau narasi inspiratif tentang tokoh/masyarakat yang menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - e. Simulasi wawancara atau debat antarwakil bidang pembangunan
- 5) Presentasikan hasil karya kelompok di depan kelas, lalu diskusikan keterkaitan antara nilai Pancasila dan pembangunan nasional.
- 6) Refleksi pribadi:
- Setelah kegiatan, setiap anggota kelompok menulis singkat (3–5 kalimat) tentang:
- a. Nilai Pancasila apa yang paling menginspirasi baginya?
 - b. Bagaimana ia akan menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari?

Rangkuman

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam pembangunan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Setiap sila dalam Pancasila memberikan pedoman moral, etika, serta filosofi yang menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan. Dalam pembangunan ideologi, Pancasila mengokohkan identitas nasional, memperkuat persatuan, serta membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bernegara.

Di bidang politik, Pancasila menekankan sistem pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berkeadilan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan serta menjamin kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Sementara dalam aspek ekonomi, Pancasila menjadi pedoman dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

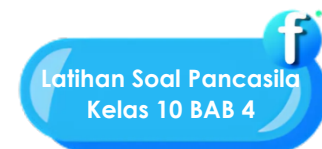
Dalam sektor sosial budaya serta pertahanan dan keamanan, Pancasila memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Nilai-nilai Pancasila mendorong sikap toleransi, gotong royong, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pertahanan dan keamanan, Pancasila menjadi pedoman bagi kebijakan yang menjaga kedaulatan negara dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan demokrasi. Dengan demikian, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan bernegara menjadi kunci utama dalam mewujudkan bangsa yang maju, harmonis, dan berdaulat.

Latihan Soal

1. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia menerapkan prinsip politik bebas aktif. Apa yang dimaksud dengan politik bebas aktif dalam praktik hubungan internasional Indonesia?
 - A. Indonesia hanya berfokus pada masalah dalam negeri tanpa melibatkan negara lain
 - B. Indonesia mendukung satu pihak dalam blok kekuatan tertentu untuk kepentingan bersama
 - C. Indonesia menjaga netralitas dengan tidak terlibat dalam masalah global sama sekali
 - D. Indonesia aktif berperan dalam perdamaian dunia tanpa memihak pada kekuatan besar manapun
 - E. Indonesia mengikuti kebijakan negara besar dalam hubungan internasional
2. Dalam sistem pertahanan negara, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan. Namun, bagaimana kewajiban tersebut diwujudkan tanpa melibatkan kekuatan militer secara langsung?
 - A. Melalui kontribusi finansial dalam pembiayaan militer
 - B. Dengan berpartisipasi dalam latihan militer tahunan
 - C. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan bela negara seperti pendidikan kewarganegaraan dan kerja bakti sosial
 - D. Dengan hanya mendukung keputusan militer tanpa ikut serta
 - E. Dengan memilih pemimpin yang memperhatikan sektor militer
3. Pancasila memiliki peran penting dalam membangun sistem pertahanan negara. Bagaimana Pancasila berperan dalam menciptakan kebijakan pertahanan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia?
 - A. Menyusun kebijakan yang berpihak pada golongan tertentu untuk memperkuat militansi nasional
 - B. Mendorong kebijakan yang hanya menguntungkan pihak militer tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat
 - C. Mewujudkan kebijakan pertahanan yang inklusif, memperhatikan semua lapisan masyarakat dan hak asasi manusia
 - D. Memperkenalkan strategi pertahanan yang menekankan pada konflik bersenjata antarnegara
 - E. Fokus pada pembangunan kekuatan militer yang hanya melibatkan negara besar
4. Apa dampak langsung dari penerapan nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan terhadap keputusan pertahanan negara?
 - A. Keputusan pertahanan negara lebih didasarkan pada kekuatan militer saja
 - B. Keputusan pertahanan negara lebih dipengaruhi oleh pengaruh negara-negara besar
 - C. Keputusan pertahanan negara dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif rakyat dan keputusan yang bijaksana
 - D. Keputusan pertahanan negara hanya melibatkan para pemimpin militer
 - E. Keputusan pertahanan negara dibuat secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat
5. Dalam hubungan internasional, Indonesia berperan aktif di beberapa organisasi internasional. Apa kontribusi Indonesia dalam APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)?

- A. Menyebarkan budaya lokal Indonesia
 - B. Mengembangkan kebijakan pendidikan antarnegara
 - C. Membangun hubungan ekonomi antarnegara di kawasan Asia-Pasifik untuk mendukung perdagangan dan pertumbuhan ekonomi regional
 - D. Berperan sebagai mediator dalam konflik internasional antar negara
 - E. Mengutamakan kerjasama dalam masalah keamanan regional
6. Salah satu peran Indonesia dalam organisasi PBB adalah....
- A. Mengajukan keputusan perang terhadap negara lain
 - B. Membantu negara-negara besar dalam menyusun kebijakan internasional
 - C. Berkontribusi dalam pasukan perdamaian PBB dan mengirimkan misi kemanusiaan
 - D. Menjaga ketertiban dengan cara menciptakan organisasi tandingan
 - E. Meningkatkan jumlah angkatan perang untuk mendominasi dunia
7. Apa yang menjadi alasan utama Indonesia mengimplementasikan nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pembangunan ekonomi?
- A. Untuk mendukung keberhasilan negara-negara besar
 - B. Untuk menambah kekuatan militer negara
 - C. Agar setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari pembangunan secara merata
 - D. Agar Indonesia menjadi negara dengan perekonomian terkuat di dunia
 - E. Untuk membatasi akses bagi kelompok yang kurang mampu

**Akses latihan soal
lainnya di sini yuk!**



Referensi

- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). (2020). Pancasila dalam Konteks Ketahanan Nasional. Jakarta: BPIP.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2018). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Kemendikbud.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI). (2002). Ketetapan MPR No. VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI). (2002). Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Maryanto, dkk. (2015). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Konsep dan Implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
- Tim Litbang Kemenag RI. (2020). Pancasila dalam Perspektif Islam: Kajian Kebangsaan. Jakarta: Kementerian Agama RI.